

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009
(Studi di Daerah Pemilihan Kota Mataram)**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

DIANA RAHMAWATI

NIM. 015772318

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

ABSTRAK

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi di Daerah Pemilihan Kota Mataram)

Diana Rahmawati

Universitas Terbuka

dayrahmayana@gmail.com

Kata Kunci: gender, partisipasi politik, legislatif, perempuan

Fokus tujuan riset ini adalah untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat keterwakilan wanita menjadi anggota legislatif di Kota Mataram dan implementasi kebijakan yang dijalankan untuk meningkatkan keterwakilannya dalam parlemen.

Desain riset yang digunakan adalah penelitian eksploratif. Informan utama yang digunakan adalah calon DPRD Kota Mataram yang berpartisipasi pada tahun 2009 dan wanita yang berhasil menjadi anggota DPRD Kota Mataram. Analisis data dengan pendekatan kualitatif, sehingga mengandalkan informasi dan temuan lain secara individual yang dijadikan dasar dalam melakukan generalisasi.

Temuan dalam penelitian ini adalah faktor yang menjadi penghambat keterwakilan wanita di parlemen adalah sumber daya finansial. Keterampilan dan pendidikan politik perlu dimaknakan secara operasional dengan menyatakan bahwa proses politik yang kurang bagi perempuan, untuk dengan segera terlibat dalam partai politik. Faktor yang sifatnya mendasar adalah masih adanya komersialisasi politik. Maskulin dan patriarki mutlak disebabkan sumber daya manusia laki-laki lebih tinggi dari perempuan, jadi sebagai penghambatnya bukan gender itu sendiri, tetapi kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Mataram lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan yang disarankan pada pemerintah atau organisasi publik yang menaungi pemilu legislatif di Kota Mataram, termasuk implementasinya pada dasarnya tidak ada. Satu kata kunci yang dapat diberikan adalah amanah dalam pekerjaan, sehingga bekerja berdasarkan fungsi dan tugas, bukan acuh dan seolah melakukan pembiaran atas kecurangan dan sejenisnya yang terjadi dalam setiap Pemilu Legislatif. Temuan ini memberikan penguatan atas kondisi aktual yang ada di lembaga atau organisasi publik adalah anggota atau personal atau aparatur negara mempunyai nilai amanah yang masih rendah.

Saran yang dapat diberikan adalah keterwakilan perempuan yang rendah di legislatif pada dasarnya bukan konteks subyektivitas gender, tetapi bagaimana para perempuan sejak dini memberikan pembuktian kualitas dan kompetensi diri yang unggul tidak kalah dengan kaum laki-laki. Pembelajaran secara proses dalam berpolitik sangat diperlukan, jadi sejak dini masuk dalam partai politik. Usahakan bekerja dengan sungguh-sungguh serta memberikan makna diri pada masyarakat. Keluarga bukan penghambat, tetapi bagaimana menjadi potensi untuk digerakkan sebagai tim sukses dan kerja lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

Affect Factors The Political Participation of Women Legislative on Year 2009
Legislative Election (Study in Regional Mataram Election)

Diana Rahmawati

Open University Indonesia

dayrahmayana@gmail.com

Key words: gender, political participation, legislative, women

The focus of this research goal is to find and analyze the factors which have obstructed women be a member of the legislative and implementation of policies to improve it in the city of Mataram.

Research design used was exploratory research. The main informant used was a women candidate participating and fill member of Mataram City Legislature in 2009. Data analysis with a qualitative approach, thus relying on the information and other findings are the basis for the individual to generalize.

The findings in this study is that a factor inhibiting representation women in parliament is financial resources, skill and political education. Fundamental factor is still of commercialization. Gender have not be obstructed, but the quality of human resources. There are no recommended policy and implementaion to the government or private organizations elections in the city of Mataram. A keyword can be given the mandate in the work, work hard and honesty. These findings provide reinforcement for the actual conditions that exist at the institution or public organization is a personal has a low of value trust.

Advice can be given is the low representation of women in the legislative context are not necessarily gender subjectivity, but how early women provide proof of quality and competence themselves superior than a men. Learning in the political process is necessary, so early entry in a political party. Try to work in earnest and give meaning to the people themselves. The family was not inhibitory, but how to be mobilized as the potential for a successful team.

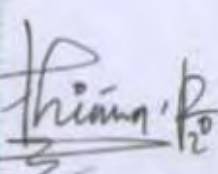
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 (Studi di Daerah Pemilihan Kota Mataram)** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Mataram, 16 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Diana Rahmawati)
NIM. 015772318

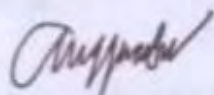
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi di Daerah Pemilihan Kota Mataram)

Penyusun TAPM : Diana Rahmawati
NIM : 015 772 318
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

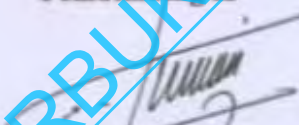
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Manggaukang Raba, MM
NIP. 196112311986031172

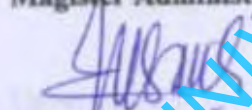
Pembimbing II



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 1952 0213 1985032001

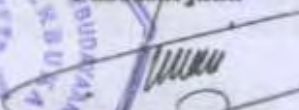
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si
NIP. 1967 1214191993032002

Direktur Program
Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 1952-0213 1985032001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ADMINISTRASI

PENGESAHAN

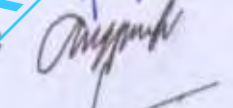
Nama : Diana Rahmawati
NIM : 015 772 318
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi di Daerah Pemilihan Kota Mataram)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/tanggal : Jum'at/7 September 2012
Waktu : 09.30

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji	:		<u>Suciati, M.Sc., Ph.D</u> NIP. 195202131985032001
Penguji Ahli	:		<u>Dr. Sofjan Aripin, M.Si</u> NIP. 196606191992031002
Pembimbing I	:		<u>Dr. H. Manggaukang Raba</u> NIP. 196112311986031172
Pembimbing II	:		<u>Suciati, M.Sc., Ph.D.</u> NIP. 195202131985032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

Kepada

Yth : Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari :

Nama/NIM : Diana Rahmawati/015772318

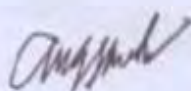
Judul TAPM : FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN
2009 (Studi di Daerah Pemilihan Kota Mataram)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan
sudah/belum selesai sekitar% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak
uji dalam Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk dijadikan periksa

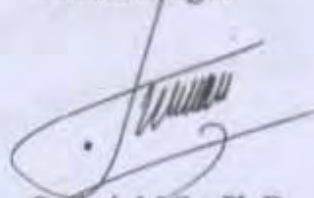
Mataram,2012

Pembimbing I



Dr. H. Manggaukang Raba, MM
NIP. 196112311986031172

Pembimbing II



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 195202131985032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram. Secara akademis penyusunan tesis ini ditujukan untuk mendapatkan kebulatan studi sarjana strata dua (S2) pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

Doa orang tua dan dukungan keluarga (suami dan anak-anakku) menjadi tumpuan keberhasilan, termasuk dalam proses pendidikan dan penyusunan TAPM ini. Ucapan terima kasih disampaikan secara khusus kepada bapak Dr.H.Manggaukang Raba, MM dan ibu Suciani M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan pengarahan yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Diucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ UT Mataram selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Kepala Bidang Program Pascasarjana selaku penanggung jawab Program Magister Administrasi Publik;
4. Dosen penguji ahli Bapak Dr.Sofjan Aripin, M.Si, atas segala masukan untuk penyempurnaan tesis ini;
5. Dosen dan staf akademis Pascasarjana Universitas Terbuka, khususnya pada UPBJJ-UT Mataram;
6. Politisi perempuan di Kota Mataram, khususnya yang berpartisipasi pada Pemilu pada Periode 2009-2014;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram, yang telah memberikan informasi selama proses penyusunan tesis ini;
8. Staf KPU Kota Mataram atas data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyusunan tesis;
9. Rekan-rekan mahasiswa dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Proses akademis dalam penyusunan tesis ini telah dilakukan, sehingga optimalisasi dalam hasilnya sangat diupayakan. Walaupun demikian, berbagai keterbatasan tentu masih ada, sehingga saran perbaikan terutama penelitian lanjutan yang diperlukan. Untuk itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan oleh peneliti yang akan datang dengan kajian yang sama dan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Akhir kata, saya berharap Allah Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Mataram, September 2012

Penyusun

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Kajian Teori	10
B. Kerangka Berpikir	37
C. Definisi Operasional	40
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 42
A. Desain Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Instrumen Penelitian	43
D. Prosedur Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	46

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014	48
1. Fungsi DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014	48
2. Profil DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014	50
3. Deskripsi Partai Politik dan Fraksi di DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014	55
4. Bias Informasi Perolehan Suara di Pilkada DPRD Kota Mataram Tahun 2009	57
5. Posisi Keterwakilan Parpol dalam DPRD Kota Mataram	59
B. Temuan Faktor-faktor yang Menghambat Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Mataram	61
C. Pengelolaan yang Dilakukan Perempuan yang Lolos di Parlemen (DPRD Kota Mataram)	91
D. Pembahasan	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	109
A. Simpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Hal

2.1. Skema Model Edwards.....	21
2.2. Perkembangan DPRI Perempuan Periode 1955-2014.....	35
2.3. Kerangka Berpikir Penelitian.....	38

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel

Hal

1.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2009-2014	7
3.1. Instrumen Penelitian	44
4.1. Pendidikan Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014	50
4.2. Umur Anggota DPRD Kota Mataram Periode 1999-2014	53
4.3. Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Agama pada Tahun 2009 ...	54
4.4. Jumlah Suara dan Keterwakilan Partai di DPRD Kota Mataram	56

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Informan
2. Daftar Panduan Wawancara
3. Daftar Angket
4. Daftar Panduan Wawancara Kebijakan

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan gender bukan hanya didominasi oleh negara berkembang saja, hal ini dibuktikan dengan perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa atas gender melalui pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana disebutkan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (UNDP, 2010). Pengesahan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember 1979, tetapi permasalahan gender masih melingkupi setiap negara di dunia. Dapat dibuktikan dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik yang hanya rata-rata mencapai 18,40 persen di parlemen (UNDP, 2010).

Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan atas *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984. Perundangan ini memberikan penegasan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil apapun lainnya). Pemerintah Indonesia sebagai anggota konvensi CEDAW mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya dengan segera agar diskriminasi gender terhapuskan (Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1984).

Pada prinsipnya, kemerdekaan yang diusahakan dan direalisasikan oleh bangsa Indonesia mengarahkan pada pewujudan hak politik secara umum bagi masyarakatnya (Sanit, 1985). Pernyataan ini juga mengisyaratkan kesetaraan hak

perempuan dan laki-laki dalam aspek politik, karena merupakan hak bagi individu yang berada dalam negara merdeka. Melalui terapan aspek politik tidak hanya berhenti pada politik itu sendiri, tetapi akan mengarah pada aspek hukum dan hak azasi manusia, selanjutnya akan memberikan dampak pada aspek ekonomi, termasuk kesetaraan dalam perekonomian.

Kesetaraan gender dalam politik akan berdampak pada aspek lain termasuk kegiatan ekonomi praktek, karena pada dasarnya melalui kegiatan politik akan diterbitkan perundangan atau sejenisnya yang mengarah pada upaya dari perempuan untuk meletakkan perempuan sebagai pelaku yang mendapatkan pengakuan. Luhulima (2007) memberikan penegasan bahwa posisi perempuan dalam kegiatan praktek selalu berada di bawah laki-laki atau selalu didampingkan dengan lelaki, walaupun kegiatan ekonomi dilakukan secara mandiri. Dapat dilihat pada akses mendapatkan pinjaman perbankan, seolah bahwa perempuan tidak mempunyai hak pengelolaan ekonomi secara penuh.

Dalam aspek politik, pemerintah Indonesia dapat dinyatakan terlambat dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Ditegaskan demikian, karena perundangan yang memberikan perhatian pada perempuan dalam aspek politik baru disahkan pada tahun 2003 melalui UU No. 12 tahun 2003. Keberpihakan pemerintah pun masih bersifat samar, dilihat dari bunyi pasal 65 ayat 1 yaitu “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30,00 %”. Perundangan ini tidak

secara tegas mewajibkan adanya keterwakilan perempuan pada setiap partai dengan komposisi sebesar 30,00 %.

Perhatian diberikan pada keterwakilan perempuan di sektor politik, karena pada dasarnya berbagai perumusan kebijakan dalam pengelolaan negara, melalui aspek politik. Pemerintah dapat menjalankan suatu kebijakan setelah mendapatkan pengesahan di parlemen, termasuk di Indonesia baik pada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ataupun APBD) dinyatakan dengan keputusan politik (Mahmudi, 2007). Dalam rangka keberpihakan kebijakan pemerintah pada perempuan, maka perlu keterwakilannya yang mencukupi, sehingga suaranya mempunyai prioritas.

Pemberlakuan undang-undang di atas tidak secara otomatis akan menyebabkan perempuan terpilih menjadi anggota parlemen. Banyak aspek penghambat yang perlu dicermati untuk dicarikan solusi. Secara nasional, keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 10,18 persen untuk periode 2004-2009 dan sebanyak 17,32 persen untuk periode 2009-2014 (UNDP, 2010). Secara nasional keterwakilan perempuan mengalami peningkatan pada pemilu periode 2009-2014, tetapi secara lokal khusus di Kota Mataram hanya 3 orang perempuan dari total DPRD sebanyak 35 orang atau sekitar 8,57 %.

Perempuan perlu terwakili dalam parlemen, sebagai wujud pemenuhan kebutuhan strategisnya, bukan sebatas pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan oleh pihak laki-laki (Parawansa, 2006). Adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen akan dapat menjadi pemicu munculnya inovasi kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan potensi perempuan dan inovasi dalam menghapuskan penyebab ketidaksetaraan gender dalam aspek yang luas.

Kota Mataram, secara statistik mempunyai *sex ratio* 96,30 % dalam perimbangan perempuan 100 : 96,30 laki-laki (BPS Kota Mataram, 2010). Potensi sumber daya perempuan harus dioptimalkan, sehingga perempuan muncul sebagai penggerak pembangunan dan aspek lain yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nyata. Dalam kerja pembangunan membutuhkan pengambil keputusan yang mengerti mengenai permasalahan dan potensi perempuan, sehingga potensi sumber daya manusia dengan gender perempuan dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus muncul sebagai penggerak dan yang digerakkan, sehingga memberikan manfaat berganda.

Fakta empiris keterwakilan perempuan di parlemen Kota Mataram masih sangat rendah, jauh lebih rendah dari capaian nasional. Hal ini yang mendorong diperlukannya analisis yang mendalam untuk menemukan faktor penghambat dan dicari solusi sehingga akan muncul faktor yang mendorong partisipasi (keterwakilan) perempuan di parlemen. Fokusnya penelitian ini, dapat digunakan desain temuan awal UNDP (2010) mengenai faktor penghambat keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu hambatan langsung, hambatan yang bersifat mendasar dan hambatan struktural. Hambatan yang bersifat langsung terkait dengan individu, hambatan mendasar lebih pada aspek yang terkait dengan cara hidup atau budaya dan hambatan struktural lebih terkait dengan peran pemerintah atau kelembagaan.

Diyakini bahwa hanya apabila perempuan dalam jumlah yang cukup besar menjadi pembuat keputusan, akan berusaha untuk membuat perbedaan dalam kehidupan kaum perempuan lain, terutama yang ada dalam sektor-sektor masyarakat yang lebih lemah. Konteks pembuat keputusan oleh DPR mengacu

pada kepentingan publik, sehingga dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisah dari kajian ilmu administrasi publik. Pendekatan pada pengambil keputusan yang lebih mengenal permasalahan gendernya dapat dihubungkan dengan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan, tepat sasaran, sehingga permasalahan ketertinggalan gender dapat teratasi dengan optimal. Konteks ini relevan dengan model kebijakan yang diberikan oleh Sabatier dan Mazmanian (1983:4).

Sejauh ini dapat dikatakan kontribusi kaum perempuan terhadap pembentukan konstitusi demokratik dan kebijakan penting lainnya tidak banyak. Salah satu sebabnya juga adalah kurangnya kemampuan perempuan mengartikulasikan masalah-masalah tersebut kepermukaan apalagi mendesakkan masalah dan kepentingan itu kepada pengambil keputusan dan mengontrol pelaksanaannya. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya partisipasi dan representasi politik perempuan baik dalam tataran politik formal maupun informal. Kondisi ini kemudian berkontribusi kepada rendahnya akses, partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting di negeri ini (KEMENEG PP, 2006).

Selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas. Partisipasi mereka di bidang politik selama ini, jika memang itu ada, hanya terkesan memainkan peran sekunder. Mereka hanya di lihat sebagai pemanis atau penggembira, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik. Dapat diamati bahwa betapa sedikitnya politisi atau tokoh perempuan yang mempunyai pengetahuan yang luas

mengenai berbagai persoalan publik yang dihadapi masyarakat. Dalam situasi seperti itu maka tidaklah terlalu mengherankan jika banyak kebijakan politik dan ekonomi yang dihasilkan tidak memperhitungkan kepentingan perempuan. Berbagai kebijakan politik dan ekonomi di masa lalu memperlihatkan dengan jelas betapa perempuan menanggung beban paling berat atas nama pembangunan nasional yang merupakan perpaduan antara proses pembangunan ekonomi dan pentingnya stabilitas politik (Soetjipto, 2005).

Secara nasional Indonesia mempunyai peringkat pembangunan gender yang tergolong masih rendah, berada pada peringkat 80 dari 156 negara. Artinya, dalam aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan termasuk di dalamnya lebih terperinci peran perempuan dalam politik masih tergolong rendah (UNDP, 2010). Kondisi ini akan semakin terpuruk jika mengacu pada kondisi regional tertentu, misalnya kota Mataram.

Pada Pemilu periode 2009-2014 dari 35 orang anggota DPRD Kota Mataram hanya 3 orang berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini memberikan pembuktian rendahnya pihak perempuan terwakili dalam parlemen, sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingannya. Dalam parlemen keterwakilan dari berbagai partai, karena mempunyai persepsi politik dalam memberikan sumbangan berpikir dan kerja dalam mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan keterwakilan perempuan sangat diperlukan guna memberikan persepsi dan kajian berpikir yang lebih mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Informasi keterwakilan perempuan dalam parlemen pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode 2009-2014.

No.	Partai	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golkar	4	-	4
2.	PDIP	3	1	4
3.	PPP	3	-	3
4.	PAN	3	-	3
5.	Demokrat	6	1	7
6.	PKS	3	-	3
7.	Hanura	1	-	3
8.	Gerinda	3	-	3
9.	PBR	2	-	2
10.	PKPB	1	1	2
11.	PPI	1	-	1
Jumlah		32	3	35

Sumber: KPU Kota Mataram, 2010

Jumlah anggota DPRD Kota Mataram yang berjenis kelamin perempuan hanya sekitar 8,57 persen, sedangkan kuota minimal dipersyaratkan atau dijadikan perhatian pada setiap partai minimal 30,00 persen. Fakta ini menunjukkan partisipasi perempuan secara nyata, termasuk dalam memenangkan hati pemilih di Kota Mataram masih tergolong rendah.

Melihat jumlah keterwakilan perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Mataram masih rendah maka perlu dilakukan penggalan atas faktor penghambat dari partisipasi perempuan itu sendiri. Dalam rangka lebih spesifik penggalan informasi dilakukan pada perempuan calon legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2009 yang tidak terwakilkan. Adapun penggalan informasi pada tiga orang yang sukses juga diperlukan untuk dapat diketahui implementasi yang dijalankan, sehingga keterwakilan perempuan dalam parlemen sesuai dengan amanat minimal dalam undang-undang, yaitu 30,00 persen.

Dalam rangka luasnya kajian ini, maka perlu juga diketahui perjuangan anggota legislatif perempuan di Kota Mataram dalam memunculkan potensi perempuan yang terpendam, serta bagaimana para legislatif laki-laki dalam memberikan kesempatan bagi para legislatif perempuan dalam memunculkan ide dan konsep berpikir sejalan dengan perannya di parlemen. Seluruh kajian ini dilakukan dalam rangka memunculkan kajian implementasi kebijakan bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan pada periode pemilu yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dicarikan solusi atau jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Mataram?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemilihan legislatif yang dijalankan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Mataram.

2. Untuk menemukan dan menganalisis implementasi kebijakan yang dijalankan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram.

D. Kegunaan Penelitian

Rancangan kegunaan penelitian ini diperuntukkan bagi tiga aspek, yaitu :

1. Secara teoritis untuk memperdalam dan memperluas khazanah pengetahuan dalam ilmu administrasi negara, khususnya studi implementasi kebijakan publik.
2. Secara praktis, sebagai masukan, informasi dan data bagi pemerhati perempuan, partai politik, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan dan merancang strategi untuk memberdayakan dan mencerdaskan perempuan dalam bidang politik.
3. Manfaat akademis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kebulatan studi pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu perlu ditampilkan dan dikaji dalam hubungannya dengan riset yang akan dilakukan. Hasil riset tersebut dapat dijadikan sebagai pemer kaya khazanah berpikir, sehingga pendekatan dalam memecahkan masalah penelitian dapat sesuai dengan harapan peneliti.

Chairunisa (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kesetaraan gender dan keadilan dalam pembangunan telah dapat dinyatakan terwujud di Indonesia, walaupun bukan pada taraf yang maksimal. Perlu diupayakan langkah-langkah dalam meningkatkan posisi perempuan dalam pembangunan, dilakukan dengan upaya dari perempuan itu sendiri dalam meningkatkan kualitas dirinya. Diperlukan upaya yang sadar dan kuat untuk memposisikan dirinya dalam pembangunan, dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Pemerintah juga perlu dengan sungguh-sungguh dan terus menerus dalam memberikan pendidikan dan kesempatan pada perempuan.

Pembangunan meliputi aspek yang luas, termasuk perubahan ke arah positif dari politik praktek, karena pada dasarnya kesejahteraan sangat dekat dengan keputusan politik. Keinginan politik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan adanya kesempatan perempuan dalam sektor ini akan dapat dirumuskan keputusan yang menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang umumnya berjenis kelamin perempuan.

Kajian administrasi publik (termasuk penelitian Chairunisa, 2009) dipublikasikan dalam jurnal administrasi publik, ini membuktikan bahwa kajian gender dalam sektor politik ini juga tepat diangkat menjadi kajian atau riset bidang administrasi. Adapun penelitian yang membahas mengenai peran anggota DPRD secara nyata di legislatif dianalisis oleh Ikfina (2010). Penelitian ini fokus pada kontribusi yang dijalankan oleh anggota DPRD perempuan dalam menjalankan berbagai fungsi, sesuai dengan komisinya. Temuan dalam penelitian ini adalah para perempuan (anggota DPRD Kabupaten Kebumen) tergolong baik dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Peran ganda yang dimiliki, yaitu mengurus rumah tangga tidak mengganggu tugasnya dalam mencari data atau informasi untuk dijadikan masukan pada pemerintah, termasuk pada saat penyusunan RAPBD.

Temuan Ikfina (2009) memberikan dukungan pada pernyataan Robbins dan Judge (2008), bahwa tidak ada perbedaan kemampuan dari sumber daya perempuan dengan laki-laki dalam berbagai jabatan, termasuk perannya sebagai pengambil keputusan. Kemampuan perempuan dalam menjalankan peran atau tugas yang dipercayakan dapat juga dilihat dari hasil penelitian Nafis (2010). Kinerja para pemimpin perempuan ini tergolong cukup baik, dengan rata-rata skoring 3,30, sementara skor baik mulai pada rata-rata skor 3,40, berarti ada selisih yang relatif kecil.

Kepercayaan yang diberikan pemerintah (dalam jabatan publik) dan oleh masyarakat (wakil rakyat di DPR) harus dibuktikan dengan optimal, dengan ciri kemampuannya dalam membawa perubahan pada pelaksanaan tugasnya. Hal ini berdampak pada keberanian dari masyarakat dan pemerintah untuk memberikan

beban tugas yang lebih besar, bukan sebaliknya menjadi stimulan negatif atas kepercayaan yang telah diberikan.

Penelitian tentang Partisipasi Politik Perempuan dilakukan pula oleh M. Zainuri (2007). Penelitian ini mendiskripsikan konstruksi tradisi Islam lokal Kudus tentang partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2004, dan implikasi pemikiran tradisi Islam lokal Kudus terhadap kehidupan berpolitik perempuan di Kudus.

The Asia Foundation (2009), menemukan ada kemajuan peran perempuan pada berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik. Persentase jumlah perempuan di parlemen telah mencapai 18,00 persen, yang periode sebelumnya hanya 11,00 persen. Di beberapa daerah ada yang mencapai 34,00 persen. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja para anggota dewan tersebut dilakukan pelatihan, dengan kerjasama berbagai pihak (termasuk kalangan akademis).

Hasil kerja The Asia Foundation ini dapat dijadikan wacana dalam merumuskan faktor-faktor yang berasal dari pemerintah dan organisasi guna memberikan dukungan dalam keterwakilan calon legislatif perempuan.

Parawansa (2005), dalam kajian yang dilakukan memberikan pembuktian secara nasional, bahwa perempuan mempunyai hambatan dalam berperan sebagai anggota legislatif. Di DPR Pusat, periode 1955-2004, persentase jumlah perempuan yang duduk di DPR kurang dari 10,00 persen. Periode 1999-2004, jumlah DPR hanya sebanyak 9,00% (dihubungkan dengan laporan The Asia Foundation, periode 2004-2014, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang mewakili masyarakat di DPR).

Diperlukan upaya-upaya lintas organisasi (pemerintahan dan non pemerintahan) yang dipimpin oleh perempuan, sehingga dapat saling memberikan dukungan pada perempuan untuk lebih banyak berperan di berbagai sektor. Aspek penting lain yang disarankan adalah meningkatkan kualitas pendidikan perempuan, advokasi pemimpin perempuan pemimpin partai, meningkatkan kesempatan tampil di media dan beberapa upaya untuk memecahkan masalah hambatan yang ada, bahkan sampai pada upaya untuk mengatur perundangan pemilihan umum.

Perempuan perlu membuktikan diri, terkait dengan kepercayaan masyarakat atas kemampuannya dalam membawa perubahan. Kesempatan pertama dalam pemerintahan di Indonesia pada kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, di mana masyarakat mempunyai opini sendiri atas perubahan kondisi ekonomi, politik dan lainnya, yang akan berdampak pada kesempatan politik pada gender perempuan.

Kinerja yang tinggi akan dapat menghapuskan pesimisme masyarakat atau apa yang dikenal dengan istilah subordinasi. Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak penting terlibat dalam pengambilan keputusan politik (Handayani, 2006). Fakta ini masih ada melingkupi para politisi perempuan untuk secara nyata dapat berkiprah dalam lembaga legislatif, termasuk kepercayaan menjadi pejabat dalam berbagai sektor.

Aspek gender dalam politik tidak saja menjadi fokus peneliti di negara berkembang. Takao (2006) juga melakukan penelitian atas kesetaraan gender dalam aspek politik di Jepang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepersertaan perempuan dalam memberikan suara pada pemilihan umum telah

berlangsung sejak tahun 1960-an, tetapi dalam sosial praktek masih jauh kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Diperlukan perubahan kebijakan dan organisasi pada level nasional untuk memperkenalkan kandidat perempuan, serta diperlukan gerakan perempuan dari akar rumput untuk mencapai posisi dalam organisasi untuk melakukan perubahan kebijakan serta mengkampanyekan perlunya banyak wakil dalam pemerintahan (dalam konteks luas, termasuk kerja dalam kedutaan). Terkait dengan hal tersebut perlu ditingkatkan partisipasi perempuan dalam aspek politik.

Aspek penting yang disarankan dalam riset yang dilakukan Takao (2006) adalah para perempuan perlu mengupayakan kesetaraan dengan cara mengadakan debat publik dan melakukan pergerakan dari bawah ke atas, dalam makna memberikan kesadaran pada akar rumput dan sisi lain menunjukkan potensi perempuan untuk bergerak dalam bidang politik. Ditegaskan juga bahwa kesetaraan dalam politik akan berdampak dalam kesetaraan pada aspek ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya. Dalam sejarah Jepang, kondisi kemerosotan perempuan disebabkan fokus pemerintah pada era pasca perang dunia kedua pada pengelolaan sumber daya, sehingga mengarah pada menonjolnya kaum laki-laki yang dikenal dengan *yuryokusha* (pengaruh pihak laki-laki).

Konteks di atas akan relevan dengan hambatan mendasar dalam temuan UNDP (2010), yaitu budaya maskulin *yuryokusha*. Konteks ini perlu dibuktikan muncul sebagai penghambat atau tidak pada level politik lokal di Kota Mataram. Dalam makna indikasi faktor yang menjadi penghambat partisipasi perempuan

akan digali atas dasar temuan UNDP. Aspek yang ditemukan dalam penelitian tersebut akan ditelusuri pada perpolitikan lokal yang ada di Kota Mataram.

Permasalahan yang dihadapi perempuan Indonesia relatif sama dengan perempuan Jepang, yaitu keterwakilan yang rendah dalam pemerintahan dan politik. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengamanatkan kesetaraan perempuan dalam aspek politik dengan menerapkan keterwakilan minimal 30,00 persen, tetapi hanya sebatas wacana yang membutuhkan perjuangan keras, baik pada level nasional, terlebih pada level lokal (pemerintah daerah).

Berhubungan dengan aspek di atas, pihak perempuan yang diharapkan mempunyai partisipasi tinggi, bukan sebatas mengandalkan konsep *diversity* yang dijalankan oleh pemerintah melalui undang-undang pemilu atau sejenisnya yang relevan dengan kegiatan aspek politik. Dalam penelitian ini, tidak diharapkan solusi yang muncul sebagai wujud sebatas peluang yang diciptakan, tetapi diharapkan karena ada dasar potensi yang terpendam dan membawa perubahan yang bermakna pada kehidupan perempuan dan masyarakat secara makro.

Pihak perempuan perlu memberikan pembuktian pada setiap kesempatan karier atau kesempatan dalam menduduki jabatan politik praktek. Pembuktian tersebut melalui kinerja yang tinggi dan terhindar dari praktek-praktek negatif yang selama ini menghiasi praktek politik di Indonesia. Debat mengenai potensi positif praktek politik perempuan akan lebih unggul dari laki-laki perlu dilakukan, tetapi juga perlu pembuktian pada setiap kesempatan, baik dari pemerintah lokal sampai pemerintah pusat. Pembuktian pernyataan Avilliani (2009) menyatakan dengan tegas, bahwa peran perempuan dalam praktek politik dan jabatan lain akan menjadi pengarah bagi laki-laki, karena laki-laki seringkali melakukan

penyimpangan dari jalur normatif pengelolaan dan pengambilan keputusan dari posisi yang dimilikinya.

2. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik, yaitu: apa saja pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi yang mirip dengan Thomas R. Dye, dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (1978), yaitu: apa yang oleh pemerintah nyatakan dan lakukan atau tidak dilakukan, merupakan tujuan atau sasaran program pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dikatakannya, bahwa implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (James P. Lester dan Joseph Stewart, 2000).

Model-model implemenasi kebijakan publik diantaranya adalah:

Pertama, model yang ditawarkan oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975). Model ini menawarkan adanya enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara isu kebijakan dengan pencapaian (*performance*). Keenam variabel tersebut adalah: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan implementasi; (4) karakteristik dari badan-badan pelaksana (*implementors*); (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan (6) kecenderungan dari pelaksana (*implementors*).

Kedua, model yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Disebutkannya, ada tiga klasifikasi variabel yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) variabel bebas (*independent variable*), yaitu mudah tidaknya masalah yang akan dikelola dapat dikendalikan, konteks ini memerlukan pemikiran bahwa variabel bebas hendaknya muncul dalam perspektif mudah untuk diatur atau dikelola dalam mewujudkan tujuan tertentu atau setidaknya ada peluang untuk mengendalikannya (2) *variabel intervening*, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat; dan (3) variabel terikat (*dependent variable*), yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: (a) pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, (b) kepatuhan obyek, (c) hasil nyata, (d) penerimaan hasil nyata tersebut, dan (e) mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Ketiga, model yang dikembangkan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn (1978), yang biasanya disebut oleh para pakar sebagai “*the top down approach*”. Menurutny, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*), diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1) bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan kendala yang serius; (2) tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan/program; (3) bahwa perpaduan sumber-

sumber yang diperlukan benar-benar ada; (4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan ketergantungannya kecil; (7) pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan (10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Keempat, model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut (Wibawa, Samodra, et al., 1994).

Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis dan manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) (siapa) pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Dikemukakan Grindle (1980), ada tiga hal pokok dalam implementasi kebijakan, yaitu: pertama, merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kedua, membentuk program-program kegiatan, dan ketiga, mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan.

Identifikasi faktor yang terkait dengan kebijakan mengacu pada model Grindle (1980) untuk kasus keterwakilan perempuan di parlemen, secara spesifik dalam penelitian ini telah melakukan identifikasi faktor penghambat yang

ditemukan dalam riset UNDP. Dapat dinyatakan bahwa riset yang akan dilakukan lebih bersifat *confirmatory analysis* atau melakukan pengecekan bahwa faktor tersebut terjadi atau tidak pada kasus keterwakilan perempuan pada pemilu pada parlemen di Kota Mataram. Atas identifikasi faktor telah dilakukan pendekatan dengan menggunakan hasil riset tertentu, yaitu riset UNDP, sedangkan model kebijakan publik yang digunakan mengacu pada model Mazmanian dan Sabatier.

Implementasi kebijakan dalam makna sederhana dapat dimaknai sebagai realisasi atau proses dijalankan aktivitas yang berhubungan dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tachian (2006) menyatakan implementasi kebijakan sebagai "aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (*tools*) untuk mencapai tujuan kebijakan".

Dalam penelitian ini perhatian diberikan pada percepatan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam rangka merealisasikan perundangan pada satu sisi dan sisi lain untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat melalui relevansi pembuat kebijakan dan lainnya yang terhubung dengan potensi perempuan yang terpendam. Perempuan yang lebih mengenal permasalahan yang dihadapi, sehingga diperlukan pembuat kebijakan perempuan melalui kerjanya dalam parlemen.

Konteks tingkat kepentingan yang mendesak (krusial) setidaknya dijadikan makna implementasi kebijakan oleh Edwards III (1980), yaitu :

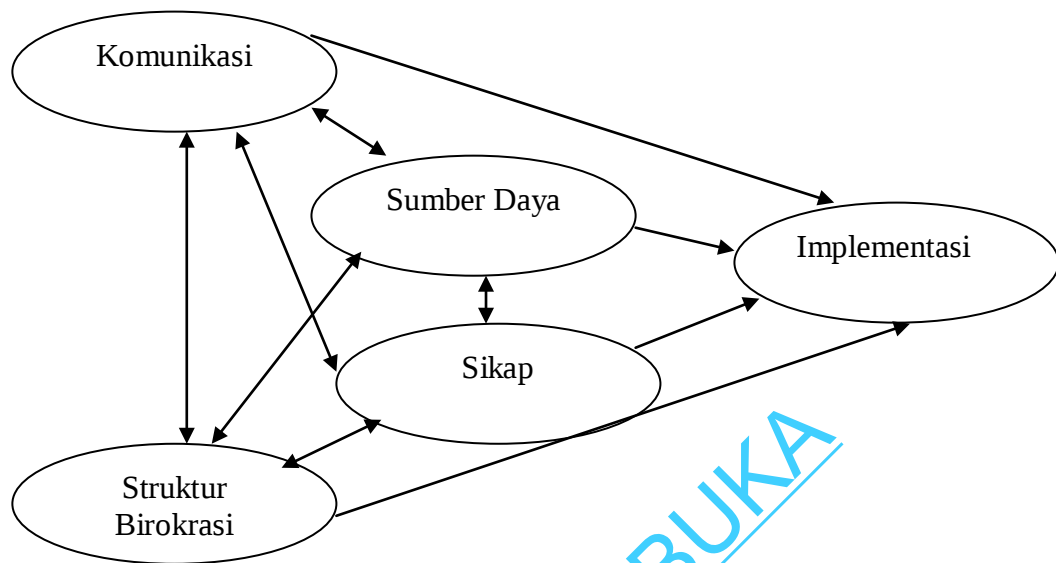
The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy - such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy of the people whom it affects.

Implementasi kebijakan tidak lepas dari kegiatan membangun suatu kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat, secara spesifik yang menjadi sasaran dari kebijakan terkait. Tachjan (2006) memberikan penegasan bahwa kajian implementasi kebijakan ini diperlukan, karena harapan dari perumusan kebijakan tidak selalu relevan atau bersesuaian dengan fakta yang dirasakan atau hasil nyatanya. Konteks ini juga terjadi pada harapan keterwakilan perempuan pada parlemen yang telah diundangkan, ternyata masih sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan fakta yang ada.

Implementasi kebijakan dimaknai oleh Sabatier and Mazmanian (1983:4), sebagai “ *those event and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which include both the effort to administer and the substantive impacts on people and events*”. Relevansi antara kewenangan perumus kebijakan dengan implikasinya pada masyarakat.

Kerangka berpikir lain yang diajukan oleh Edwards III, lebih mengedepan pada komponen yang ada dalam implementasi kebijakan. Terdapat empat kandungan utamanya, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan sikap (Subarsono, 2005). Hal ini dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 2.1 Skema Model Edwards III



Implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, seluruhnya saling berinteraksi untuk dikelola oleh perumusan kebijakan dan pihak yang melakukan kerja guna aktualisasinya, yaitu komunikasi, birokrasi struktural, sumber daya dan sikap. Dalam penelitian ini, pola pikirnya adalah bagaimana hasil riset dijadikan dasar dalam memberikan input untuk melakukan evaluasi perumusan kebijakan dan menyesuaikan sedemikian rupa antara realisasi dengan harapan.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols, 1996). Melalui partisipasi individu menjadi warga publik, mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Hal ini ditegaskan pula oleh John Stuart Mill dalam Miriam Budiarjo (1982), bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Di sini partisipasi dalam kata

lain menjadi ukuran adanya kemandirian dan kedewasaan individu (warga) dalam melihat batasan antara kepentingan privat dan publik.

Urusan publik memiliki hukum dan nilainya sendiri yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan privat. Maka dari itu, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena melukai partisipasi dan melanggar hukum publik. Dalam konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi, agar kekuasaan selalu berorientasi pada publik. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang otoriter, fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya partisipasi politik warga. Urusan kekuasaan disederhanakan hanya sebatas milik para elite politik. Sedangkan rakyat dikondisikan ke arah apatisme. Apatisme sebenarnya merupakan produk sosial, ekonomi dan pengaturan politik tertentu.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994), partisipasi politik adalah kegiatan warga (*privat citizen*) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bertujuan mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan

kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi mencakup kegiatan-kegiatan, bukan mencakup sikap-sikap.

Herbert McClosky dalam Ihromi (1995), mengatakan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam penjelasan ini, maka jelas kajian untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian administrasi publik. Alasan pertama terkait dengan upaya untuk merumuskan kebijakan publik, memberikan perhatian pada percepatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Michael Rush dan Phillip Althoff (1993), menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Selanjutnya, Ramlan Surbakti (1984), bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.

Rumusan lainnya, dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (1998), mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contracting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Hasyim (2001), di antara peran politik perempuan yang dimaksud adalah peran memberikan suara pada pemilihan, peran untuk menjadi anggota legislatif atau parlemen dan peran menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam Pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Milbrath dan Goel dalam (Sastroatmodjo, 1995), membedakan partisipasi menjadi beberapa teori, yaitu: Pertama, apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, yakni orang yang sedikit-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik, yaitu orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Goel dan Olsen dalam Sastroatmodjo (1995) menjelaskan partisipasi sebagai dimensi utama kehidupan stratifikasi sosial. Menurut mereka partisipasi dibagi dalam enam lapisan yakni pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik lainnya pada orang lain), warga negara marjinal (orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan orang-orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Partisipasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, partisipasi yang bersifat sukarela (otonom). Kedua, atas desakan orang lain

(mobilisasi). Hal ini senada dengan pendapat Nelson yang menyatakan dua sifat partisipasi yakni *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi).

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Myron Wiener dalam Huntington (1994) menekankan sifat sukarela dari partisipasi (tidak ada pemaksaan) dan mengemukakan menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat umum atas perintah pemerintah, tidak termasuk (partisipasi politik).

Dari pengertian ini maka, partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para aktifis perempuan pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan. Secara umum partisipasi tidak hanya pada bidang politik akan tetapi dalam segala bidang kehidupan. Perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang bias gender. Sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik, karena sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan.

David Easton, mengatakan bahwa proses politik adalah merupakan interaksi diantara lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok sosial. Hal ini menunjukkan, politik tidak hanya aktifitas yang ada pada tingkat elite tetapi melihat sudut pandang yang lebih pluralistic, yang menyertakan analisis pada aktifitas-aktifitas berbagai kelompok yang terorganisir diluar pemerintahan

dengan memberikan penekanan pada individu-individu, kepentingan-kepentingan bersama dan nilai normatif. Sehingga berpartisipasi tidak sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota, akan tetapi dalam proses partisipasi keterlibatan secara aktif mental, emosi dan perilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan.

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan merealisasikan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Parlemen gender akan lebih cepat mengetahui permasalahan keterbelakangan perempuan di daerah, bagaimana menggerakkan potensinya dan aspek lain yang lebih mempercepat penggunaan potensi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (privat citizen) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari ilustrasi diatas, partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai governance) dan juga politik secara luas. Sedangkan politik secara luas yaitu semua bentuk keterlibatan masyarakat untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi politik rakyat sebenarnya adalah tema sentral dari proses demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyarakat bisa berperan aktif.

Lebih lanjut Huntington dan Nelson (1994) menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan atau perilaku yakni:

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah bentuk partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.
2. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau sekelompok orang.
5. Tindak kekerasan (violence), sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda. Oleh karena itu kekerasan biasanya mencerminkan motivasi- motivasi yang lebih kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah atau merubah sistem politik (revolusi).

4. Gender sebagai Faktor Berpengaruh

Gender telah mendapatkan kajian yang luas dalam berbagai bidang, termasuk perannya dalam sektor politik. Secara teoritis gender dimasukkan juga sebagai faktor yang berpengaruh atas perilaku dan kinerja (Gibson, dkk., 1997). Dihubungkan dengan perilaku dan kinerja pada riset ini, karena masyarakat secara umum diasumsikan sebagai masyarakat yang rasional, bahwa keputusannya hanya akan mengambil yang mempunyai manfaat maksimal.

Robbins (2003), secara spesifik menegaskan bahwa tidak ada pengaruh gender dihubungkan dengan kinerja atau dengan kualitas kepuasan kerja. Gender menjadi faktor yang berpengaruh atas indikator kinerja, seperti tingkat keluar masuk atau mangkir dalam pekerjaan, jika ada variabel moderat.

Robbins (2003) menyatakan pada kasus tertentu, seperti di Amerika Utara yang menempatkan perempuan lebih banyak pada pengurusan keluarga akan mempunyai tingkat kemangkiran yang lebih tinggi, karena alasan pengurusan keluarga. Perempuan pekerja pada siklus keluarga tertentu akan lebih banyak mengambil kerja paruh waktu, karena lebih banyak mengurus keluarga. Hasil riset ini ditutup dengan pernyataan bahwa berjalan dengan waktu, dengan pemberian beban yang mungkin berimbang pada laki-laki dan perempuan dalam mengurus keluarga, maka aspek gender "perempuan" tidak akan menjadi penghambat dalam kerja, terutama pada masalah kemangkiran kerja.

Meihartono (2010) dalam penelitiannya, tidak ditemukan faktor gender sebagai faktor pembentuk perilaku kerja pamong belajar. Jenis kelamin (gender) dimasukkan sebagai input data, tetapi dalam proses kerja analisis statistik yang

digunakan, faktor tersebut mengalami pengeluaran (*excluded*) dari analisis lebih lanjut.

Aspek gender "perempuan" akan selalu menjadi masalah dalam berbagai aspek kehidupan produktif (ekonomi, sosial dan politik), selama memberikan beban yang lebih besar bagi perempuan dalam pengurusan aspek tertentu. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menganut nilai patriakal (Parawansa, 2005) diharapkan dalam perkembangannya dengan memberikan pembuktian bahwa nilai manfaat yang diberikan lebih tinggi dari aspek-aspek yang ditinggalkan, maka gender dalam kegiatan produktif tidak mendapatkan intensitas hambatan yang sama.

Semua gerak dalam kajian yang sifatnya modern mengarah pada pemberian kesempatan pada perempuan untuk ikut ambil bagian dengan porsi yang sama dengan laki-laki. Dalam era reformasi, dengan terapan otonomi daerah di Indonesia masyarakat lebih demokratis (*more democratis*), di samping *more welfare* (lebih sejahtera) dan rendah biaya (*less cost*) sebagai indikator kesuksesan strategi pembangunan daerah otonom (Wasistiono, 2003).

Terapan masyarakat yang lebih demokratis salah satunya adalah tidak terjadi diskriminasi dalam aspek politik atas alasan gender dan alasan lainnya. Fakta empiris yang ada di Indonesia, dilihat dari keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan, masih diperlukan kerja keras.

5. Non Diskriminasi "Gender" Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif, tetapi bukan dalam makna dieksploitasi sangat diperlukan, sehingga seluruh potensi yang ada dapat menghasilkan nilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah

merumuskan berbagai kebijakan, bahkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai acuan dalam merumuskan perundangan lainnya telah menegaskan bahwa seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan aspek lain, termasuk pekerjaan dan kehidupan yang layak. Konsep diskriminasi tidak ada satu pun yang muncul dari pendiri negara dan aktualisasi dalam perundangan.

Kajian ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Dengan demikian, jelas sebagai bagian dari kajian secara teoritis dan terapan dari administrasi publik. Administrasi publik, sesuai dengan konsep Hodgkinson (1978) dalam Nasirin dan Lionardo (2010) menyatakan administrasi publik selain sebagai bidang kajian intelektual atau suatu disiplin, juga sebagai aktivitas pengelola terhadap masalah kenegaraan serta bentuk aksi dari pemerintahan atau sarana mewujudkan tujuan pemerintah.

Kesetaraan gender merupakan media yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara, sehingga kajian ini tidak akan terpisah dari disiplin ilmu administrasi publik. Kesejahteraan masyarakat akan dapat tercipta, lebih cepat dalam perwujudan jika dapat mengelola tiga dimensi dengan baik, yaitu dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan dan dimensi politik (Muluk, 2009). Adanya konsep ini, maka pengelolaan gender dalam dimensi politik jelas mengerucut pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Terapan yang diharapkan dalam aspek gender adalah non diskriminasi atau kesetaraan. Syukrie (2003) memberikan makna kesetaraan sebagai persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil dalam segala bidang meskipun diakui ada perbedaan. Perbedaan yang tidak dibenarkan adalah:

1. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan berdasarkan gender dengan akibat perempuan dirugikan :

- Perempuan sebagai subordinasi laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat.
- Pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu. Peluang untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.

2. Perbedaan kondisi dan posisi perempuan terhadap laki-laki di mana perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang lemah. Konteks ini sejak awal terbentuk, karena adanya diskriminasi dalam budaya dan keluarga.

Ihromi (1995) dalam Syukrie (2003) menjelaskan lebih lanjut kesetaraan, yaitu prinsip persamaan substantif, prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara. Persamaan substantif dimaknai sebagai adanya persamaan laki-laki dan perempuan, tetapi karena ada fakta perbedaan kodrati, maka pihak pengguna atau pemerintah perlu menerapkan kebijakan tertentu agar permasalahan yang berhubungan dengan kodrat tersebut tidak terjadi atau tidak merugikan pihak perempuan.

Prinsip non diskriminasi lebih mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak lain berhubungan dengan kondisi khusus gender "perempuan", konteksnya sementara. Misalnya saat perempuan hamil, maka organisasi dapat menerapkan cuti hamil atau cuti melahirkan. Hal ini harus diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh organisasi, sebagai wujud dari prinsip non diskriminasi dalam organisasinya (Syukrie, 2003). Pemikiran pentingnya adalah

bagaimana yang bersangkutan, jika sebagai menteri atau presiden atau perdana menteri.

Prinsip terakhir dalam kesetaraan gender adalah prinsip kewajiban negara, mempunyai makna dalam upaya implementasi non diskriminasi, negara mempunyai kewajiban dalam melindungi warganya untuk beraktivitas dan menerima hasil kerja dan pembangunan dalam skala nasional. Negara mempunyai kewajiban dalam melindungi, termasuk melalui penerapan hukum positif dan dilakukan dengan langkah kerja yang proaktif (Syukrie, 2003).

Berhubungan dengan hal di atas pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk merealisasikannya. Dalam UUD 1945, secara spesifik pada pasal 27 menegaskan bahwa jaminan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga. Komitmen tersebut dapat juga dilihat dari ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women/CEDAW*) dalam UU No. 7 Tahun 1984. Komitmen ini masih memerlukan upaya yang tinggi dari pemerintah dan seluruh pihak, karena fakta diskriminasi dalam berbagai aspek pada perempuan masih terjadi (Parawansa, 2003).

Diskriminasi pada dasarnya sebagai tindakan yang disengaja atau telah mengakar dalam cara hidup "budaya" yang menyebabkan pihak perempuan dirugikan dalam berbagai aspek, baik sebagai pelaku ataupun sebagai pihak yang menikmati suatu aspek (Syukrie, 2003). Apabila proses yang berjalan bukan sebagai akibat kesengajaan untuk merugikan pihak tertentu, tetapi semata tidak dapat terlibat karena keterbatasan potensi, maka aspek tersebut tidak dapat dinyatakan diskriminasi.

6. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa gender "perempuan" mendapatkan perhatian dalam segala bidang agar dapat tergali seluruh potensi yang dimiliki, selanjutnya memberikan kontribusi dalam pencapaian kesejahteraan, baik secara langsung atau tidak langsung. Aspek gender dalam politik pada dasarnya tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi di Indonesia, jika dihubungkan dengan prinsip kewajiban negara, bahkan negara telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberikan kesetaraan dengan gender "laki-laki".

Pemerintah secara umum telah meletakkan upaya penyetaraan gender perempuan dan laki-laki dalam segala aspek, dalam aspek pembangunan mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Konteks tersebut diistilahkan dengan pengarusutamaan gender, bahkan diperkuat dengan pemberlakuan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah juga memberikan perhatian pada gender perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik, sehingga konteks kegiatan pembangunan perempuan dapat terlibat mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Ditegaskan demikian, karena dari aspek politik dapat ditentukan arah dari pelaksanaan pembangunan.

Prinsip kewajiban negara dan prinsip lainnya dari kesetaraan gender dalam aspek politik pada dasarnya terlaksana dengan baik. Fakta empiris menunjukkan Indonesia pernah mempunyai presiden perempuan, dengan demikian kesempatan yang ada melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sangat perlu dimanfaatkan.

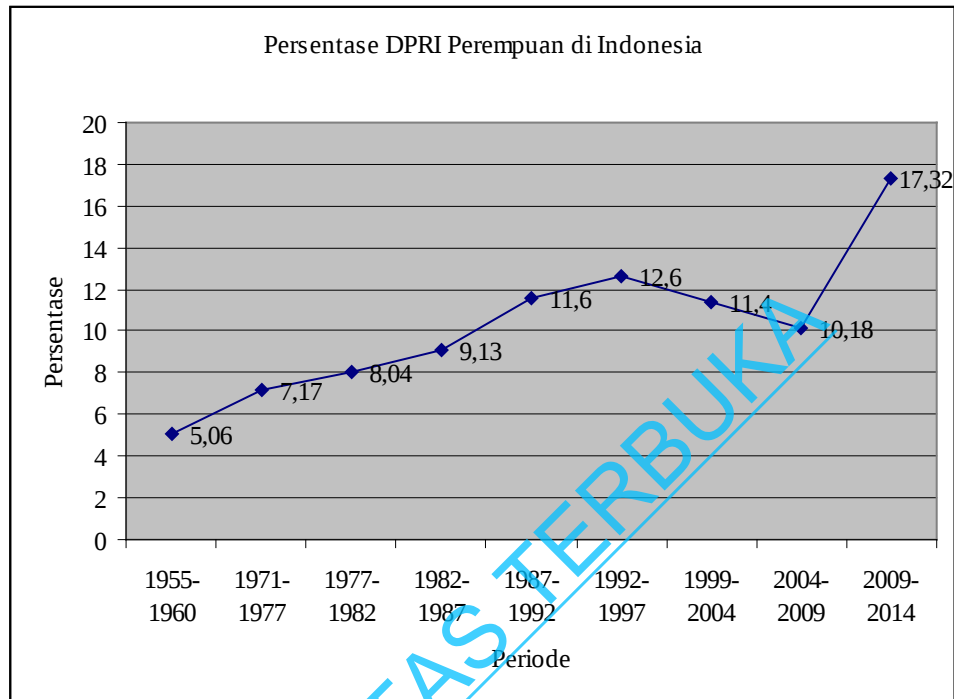
Penelitian ini mencoba menggali aspek-aspek yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan menjadi anggota DPR, tentu dengan memperkecil hambatan yang ada dan meningkatkan peluang yang ada. Konsep keterwakilan tersebut diawali dengan partisipasi perempuan di politik. Partisipasi dalam makna bahasan sesuai dengan arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) merupakan “hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta”. Makna lanjutan yang diberikan adalah bukan hanya sebagai pihak yang meramaikan, tetapi secara nyata berhasil dalam kegiatan tersebut dan menjadi anggota dewan guna dapat memperjuangkan hak-haknya di parlemen.

Penegasan masuknya perempuan di parlemen perlu diberikan dalam memaknai politik. Politik pada dasarnya bukan berakhir di parlemen, tetapi mempunyai makna yang luas terkait dengan kepentingan orang banyak. Tan dalam Winarni (1997) mendefinisikan politik sebagai konteks pengambilan keputusan yang terkait dengan kemampuan, kesempatan dan kekuasaan terkait dengan kehidupan orang banyak. Pekerjaan ini akan mempunyai arah yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaan dan kekuatan implementasinya, jika pihak yang terlibat sebagai anggota parlemen.

Dalam sejarah parlemen di Indonesia, dengan adanya UU No 12 Tahun 2003 ada peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam parlemen pusat. Diharapkan kondisi ini juga terjadi di parlemen daerah, baik yang muncul dari banyaknya partisipasi perempuan dan pemilih memberikan kepercayaan pada perempuan menjadi wakilnya dan selanjutnya memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.

Fakta empiris persentase jumlah DPRI perempuan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.2 Perkembangan DPRI Perempuan Periode 1955-2014



Sumber: UNDP (2010)

Dalam sejarah parlemen Indonesia, terjadi peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPRI. Penurunan hanya terjadi pada dua periode, yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009, tetapi masih di atas 10,00 persen. Pada periode 2009-2014 persentase keterwakilan perempuan sebesar 17,32 persen (secara kuantitas masih tergolong kurang karena berada pada kisaran tiga orang). Persentase tertinggi tersebut masih terjadi bias sebesar 12,68 persen dari kuota minimal yang disyaratkan oleh undang-undang.

Fakta empiris di atas menunjukkan beban berat dari negara dan para politisi perempuan untuk mewujudkannya, sehingga pembelajaran sejak dini pada

masyarakat dan bagi para politisi untuk lebih mengenali faktor-faktor yang mendukung keterwakilannya dalam setiap pemilihan umum.

Riset yang dilakukan UNDP (2010) mengidentifikasi hambatan partisipasi dan sekaligus keterwakilan perempuan dalam bidang politik, sebagai berikut :

1. Hambatan langsung;
 - Kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik
 - Kurangnya keterampilan dan pendidikan politik
 - Kurangnya pengetahuan akan sistem
 - Kurangnya minat perempuan terhadap politik
 - Kurangnya sumber daya finansial
 - Kurang percaya diri
 - Kurang mobilitas
 - Tanggung jawab keluarga
 - Kurangnya keaktifan di kader partai
 - Kurangnya dukungan partai politik
 - Persepsi yang menganggap politik kotor
2. Hambatan yang bersifat mendasar :
 - Budaya maskulin dan dominasi laki-laki
 - Agenda partai politik yang berorientasi pada laki-laki
 - Kurangnya demokrasi di partai politik
 - Komersialisasi politik
 - Sistem pemilihan
 - Nepotisme dan elitisme dalam partai politik
 - Kekerasan politis
 - Korupsi dalam politik
3. Hambatan struktural
 - Dikotomi diskursif publik privat
 - Patriarki publik dan privat
 - Perilaku sosial yang patriarki
 - Fundamentalisme keagamaan

Temuan di atas dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, setidaknya dijadikan pengarah dalam menemukan faktor penghambat keterwakilan perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Mataram. Kajian ini akan mengarahkan pada upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi dasar evaluasi pada Pilkada berikutnya, sehingga dapat berhasil duduk dalam parlemen. Implikasi yang diharapkan adalah bukan sebatas keterwakilan, tetapi bagaimana peran

politisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan budaya yang mengarah pada kebermanfaatan bagi kaum perempuan dan penggunaan secara maksimal potensi perempuan yang tersimpan (Saptarini, 2005).

B. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi faktor penghambat perempuan gagal menjadi anggota legislatif dan pola rancangan implementasi kebijakan yang diperkuat dari informasi perempuan yang berhasil duduk di legislatif Kota Mataram. Identifikasi faktor penghambat pada dasarnya sebagai upaya untuk meminimalkannya, sisi lain faktor yang mewujudkan keterwakilan diupayakan untuk diperkuat intensitasnya oleh para partisipan perempuan dalam Pilkada berikutnya di Kota Mataram.

Temuan UNDP (2010) yang terdiri atas hambatan langsung, hambatan yang mendasar dan hambatan struktural dijadikan sebagai tuntunan dalam mengidentifikasi faktor penghambat keterwakilan perempuan, tentu dengan upaya untuk melakukan penggalian faktor lain yang muncul dari tiga faktor penghambat tersebut. Adapun untuk anggota legislatif perempuan dilakukan penggalian informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan secara empiris yang menurutnya membawa pada keberhasilan. Perbaikan dari kegagalan dan belajar dari yang mampu terwakilkan diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi individu politisi perempuan, selanjutnya dapat diperkuat dengan kebijakan yang diterapkan oleh partai politik dan kebijakan pemerintah dalam merealisasikan posisi perempuan minimal sebanyak 30,00 persen di parlemen.

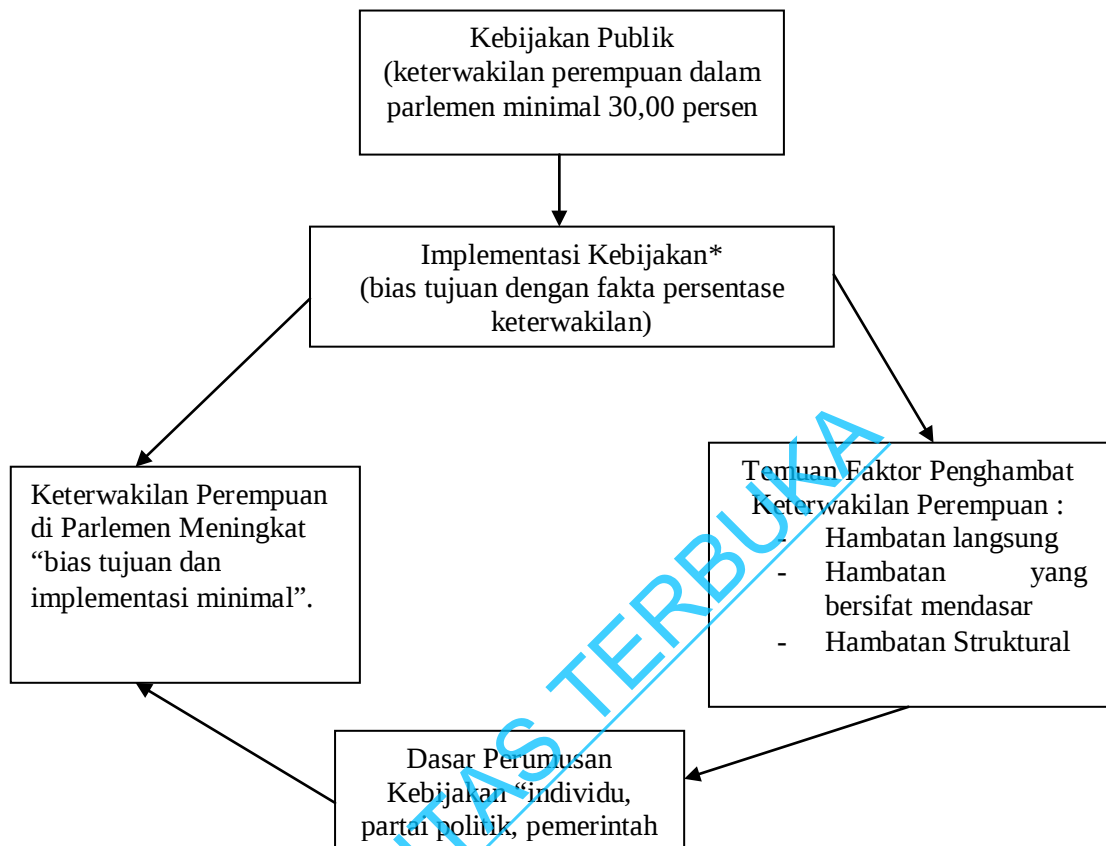
Desain munculnya penelitian ini pada dasarnya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi dari kebijakan

tersebut. Perencanaan tujuan berupa keterwakilan perempuan minimal sebesar 30,00 persen dalam parlemen, tetapi fakta di Kota Mataram hanya mencapai 8,57 persen. Untuk itu, perlu dilakukan penggalian informasi faktor penghambat keterwakilan para politisi perempuan serta berupaya untuk evaluasi kebijakan dan sekaligus implementasinya, sehingga bias antara rencana yang diwujudkan dengan fakta yang terjadi semakin kecil.

Dalam penelitian ini, analisis kebijakan dengan menggunakan model Sabatier dan Mazmanian (1983), dengan konsep berpikir pengelolaan atas aspek-aspek yang ditemukan (faktor penghambat keterwakilan perempuan di parlemen). Aspek lain yang digali adalah kebijakan yang dapat dirumuskan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, dengan mengambil kasus di Kota Mataram.

Uraian di atas dapat dijelaskan dalam kerangka berpikir berikut ini.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian



Keterangan * pola pikir dapat menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) "konteks pengelolaan variabel bebas, sebagai masukan bagi perumus kebijakan".

Inti dari penelitian ini adalah untuk menemukan formulasi yang dapat digunakan oleh individu politisi perempuan dalam keterwakilannya pada Pilkada 2014-2019, serta kebijakan yang dapat diterapkan oleh partai politik untuk keterwakilan politisinya serta kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat realisasi keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Formulasi di atas dirancang atas temuan faktor penghambat pada kondisi empiris politisi perempuan yang gagal menjadi legislatif di Kota Mataram dan realisasi implementasi yang diterapkan oleh politisi perempuan yang berhasil.

Temuan ini bukan sebatas mengidentifikasi hambatan, tetapi yang menjadi berarti adalah formulasi yang dapat dilakukan oleh aspek-aspek yang terlibat dalam praktek politik di Kota Mataram.

C. Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Perempuan dalam penelitian ini fokus pada para politisi perempuan yang berpartisipasi sebagai calon legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2009, baik yang berhasil duduk di legislatif atau menjadi anggota DPRD Kota Mataram ataupun yang gagal atau tidak berhasil menjadi anggota DPRD Kota Mataram.
2. Faktor penghambat keterwakilan merupakan faktor-faktor yang diidentifikasi oleh para calon legislatif DPRD Kota Mataram pada pemilu legislatif tahun 2009 yang menyebabkannya gagal sebagai anggota DPRD. Faktor tersebut dispesifikan atas faktor hambatan langsung, hambatan yang bersifat mendasar dan hambatan struktural.
 - a. Hambatan langsung berupa :
 - Kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik
 - Kurangnya keterampilan dan pendidikan politik
 - Kurangnya pengetahuan akan sistem
 - Kurangnya minat perempuan terhadap politik
 - Kurangnya sumber daya finansial
 - Kurang percaya diri
 - Kurang mobilitas
 - Tanggung jawab keluarga

- Kurangnya keaktifan di kader partai
- Kurangnya dukungan partai politik
- Persepsi yang menganggap politik kotor

b. Hambatan yang bersifat mendasar berupa :

- Budaya maskulin dan dominasi laki-laki
- Agenda partai politik yang berorientasi pada laki-laki
- Kurangnya demokrasi di partai politik
- Komersialisasi politik
- Sistem kepemiluan
- Nepotisme dan elitisme dalam partai politik
- Kekerasan politis
- Korupsi dalam politik

c. Hambatan struktural berupa :

- Dikotomi diskursif publik privat
- Patriarki publik dan privat
- Perilaku sosial yang patriarki
- Fundamentalisme keagamaan

3. Implementasi kebijakan merupakan langkah-langkah kerja aktual yang diterapkan oleh individu yang diduga sebagai faktor yang menstimulan pemilih mempercayakan suaranya pada calon perempuan yang ikut dalam kompetisi Pemilu Legislatif tahun 2009, termasuk juga konteks kerja aktual partai politik dan pemerintah.
4. Partisipasi perempuan mempunyai makna keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram pada Pemilu Legislatif tahun 2009.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sesuai dengan konsep kerja dalam penelitian ini, maka desain penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksploratif (Umar, 2008). Penelitian ini dirancang untuk menemukan faktor penghambat keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di Kota Mataram pada Pilkada 2009-2014. Penelitian ini tentu bersifat mendalam, dilakukan melalui penelusuran atas sumber informasi sedemikian rupa, yaitu pada perempuan yang berpartisipasi sebagai anggota DPRD Kota Mataram, baik yang tidak berhasil ataupun yang berhasil. Tentu dengan penelusuran informasi yang berbeda, kajian faktor penghambat pada perempuan yang gagal dan penggalian informasi bagaimana untuk dapat berhasil dilakukan pada perempuan yang berhasil sebagai anggota DPRD Kota Mataram periode 2009-2014.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh komponen yang ada dalam kajian penelitian, baik bersifat subyek ataupun obyek (Nazir, 2003). Dalam penelitian ini, sebagai populasinya adalah perempuan yang berpartisipasi sebagai calon legislatif Kota Mataram pada Pemilu Legislatif tahun 2009, baik yang mendapatkan keterwakilan (tiga orang) ataupun yang tidak terwakilkan, tetapi dipilih hanya 22 orang yang gagal menjadi anggota DPRD (setiap partai diambil sebanyak 2 orang pada daerah pemilihan Kota Mataram).

Informasi pelengkap juga diperoleh dari legislatif laki-laki, guna mengetahui perlakuannya terhadap isu atau program kerja yang dicanangkan oleh para legislatif perempuan, bersifat memberikan dukungan atau melemahkan isu dan program kerja tersebut. Konteks ini akan dapat jelas dilihat jika ada kesempatan mengikuti sidang, sehingga diharapkan dalam proses penelitian ada jadwal rapat kerja di DPRD Kota Mataram.

C. Instrumen Penelitian

Dimensi atau indikator dalam instrumen penelitian ini ada yang sifatnya telah ditentukan dan ada juga yang sifatnya masih terbuka sebagai wujud dari eksplorasi dalam riset ini. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri berperan dan berfungsi sebagai instrumen penelitian atau instrumen pengumpul data, dimana peneliti secara langsung hadir ke latar penelitian dan melakukan wawancara serta pencatatan terhadap data dan atau informasi di lapangan. Dengan demikian instrumen kualitatif adalah manusia. Seperti dikatakan Moleong (2001), bahwa ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dengan demikian, peneliti menjadi segalanya dalam proses penelitian.

Untuk tetap fokus pada tujuan penelitian, mengakses data secara komprehensif dan mendalam, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang semi terstruktur, pedoman observasi, angket dan format-format untuk data lapangan. Adapun instrumen penelitian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

Variabel	Variabel Laten	Indikator (Observed Variable)
1. Faktor Penghambat Keterwakilan		
.	1. Hambatan langsung	– Kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik – Kurangnya keterampilan dan pendidikan politik – Kurangnya pengetahuan akan sistem – Kurangnya minat perempuan terhadap politik – Kurangnya sumber daya finansial – Kurang percaya diri – Kurang mobilitas – Tanggung jawab keluarga – Kurangnya keaktifan di kader partai – Kurangnya dukungan partai politik – Persepsi yang menganggap politik kotor
.	2. Hambatan yang bersifat mendasar	– Budaya maskulin dan dominasi laki-laki – Agenda partai politik yang berorientasi pada laki-laki – Kurangnya demokrasi di partai politik – Komersialisasi politik – Sistem pemilihan – Nepotisme dan elitisme dalam partai politik – Kekerasan politis – Korupsi dalam politik
	3. Hambatan struktural	– Dikotomi diskursif publik privat – Patriarki publik dan privat – Perilaku sosial yang patriarki – Fundamentalisme keagamaan
2. Implementasi kebijakan		
		- Aktualisasi kerja politisi perempuan - Aktualisasi kerja partai politik - Aktualisasi kerja pemerintah

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di dua tempat terkait dengan proses untuk pengukuran variabel yang dibutuhkan, yaitu :

1. KPU Kota Mataram; organisasi ini dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi nama-nama calon legislatif perempuan setiap partai (ada wakil atau tidak secara aktual di DPRD Kota Mataram pada Pemilu Legislatif tahun 2009), terutama informasi penting untuk dapat menghubunginya dengan mudah. Apabila *contact personal* tidak diperoleh, setidaknya dapat diperoleh alamat partai peserta pemilu. Fokus pada domisili responden di Kota Mataram. Secara otomatis dilakukan wawancara atau pemberian angket di tempat tinggal masing-masing responden.
2. DPRD Kota Mataram; khusus untuk mendapatkan informasi dari tiga orang anggota DPRD perempuan. Khusus untuk responden ini dapat diperoleh dengan mudah, karena kegiatan aktual di kantor. Diharapkan juga mendapatkan informasi kerja perempuan yang terwakilkan di legislatif serta sikap kerja legislatif laki-laki atas isu dan program kerja yang dicanangkan oleh legislatif perempuan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data untuk tiga orang DPRD perempuan Kota Mataram dan angket untuk calon legislatif yang gagal pada Pemilu Legislatif tahun 2009 serta panduan observasi untuk mengkaji kegiatan aktual yang ada di DPRD Kota Mataram. Peneliti dapat menggunakan personal pengumpul data khususnya

pengumpulan data dengan angket, sedangkan dengan alat berupa kuesioner dilakukan secara mendalam oleh peneliti.

E. Metode Analisis Data

Desain penelitian dirancang dengan penelitian kualitatif, berarti generalisasi temuan faktor penghambat keterwakilan perempuan di legislatif Kota Mataram didasarkan atas informasi secara individu. Konteks ini dikenal dengan pengambilan kesimpulan dengan pendekatan induktif.

Peneliti akan melakukan rancangan kerja untuk mengidentifikasi faktor penghambat atas dasar kelompoknya melalui informasi yang diberikan oleh responden. Jawaban responden akan didesain sedemikian rupa dengan menampilkan temuan apa adanya, termasuk temuan atas langkah-langkah yang dijalankan oleh legislatif perempuan (anggota DPRD perempuan) di DPRD Kota Mataram.

Kerja yang dijalankan hanya memberikan informasi atas temuan, melakukan generalisasi dan mengambil makna dari temuan tersebut. Penelitian kualitatif tidak didesain dengan rancangan yang rumit atau kompleks, tetapi justru penelitian tersebut muncul sebagai penelitian yang bersifat natural (Moleong, 2000). Apapun pernyataan yang diberikan responden terkait dengan variabel yang akan digali merupakan informasi untuk mendesain generalisasi faktor penghambat, termasuk juga untuk memberikan generalisasi strategi legislatif yang berhasil.

Proses pengamatan dan pencatatan hanya dilakukan pada kerja yang dijalankan oleh DPRD perempuan di Kota Mataram, termasuk kerja yang dijalankan oleh DPRD laki-laki atas isu dan program kerja yang diajukan oleh

DPRD perempuan. Temuan ini penting, untuk melihat peluang yang diberikan pada perempuan dalam merancang kerja meningkatkan potensi perempuan atau perempuan itu sendiri mempunyai perhatian atas makna awal dari keberadaannya dalam parlemen.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

1. Fungsi DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat pada pemerintahan pusat dan daerah (daerah otonom) mempunyai peranan penting, dalam segala aspek baik ekonomi, sosial, budaya, terlebih politik. Aspek penting dalam pengelolaan daerah yang tertuang dalam APBD seluruhnya dapat terealisasi jika mendapatkan persetujuan dari DPRD. Hal ini memberikan persyaratan mutlak bahwa anggota DPRD yang terhimpun dalam fraksi-fraksi mutlak mempunyai kemampuan analisis yang mendalam atas aspek ekonomi, keuangan daerah dan lainnya dengan mengemban amanat rakyat secara umum.

Peran penting DPRD Kota Mataram dapat dilihat dari fungsi yang diemban, sebagai berikut:

1. Membentuk Perda bersama Walikota
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya
5. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (www.dpr.co.id, download, Desember 2011).

Fungsi di atas secara umum diiyakan oleh anggota DPRD N.E, dengan menyatakan bahwa:

“...Benar tugas dan fungsi tersebut sebagai tugas DPRD Kota Mataram juga, ...bahwa peran kita bersama eksekutif dengan porsi kerja masing-masing atas pengelolaan pemerintahan dalam berbagai aspek, ekonomi, sosial dengan tujuan akhir penciptaan kesejahteraan rakyat. Anggota dewan bukan sebatas menyetujui dan menolak tetapi perlu kajian yang mendalam, karena masyarakat dapat memberikan respon atas apa yang kami lakukan...”(wawancara, tanggal 4 Nopember 2011).

Konsep *cross check* di atas sengaja dilakukan pada anggota DPRD Kota Mataram yang perempuan, sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian atas DPRD perempuan. Konsep *cross check* tersebut diupayakan untuk dilakukan dengan anggota DPRD perempuan lainnya, tetapi relatif sulit untuk ditemukan akhirnya dilakukan *cross check* dengan anggota DPRD laki-laki:

“...Berdasarkan fungsi DPRD tidak ada pengecualian tugas atau fungsi DPRD dilihat dari jenis kelamin. Benar seluruhnya sebagai tugas kami, di mana akhirnya kemampuan yang menjadi tolak ukur seluruhnya...”(wawancara dengan Mj, tanggal 15 Nopember 2011).

Uraian sekilas ditampilkan hanya untuk memberikan informasi mengenai beban tugas yang diemban oleh anggota DPRD dalam kurun waktu jabatannya selama 1-5 tahun. Sebagai gambaran anggota DPRD Kota Mataram berikut diberikan jabaran identitas responden.

2. Profil DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

2.1. Pendidikan Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

DPRD Kota Mataram terdiri atas 35 orang, dengan jumlah perempuan sebanyak 3 orang (8,57 persen), dengan perincian asal partai DPRD perempuan dari partai PDIP, Demokrat dan PKPB (Dokumentasi dari BPS Kota Mataram, tahun 2011). Secara spesifik dilihat dari tingkat pendidikannya diinformasikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Pendidikan Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	12	34,29
2	S1	21	60,00
3	S2	2	5,71
Total		35	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mataram, September 2011

Tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Mataram dapat dinyatakan masih tergolong rendah, karena 34,29 persen berpendidikan SMA atau sederajat. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para politisi tersebut tentu tidak direlevankan secara langsung dengan kualitasnya dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disebabkan ada banyak anggota DPRD Kota Mataram yang menempuh pendidikan informal, terbukti dengan adanya status sebagai tokoh agama (tuan guru, Tgh).

Dalam rangka obyeknya hasil kajian ini, berikut dilakukan wawancara dengan anggota masyarakat mengenai adanya anggota DPRD Kota Mataram yang berpendidikan SMA atau sederajat. Wawancara dengan M.N (profesi swasta, berkecimpung dalam dunia pendidikan/ perguruan tinggi swasta) berpendapat sebagai berikut:

“Pendidikan formal memberikan bantuan dalam kemampuan analisis, sementara pekerjaan anggota dewan umumnya adalah kemampuan melakukan analisis, bukan sebatas berbicara tanpa dasar kajian yang jelas....

Ada indikasi ...kebanyakan anggota dewan hanya mampu bicara saja, tetapi kurang ada makna atau inti kajian...bagaimana menerima atau menolak usulan pemerintah harus atas dasar kajian mendasar, baik dari aspek ekonomi dan sosial...”(wawancara tanggal 16 Nopember 2011)

Sekilas pendapat di atas menyatakan bahwa pendidikan formal sangat diperlukan, karena dalam pekerjaan sebagai anggota dewan diperlukan kemampuan analisis yang mendalam. Pembelajaran secara informal akan dapat memberikan tambahan wawasan, bukan kemampuan dasar dalam menganalisis suatu permasalahan. Aspek penting adalah kesesuaian dengan bidang yang akan diemban dengan keahlian yang dimiliki, sementara keahlian dihubungkan dengan pendidikan formal.

Hal terakhir di atas ditegaskan oleh Noq, sebagai berikut:

“Kebetulan pendidikan saya spesialis apoteker...saya bisa menjadi apoteker jika saya mengambil spesialis, bukan hanya tamat pendidikan farmasi. Artinya apa...setiap pekerjaan mempunyai pendidikan formal untuk digembleng menjadi ahli..bagaimana dengan DPR yang tamatan SMA...saya khawatir atas kemampuannya...Masyarakat perlu memperhatikan pendidikan DPRD yang dipilihnya...bukan sekedar memilih hanya iming-iming janji yang tidak jelas...” (wawancara tanggal 16 September 2011).

Hasil wawancara di atas yang ditampilkan, terdapat banyak informan dari masyarakat umum yang memberikan informasi bahwa pendidikan sangat diperlukan untuk menjadi anggota dewan. Dalam rapat atau sejenis dengan pihak eksternal (eksekutif ataupun yudikatif) dapat saja bertemu dengan para ahli, sehingga dapat terjadi kajian yang berjalan, bukan sebaliknya dewan hanya mendengar dan hanya menggunakan power yang dimiliki dalam dewan untuk

menyatakan setuju atau tidak atas usulan kerja, koordinasi atau pengawasan yang sedang dijalankannya.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas dibutuhkan kecerdasan masyarakat, karena secara otomatis jika masyarakat cerdas dan mengerti pentingnya peranan anggota dewan yang dipilih, maka secara otomatis akan memilih anggota dewan pada setiap pilkada ataupun pemilu atas dasar kompetensi calon anggota dewan. Hal ini ditegaskan oleh Zn (praktisi pendidikan perguruan tinggi di Kota Mataram), berikut pernyataannya:

“Pada dasarnya kondisi atau gambaran dewan yang ada sekarang, baik dipusat ataupun di Kota Mataram adalah gambaran kondisi masyarakat. Begitu juga dengan presiden dan lainnya yang sifatnya hasil pemilihan rakyat..jadi jika ingin mendapatkan wakil yang kompeten, cerdas, berani dalam mengambil keputusan, membela yang benar dan lainnya .. ya ..cerdaskan dulu masyarakat” (wawancara tanggal 16 September 2011).

Informasi mengenai pendidikan anggota dewan secara spesifik diberikan perhatian pada pendidikan khususnya anggota dewan perempuan. Dari tiga orang DPRD Kota Mataram yang berjenis kelamin perempuan satu di antaranya berpendidikan SMA dan dua lainnya berpendidikan sarjana strata satu (dengan spesifikasi pendidikan guru dan sarjana sosial).

2.2. Umur Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

Informasi penting lainnya dari identitas anggota DPRD Kota Mataram adalah umurnya, dapat memberikan gambaran tingkat produktivitas dan pada sisi lain pengalaman dalam karier politik. Informasinya pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Umur Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	20-29	1	2,86
2.	30-39	6	17,14
3.	40-49	22	62,86
4.	50-59	5	14,29
5.	60-69	1	2,86
Total		35	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mataram, September 2011

DPRD Kota Mataram secara umum berumur pada interval 40-49 tahun sebanyak 62,86 persen. Tertua umur 60 tahun dan termuda umur 27 tahun, jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang tertua berpendidikan sarjana strata satu, sedangkan yang termuda berpendidikan SMA.

Data di atas perlu mendapatkan analisis yang lebih mendalam. Dilakukan penelusuran, bahwa anggota termuda berjenis kelamin perempuan berasal dari Partai Demokrat, sedangkan yang tertua berjenis kelamin laki-laki berasal dari Partai Golkar. Berdasarkan pengamatan sekilas, berarti anggota dari Partai Demokrat tersebut masih miskin pengalaman, bahkan dengan pendidikan yang dapat dikategorikan rendah untuk wakil rakyat. Dalam konteks ini perlu dilakukan pembelajaran pada individu bersangkutan mengenai upaya atau manajemen atau pengelolaan yang diterapkan, sehingga dapat sukses dalam karier politik di umur yang sangat belia dan pendidikan yang rendah.

Penelusuran juga dilakukan pada anggota DPRD senior, guna mendapatkan informasi mengenai pengelolaan yang dilakukan, khususnya bagi pihak perempuan untuk berkompetisi di dalam bidang politik. Konteks ini sangat penting guna dapat memenangkan para calon legislatif perempuan, sehingga pada uraian ini akan diberikan pada temuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terwakilinya perempuan di DPRD Kota Mataram.

2.3. Agama Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

Informasi penting lain adalah agama para anggota DPRD Kota Mataram, tetapi bukan dalam konteks diversity “ras”, tetapi sekedar memberikan data pelengkap. Anggota DPRD Kota Mataram umumnya beragama Islam, sebanyak 29 orang atau 82,86 persen dan beragama Hindu sebanyak 6 orang atau 17,14 persen (Sekretariat DPRD Kota Mataram, September 2011).

Temuan di atas perlu dihubungkan persentase agama penduduk Kota Mataram. Apabila dihubungkan dengan persentase agama yang dipeluk oleh masyarakat Kota Mataram, dapat saja dinyatakan bahwa persentase keterwakilan anggota DPRD dengan pemeluk agama di Kota Mataram sangat berkaitan. Informasi persentase penduduk Kota Mataram pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Agama pada Tahun 2009

No.	Agama	Penduduk (Orang)	Persentase (%)
1.	Islam	308.707	82,21
2.	Protestan	3.204	0,85
3.	Khatolik	4.059	1,08
4.	Hindu	56.072	14,93
5.	Budha	3.464	0,92
Total		375.506	100,00

Sumber: Kota Mataram Dalam Angka, 2010

Jumlah penduduk Kota Mataram yang beragama Islam sebanyak 82,21 persen, sedangkan yang beragama Hindu sebanyak 14,93 persen. Adapun jumlah anggota DPRD sebanyak 82,86 persen beragama Islam dan 17,14 persen beragama Hindu. Dapat dinyatakan akumulasi dari luar agama Islam terhimpun dalam anggota yang beragama Hindu. Tentu kajian ini sebatas melakukan keterkaitan data secara statistik, untuk lebih jelas perlu dilakukan kajian yang mendalam.

3. Deskripsi Partai Politik dan Fraksi di DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014

Anggota DPRD Kota Mataram periode 2009-2014 dinyatakan sebagai hasil pemilihan umum yang berjalan dengan baik, dalam makna demokrasi diterapkan sesuai harapan. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur NTB (Tgh. Zainul Majdi) dengan pernyataannya “Pemilukada di Kota Mataram merupakan perhelatan demokrasi yang paling kondusif...ini merupakan contoh bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Mataram dapat dijadikan contoh dalam menjalankan demokrasi, baik dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan wali kota.” Disampaikan pada saat memberikan sambutan saat pelantikan walikota Mataram terpilih (www.kotamatararam.co.id; Humas dan Protokol Kota Mataram, download bulan September 2011).

Secara khusus, dengan tidak adanya demonstrasi akibat kekecewaan masyarakat, berarti pemilihan legislatif berjalan dengan baik. Artinya para anggota DPRD Kota Mataram yang terpilih menggunakan tata cara mendapatkan suara atau pilihan masyarakat dengan cara yang baik atau dibenarkan dalam perundangan.

Anggota DPRD Kota Mataram terpilih dapat dinyatakan sebagai individu yang dapat memenangkan pilihan masyarakat. Pada pemilu legislatif tahun 2009 terdapat 44 partai peserta, di mana Kota Mataram terbagi dalam tiga wilayah pemilihan, yaitu Dapil 1 (Ampenan dan Sekarbela), Dapil 2 (Cakranegara dan Sandubaya) dan Dapil 3 (Mataram dan Selaparang). Total jumlah pemilih sebanyak 32.827 suara, dengan perolehan suara terbanyak Partai Demokrat sebanyak 11.795 suara (35,93 persen) dan perolehan suara terkecil oleh partai PKDI sebanyak 93 suara (0,28 persen).

Partai yang mempunyai keterwakilan di DPRD Kota Mataram terdiri atas sebelas (11) partai. Informasi jumlah suara dan jumlah keterwakilannya di DPRD Kota Mataram sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Suara dan Keterwakilan Partai di DPRD Kota Mataram

No.	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Keterwakilan		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golkar	2.870	4	-	4
2	PDI-P	2.486	3	1	4
3	PPP	1.271	3	-	3
4	PAN	813	3	-	3
5	Demokrat	11.795	6	1	7
6	PKS	2.671	3	-	3
7	Hanura	1.013	3	-	3
8	Gerindra	1.466	3	-	3
9	PBR	393	2	-	2
10	PKPB	759	1	1	2
11	PPI	559	1	-	1
Total		26.096	32	3	35

Sumber: Kota Mataram dalam Angka, 2011

Keterwakilan partai dalam anggota DPRD Kota Mataram secara spesifik dapat dilihat pada perolehan suara setiap Dapil. Adapun informasi pada Tabel 4.4 hanya memberikan gambaran perolehan suara secara umum (angka tercatat pada Partai PBR dapat saja keliru, karena setelah pengecekan pada perolehan suara setiap Dapil tidak ada yang dominan, setiap Dapil diperoleh suara secara merata).

Konteks ini, hal yang perlu ditekankan adalah validitas data sekunder, termasuk kesesuaian data pada setiap lembaga. Hal ini sangat penting, karena dapat menjadi bias penafsiran oleh masyarakat yang dapat berujung pada komplain atau sejenisnya. Ditegaskan demikian, karena perolehan suara yang lebih besar dari PBR (393 suara), masih dimiliki oleh PKB dengan suara sebanyak 661 (Kota Mataram dalam Angka, 2011), termasuk juga perolehan suara PPRN (508 suara).

Dilakukan *cross check* dengan catatan yang diberikan oleh sekretariat DPRD Kota Mataram, ternyata data tersebut sama dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Mataram. Temuan ini perlu dicermati, sebagai revisi atau penjelasan pada masyarakat secara lugas mengenai dasar perolehan suara calon legislatif yang menyebabkannya terhantar menduduki kursi DPRD. Hal ini perlu ditegaskan, karena para calon terpilih dan tidak terpilih juga memberikan informasi yang bias untuk jumlah perolehan suara yang menyebabkannya terpilih menjadi anggota dewan (dilakukan kajian pada pembahasan temuan penelitian).

4. Bias Informasi Perolehan Suara di Pilkada-DPRD Kota Mataram Tahun 2009

Dalam rangka menyikapi aspek di atas perlu ditampilkan hasil wawancara dengan salah satu caleg yang tidak berhasil menjadi anggota DPRD periode 2009-2014, sementara berdasarkan informasi yang diperoleh yang bersangkutan memperoleh suara sebanyak 552 suara. D.K (umur 30) tahun berasal dari Partai Demokrat. Hasil wawancara secara khusus menyikapi masalah perolehan suara, yang bersangkutan menyatakan:

“Saya menjadi bingung...letak permasalahan di mana, sebagai orang yang telah berkorban waktu dan tenaga serta biaya... secara nyata mendapatkan perolehan suara 552, saya tidak mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPRD Kota Mataram, termasuk untuk dapat masuk pada pertengahan periode dengan adanya sistem pergantian...saya mengira saya jauh dari kemungkinan kesempatan tersebut, karena semua asik mengurus diri dan mempertahankan posisi...saya tidak tahu yang mana salah, penyelenggara, partai atau saya sendiri yang tidak berani melakukan penuntutan atas hak saya...”(wawancara tanggal 18 September 2011).

Secara praktek, caleg di atas harus dapat duduk menjadi anggota DPRD, karena adanya sistem penambahan suara dari caleg lain yang jauh dari target yang ada, termasuk kesempatan untuk pergantian tengah periode. Partai harus

memberikan contoh praktek demokrasi yang benar, tetapi yang utama adalah penyelenggara, yaitu KPU dan Panwaslu atau lembaga lain yang memberikan perhatian atas pelaksanaan demokrasi.

Kondisi di atas juga terjadi pada PAN, total suara sebanyak 813 suara dengan keterwakilan tiga orang di DPRD Kota Mataram. Perlu sikapi dan tindaklanjuti kasus yang dimiliki Dra. Smi (44 tahun, pendidikan S1), sebagai berikut:

“Perolehan 245 suara, berarti 30,14 persen dari total suara yang diperoleh PAN. Faktanya saya tidak lolos, mungkin ada perhitungan yang sebenarnya...ada ketentuan dari KPU, dari partai dan sejenisnya yang tidak berdasarkan subyektivitas atau bentuk lain yang menyebabkan orang lain untung dan sisi lain ada yang mengalami kerugian. Logika berpikir matematika saya adalah persentase perolehan suara saya pasti lebih banyak dari tiga orang yang lolos sebagai anggota DPRD Kota Mataram, dengan asumsi tidak ada kesalahan pencatatan atau akumulasi suara dari PAN tersebut. ...

Sepengetahuan saya untuk dapat lolos menjadi anggota DPRD Kota Mataram harus memperoleh suara sebanyak 650...”(wawancara tanggal 28 September 2011),

Transparansi keterwakilan caleg di DPRD Kota Mataram harus menjadi yang utama, sebab jika ada caleg yang merasa dirugikan, sementara tidak mendapatkan informasi yang sesuai dapat saja menyebabkan terjadinya demonstrasi dan sejenisnya. Dapat dinyatakan pada dua kasus di atas hanya sebagai contoh saja, kemungkinan besar banyak kasus lain. Kasus di atas tidak menjadi permasalahan, karena yang bersangkutan tidak berkeinginan menempuh cara-cara tertentu untuk memaksakan kehendaknya dan lebih bersifat mengalah.

Transparansi menjadi yang utama, karena ditemukan dalam penelitian ini beragam informasi mengenai jumlah suara yang dapat menghantarkan keterwakilan para caleg menjadi anggota DPRD Kota Mataram. Hnti, umur 28

tahun dari Partai Hanura (wawancara tanggal 18 September 2011) menyatakan untuk lolos menjadi anggota dewan harus memperoleh suara sebanyak 3.000. Total suara dari sebelas partai yang lolos sebanyak 26.096 atau pada kisaran seperdelapan dari 3.000 suara. Hal ini dapat menyebabkan dari awal kerja dapat menyebabkan caleg perempuan, terutama pemula yang mendapatkan informasi yang bias sudah tidak bersemangat, hanya sebagai pelengkap semata.

5. Posisi Keterwakilan Parpol dalam DPRD Kota Mataram

Uraian di atas terkait dengan informasi sebelum para anggota dewan menduduki kursi yang diperebutkan, selanjutnya perlu diinformasikan kondisi lembaga terkait. Jumlah partai pemenang pemilu sebanyak 11 partai, dalam DPRD Kota Mataram terhimpun dalam sembilan fraksi. Delapan fraksi bersifat utuh dengan nama masing-masing partai, kecuali Partai Gerindra mendapatkan koalisi dari Partai PPI sebanyak satu orang. Fraksi gabungan diberi nama partai Peduli Reformasi yang beranggotakan dari PBR dan PKPB masing-masing sebanyak dua orang, sehingga fraksi tersebut berjumlah empat orang (Sekretariat DPRD Kota Mataram, Nopember 2011).

Muncul sebagai pimpinan dari Partai Demokrat dan wakil ketua masing-masing dari partai Golkar dan dari partai PDIP. Informasi penting lainnya adalah secara kelembagaan terdiri atas komisi I (bidang tugas pemerintahan, ketertiban, kependudukan, penerangan, hukum, kepegawaian, perizinan, sospol, organisasi masyarakat dan pertanahan), Komisi II (bidang tugas pendidikan, kesehatan, keuangan dan perbankan, pariwisata, tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, perdagangan dan kesejahteraan rakyat), Komisi III (bidang tugas pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan,

pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup dan transmigrasi) serta terdiri atas Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Musyawarah.

Pembagian Komisi dalam kelembagaan DPRD disesuaikan dengan jumlah SKPD, lembaga dan badan yang ada di pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dipastikan potensi keahlian dalam bidang terkait yang dimiliki oleh anggota DPRD atau dengan cara lain memiliki tim ahli yang membantu dalam pelaksanaan kerjanya mewakili kepentingan masyarakat.

Tim ahli bukan sebagai penyampai, tetapi pemberi kajian pada anggota DPRD terkait, jadi tetap diperlukan kemampuan menyerap informasi dan menyampaikan kajian pada setiap kesempatan pada masyarakat atau pihak eksekutif. Kemampuan pada bidang masing-masing di komisi dipastikan, karena tidak mungkin meminta tim ahli untuk membuat pertanyaan, kajian pada saat rapat atau dengar pendapat.

Para anggota DPRD di Kota Mataram, dengan banyaknya bidang tugas dari setiap komisi, maka sangat tidak mungkin bagi anggota DPRD untuk menguasai semua bidang dengan baik. DPRD tidak mungkin menguasai pertanahan dari aspek hukum, satu sisi juga pada aspek pemerintahan, sosial, penerangan, kepegawaian dan lainnya. Tugas pengawasan membutuhkan pengetahuan atas bidang yang menjadi subyek dengan baik, sehingga tidak salah dalam memberikan hasil evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah. Akan menjadi sangat naif, pendidikan hanya setara SMA, tanpa pengalaman yang luas dalam bidang pekerjaan akan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik.

Uraian di atas dilakukan agar dalam kajian selanjutnya, terutama DPRD perempuan dapat diketahui posisinya dalam kelembagaan DPRD. Hal tersebut penting sebagai pembuktian eksistensi perannya sebagai perempuan yang memperjuangkan hak-hak dan pengembangan perempuan.

B. Temuan Faktor-faktor yang Menghambat Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Mataram.

Perempuan sebagai anggota dewan pada prinsipnya mempunyai peluang yang sangat tinggi, karena sebagian besar pemilih berjenis kelamin perempuan. Aspek penting yang memberikan dukungan adalah praktek demokrasi secara umum telah berjalan dengan kondusif. Artinya perempuan dapat menggunakan potensi diri yang dimiliki untuk memenangkan persepsi dan pilihan masyarakat secara umum.

Fakta yang terjadi, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram masih tergolong rendah, sehingga perlu ditemukan faktor-faktor penghambatnya. Informasi difokuskan pada calon DPRD Kota Mataram pada pemilu pada legislatif tahun 2009 yang belum berhasil mendapatkan suara yang sesuai dengan kuota minimal. Pada prinsipnya, dilihat dari data di KPU bahwa yang mendaftar sebagai calon legislatif cukup banyak. Dari 3 Daerah pemilihan dapat ditemukan jumlah calon legislatif yang lolos verifikasi dan masuk sebagai daftar calon tetap berjumlah 235 orang dengan rincian sebagai berikut: Dapil 1 daftar calon tetap berjumlah 86 orang, Dapil 2 daftar calon tetap berjumlah 66 orang, dan Dapil 3 daftar calon tetap berjumlah 85 orang. (Sekretariat KPU Kota Mataram, September 2011).

Dilihat dari jumlah calon anggota Legislatif yang mendaftar pada Pemilukada 2009 yang berjumlah 235 orang ini, bila dikaitkan dengan partisipasi perempuan dalam politik dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan di Kota Mataram ini cukup tinggi. Namun, keterwakilan mereka di DPRD Kota Mataram tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah perempuan yang mendaftar sebagai calon Legislatif. Hal ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam, karena data tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Apakah ini disebabkan karena UU No. 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30,00 persen.” Sehingga dengan begitu setiap Partai yang mengikuti Pemilu berusaha untuk memenuhi kuota 30,00 persen itu tanpa melalui seleksi dan melihat kompetensi perempuan yang mencalonkan diri tersebut. Sepertinya pemenuhan kuota 30,00 persen itu terkesan asal saja yang penting ada tanpa memperhatikan Sumber Daya perempuan itu sendiri.

Untuk lebih mendalami tentang permasalahan di atas Wawancara dilakukan dengan D.I., S.Sos, calon legislatif dari Partai PPI. Isian dan wawancara terbuka dilakukan untuk penggalian faktor-faktor penghambat dan sekaligus perencanaan kegiatan yang dilakukan untuk pemilu legislatif periode berikutnya :

“Individu bersangkutan dipastikan akan berupaya untuk ikut kembali pada pemilu legislatif tahun 2015, masih dari partai yang sama (PPI). Pada umur 30 tahun sekarang ini, berarti yang bersangkutan telah terjun di bidang politik sejak berumur 23 tahun (sejak tahun 1994). Kegagalan dalam pemilu legislatif tahun 2009 tidak menyebabkan surut atau tidak aktif dalam partai.

Penting untuk diinformasikan pada pemilu legislatif 2009 untuk DPRD Kota Mataram yang bersangkutan mengalokasikan dana sebesar Rp.100.000.000. Nilai yang sangat besar untuk hanya

perolehan suara sebanyak 6 suara dari target 675 suara. Nomer urut di partai pada nomer 8.

Uraian di atas dapat dinyatakan sebagai informasi tambahan, berikut informasi yang diberikan pada aspek-aspek yang diindikasikan sebagai faktor penghambat dalam keterwakilan perempuan di legislatif.

....yang bersangkutan menyatakan bahwa sistem politik yang sedang berlangsung di Indonesia atau secara khusus di Kota Mataram tidak menjadi penghambat, bahkan yang bersangkutan menyatakan bahwa aspek tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara.

Pada aspek kurang keterampilan dan pendidikan politik dinyatakan oleh bersangkutan sangat diperlukan oleh perempuan, baik melalui pendidikan formal atau dengan cara terjun langsung menjadi anggota partai politik...ditentukan lebih lanjut diperlukan keterlibatan jauh dari awal.

...pada aspek sistem diberikan jawaban bahwa perempuan perlu belajar tentang sistem terkini...sistem pemilu dan sistem lain yang berlangsung dalam pemilu legislatif di daerah.

...
Perempuan dapat saja mengalami pengurangan minat atau sejenisnya atas bidang politik praktis, atau tidak secara total dalam memberikan potensinya. ... dinyatakan dapat saja terjadi, karena perempuan lebih fokus pada kepentingan keluarga.

Keuangan juga muncul sebagai faktor penghambat, karena pada zaman sekarang seluruhnya bermuara pada kondisi finansial.

Kurang kepercayaan diri juga menjadi penentu; hanya dengan kepercayaan diri seorang calon legislatif akan dapat memberikan keyakinan pada pemilihnya.

Mobilitas yang tinggi juga sangat diperlukan; sementara perempuan relatif terhambat mobilitasnya, karena konteks agama dan perannya sebagai penanggung jawab keluarga. Mobilitas juga diperlukan untuk menambah pengalaman dalam bidang politik.

Perempuan lebih banyak mencurahkan pikiran dan tenaga untuk keluarga. Kondisi ini juga berdampak pada keaktifan pada partai. Ditambahkan bahwa calon legislatif tidak dapat hanya mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran pada saat akan dilakukan pemilihan, tetapi partai dan personal harus aktif dalam menelaah kepentingan masyarakat. Masyarakat memerlukan peran nyata terlebih dahulu, sehingga ada keyakinan bahwa kepentingannya dibela setelah menjadi anggota dewan, bukan sebaliknya hanya menghantarkan yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan sebagai anggota DPRD. Intinya masyarakat perlu mengenal kita terlebih dahulu.

Aspek penting yang menjadi perhatian para anggota dewan ataupun calon adalah bagaimana menumbuhkan citra positif pada masyarakat mengenai keberadaan anggota dewan. Politik harus

dipersepsikan positif, sehingga uang bukan menjadi perhatian dalam menciptakan keterwakilan, tetapi potensi dan perhatian untuk membela hak masyarakat”(wawancara dilakukan dalam dua kali pertemuan, 10-11 September 2011).

Berbagai uraian temuan di atas, dilakukan dengan pengisian angket dan wawancara secara langsung serta bersifat terbuka dengan informan. Hanya satu aspek yang tidak dinyatakan sebagai faktor penghambat, yaitu sistem politik. Aspek lain yang diidentifikasi secara teori bersifat menghambat, dalam arti bahwa berbagai kondisi tersebut harus diarahkan positif dan perhatian untuk pengelolaan lebih lanjut. Misalnya bagaimana antara suami dan isteri dalam membagi peran di keluarga, sehingga mobilitas dan keaktifan di partai politik jauh sebelum pemilihan akan dilakukan.

Wawancara dengan Dra Smni (44 tahun, S1, Partai PAN). Peneliti memberikan kuesioner untuk diisi pada dua hari sebelumnya, selanjutnya dilakukan janji tatap muka pada tanggal tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Saya mencoba melakukan telaah atas pertanyaan yang ibu rumuskan. Sebelumnya saya informasikan bahwa saya di PAN baru lima tahun, tetapi selama ini saya aktif dalam kerja sosial... seringkali kita mempunyai pemikiran ada yang salah mengenai sistem, ada yang salah mengenai tatanan sosial kita dan lainnya yang menjadi faktor penghambat berperan sertanya perempuan, termasuk untuk aspek perpolitikan dalam bentuk lolos atau terpilih sebagai anggota dewan....

Dari zaman perjuangan ada perempuan yang berperan aktif...jadi terkait dengan potensi diri dan keinginan....

Pada zaman ini tidak ada sistem atau aspek apapun namanya yang melarang perempuan berkarier dalam berbagai aspek...buktinya ada perempuan yang telah sukses menjadi menteri dengan kapabilitas yang handal, bahkan dalam lingkup internasional...apalagi hanya sebatas menjadi anggota dewan.

Buat orang menyenangkan keberadaan anda, buktikan anda mampu memberikan perhatian.....

Berbicara kesalahan sistem...saya nyatakan seluruhnya telah baik, tetapi kalau personal yang ada dalam sistem itu pantas dipertanyakan...

Seluruhnya bermuara pada diri kita... mari sama-sama kita berikan pendidikan yang berkualitas pada putri kita, maka secara otomatis akan berkarier pada sektor apapun tidak ada masalah

.....

Ada yang bilang agama...khusus agama Islam itu hanya orang yang berpikiran sempit dan hendak merusak identitas Islam. Anda perang saja boleh...apalagi hanya menjadi DPRD...tekanan Islam adalah jalankan dengan cara yang sesuai dengan pedoman...tetapi kalau begini kondisi di Indonesia..korupsi yang telah merajalela...maka kita takut sebagai orang Islam akan tercemar juga.

Inti pembicaraan adalah tingkatan potensi perempuan secara merata, tetapi dengan cara tingkat kesejahteraan, buat pendidikan yang murah dan berkualitas..maka para perempuan akan banyak yang sekolah dan akan banyak mengambil karier dalam segala aspek...termasuk menjadi DPRD. Bahkan saya akan menyatakan jangan kalau berpendidikan rendah, nanti menandatangani sesuatu yang tidak ditahu konsepnya dengan benar....bahaya nasibnya” (wawancara tanggal 28 September 2011).

Jawaban di atas, sekilas tidak sistematis dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti. Akan tetapi, seperti dinyatakan bahwa responden telah melakukan pembelajaran atas berbagai pertanyaan yang ada, sehingga diberikan kunci jawaban bahwa seluruhnya bermuara pada potensi perempuan itu sendiri dan peran pemerintah untuk meningkatkan potensi perempuan. Informasi penting yang diperoleh adalah pada kondisi pendidikan tidak optimal, jika hanya sebatas tamat SMA dan minim pengalaman, sebaiknya tidak menjadi anggota DPRD, karena kemampuan analisis dan lainnya masih perlu dipertanyakan serta ditakutkan akan salah dalam melakukan tindakan yang bermuara pada pelanggaran hukum dan sejenisnya.

Informasi berikut dari D.I, S.Sos., terkait dengan faktor penghambat yang sifatnya mendasar sebagai penghambat keterwakilan perempuan menjadi anggota DPRD di Kota Mataram.

Aspek maskulin dan feminis tidak muncul sebagai penghambat, begitu juga dengan agenda partai yang lebih beorientasi pada laki-laki tidak terjadi. Partai politik justru mempraktikkan demokrasi

yang tidak baik, karena masih sifatnya sebagai pendulang uang. Implikasi lanjutannya adalah komersialisasi politik serta sistem pemilu dianggap sebagai pembuat kacau. Nepotisme dan elitisme masih mengakar dalam praktek demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Mataram.

Kekerasan politik menjadi faktor yang menghambat, tentu bukan dalam konteks fisik, bahkan dengan cara yang halus lebih menyakitkan. Korupsi dalam partai juga diindikasikan terjadi, bahkan mengakar pada anggota terpilih untuk dapat balik modal.

Informasi mengenai penghambat yang sifatnya struktural tidak dijawab oleh responden terkait, sebagai indikasi lelah, tidak tertarik atau sejenisnya. Ketertarikan pada akar permasalahan para calon legislatif perempuan atau yang terjadi dalam politik praktis harus membiasakan diri untuk berpikir lelah dan selalu tertarik atas suatu permasalahan, terlebih permasalahan masyarakat yang sifatnya mengakar dan membutuhkan perhatian lebih besar.

M.S. (28 tahun, S1, PKS), telah cukup lama aktif dalam partai, mulai dari partisipan sampai terlibat dalam politik praktis. Keterlibatan diri dalam pencalonan melalui PKS sangat diharapkan, tentu dengan keputusan partai. Berikut informasi yang diberikan pada isian angket dan komunikasi secara terbuka :

“Pilihan sebagai politisi masih terus berlanjut, dinyatakan amanat dalam membela kepentingan umat...Pada saat pemilu legislatif di Kota Mataram berada pada nomor urut empat (4)...mempunyai keyakinan tanpa money politik akan dapat berhasil...dana yang dialokasikan sebanyak 3 juta.

Pada pertanyaan realisasi suara yang diperoleh beliau tidak berkenan memberikan jawaban...”(wawancara tanggal 18 Nopember 2011).

Uraian di atas sekilas mengenai identitas diri dan deskripsi kilasan kariernya dalam politik. Berikut diberikan informasi mengenai persepsi atau pandangan beliau atas hambatan langsung atas ketidakterwakilkannya perempuan sebagai anggota DPRD Kota Mataram.

“M.S... memberikan jawaban bahwa sistem politik yang sedang terjadi di Indonesia secara umum dan secara lokal di Kota Mataram tidak muncul sebagai faktor penghambat. Alasan yang diberikan adalah bahwa para perempuan telah banyak berkecimpung dalam dunia politik, sehingga tahu mengelola keberadaannya di ranah politik.

Perempuan pada umumnya telah mempunyai keterampilan dan pendidikan politik, ditambahkan juga bahwa perempuan telah mempunyai kemampuan melakukan pembelajaran secara mandiri untuk mengasah potensi, memperluas jaringan. Aspek yang penting dalam hal ini adalah kemauan dan upaya untuk melibatkan diri dalam forum.

Kurangnya pengetahuan atas sistem dinyatakan menjadi faktor penghambat. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya teman perempuan yang lolos sebagai legislator.

Perempuan juga dinyatakan kurang berminat dalam dunia politik. Para perempuan dinyatakan lebih nyaman dengan peran rumah tangga. Dalam praktek perpolitikan di Indonesia dengan indikasi sebagai anggota dewan tidak lepas dari kebutuhan finansial. Perempuan yang mau menjadi caleg tidak semuanya berasal dari pengusaha, sehingga kekurangan pada aspek finansial.

Kepercayaan diri perempuan dapat dinyatakan telah muncul. Para perempuan telah banyak mempunyai kemampuan dalam melakukan orasi ditengah forum, sehingga layak menjalankan peran sebagai legislator di parlemen.

Kurang mobilitas bagi perempuan menjadi penghambat penting, kegagalan perempuan menjadi legislator, karena mobilitas yang rendah. Hal tersebut disebabkan peran gandanya sebagai pengurus rumah tangga.

Berhubungan dengan keaktifan di partai tidak menjadi penghambat, partai (PKS) memberikan dukungan atas segala aktivitas yang dijalankan oleh partai. Hal ini memberikan informasi lebih lanjut bahwa partai (PKS) memberikan dukungan yang penuh atas anggotanya (perempuan) untuk dapat menjadi legislator.

Perempuan berada di politik praktis tidak identik dengan politik yang kotor. Informasi singkat diberikan adalah politik sebagai bagian hidup, dapat saja menjadi kotor, jika orang yang menjalankannya kotor. Hal ini sangat tergantung pada nilai yang dipegang oleh masing-masing individu yang menjadikan politik sebagai bagian dari hidupnya, bahkan untuk menjalankan peran beramal shaleh” (wawancara tanggal 18 Nopember 2011).

Uraian di atas terkait dengan hambatan yang bersifat langsung. Berikut diinformasikan penilaian M.S., terkait dengan hambatan yang sifatnya mendasar.

“Budaya maskulin tidak menjadi dominasi pihak laki-laki dalam partai politik. Perempuan disegala bidang telah mampu berkarya

dan berperan...tidak kalah dengan kaum laki-laki. Adapun dalam praktek masih menjadikan laki-laki sebagai orientasi utama muncul sebagai penghambat. Perempuan dijadikan sebagai pendamping dari pihak laki-laki. Adapun mengenai demokrasi di partai politik telah terjadi dengan baik. Pihak perempuan diberikan kesempatan maksimal untuk memberdayakan diri.

Komersialisasi tidak terjadi pada partai yang bersangkutan, sehingga tidak muncul sebagai faktor penghambat. Diinformasikan lebih lanjut bahwa anggota tidak membayar partai, tapi partai yang memberikan fasilitas. Sistem pemilu muncul sebagai faktor penghambat, setidaknya hal tersebut diinformasikan walaupun tanpa memberikan alasan dan kajian, seperti jawaban lainnya.

Adapun nepotisme dalam partai tidak terjadi, karena partai yang membesarkan individu, bukan sebaliknya. Kekerasan politik khususnya pada perempuan tidak terjadi. Hal penting adalah sebagai individu menjalankan peran sesuai dengan aturan dan kaedah yang berlaku, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Korupsi bukan partai PKS, dasarnya adalah anti korupsi, dimulai dari diri dan struktur partai” (wawancara tanggal 18 Nopember 2011).

Uraian di atas untuk faktor penghambat yang sifatnya mendasar atau melekat dalam diri dan partai yang sifatnya mengakar. Adapun faktor penghambat yang sifatnya struktural akan digambarkan sebagai berikut:

M.S...menyatakan bahwa tidak terjadi dikotomi publik dan private. Perempuan dapat memposisikan dirinya secara terbuka pada ranah publik dan privat. Informasi yang diberikan berhubungan dengan perilaku sosial yang patriarki ternyata diakui sebagai faktor penghambat. Dinyatakan bahwa masyarakat masih meragukan perempuan dalam berpolitik. Agama tidak dinyatakan sebagai faktor penghambat. Islam adalah agama yang universal, tidak hanya memperhatikan ibadah ritual semata, tetapi semua aktivitas dan profesi yang dijalankan dengan jujur dan keikhlasan.

Informasi yang diberikan, baik melalui jawaban angket ataupun wawancara terbuka cukup banyak diberikan oleh caleg asal PKS ini. Harapan terakhir yang disampaikan pada penulis adalah apakah anda menulis untuk kepentingan praktek atau sebatas akademik, mohon realisasi pilihan anda pada kaum perempuan untuk pemilu 2015.

Jawaban dan permintaan diplomatis dari caleg tersebut memberikan gambaran kemampuan dan potensi diri perempuan tidak diragukan, termasuk perannya dalam menjalankan aktivitas politik praktis tidak bersifat insidental. Berikut informasi yang diberikan oleh caleg perempuan lain, yaitu Kh (31 tahun, S1, Golkar). Informasi atas pertanyaan umum yang diberikan sebagai berikut (wawancara dilakukan tanggal 21 Nopember 2011):

Keikutsertaannya dalam politik praktek yang telah berlangsung 10 tahun (di tahun 2009), ternyata akan diakhiri. Hal ini dilihat dari ketidakmauannya untuk ikut dalam pemilu legislatif tahun 2015. Individu bersangkutan tidak pindah partai dan tidak lagi aktif di partai politik (Golkar). Pada saat pemilu 2009 yang bersangkutan berada pada nomor urut 5 besar, dinyatakan dirinya mendapatkan suara sebanyak 2.800 suara dan suara yang harus dicapai sebanyak 4.000 suara.

Dilakukan *cross check* kembali pada KPU Kota Mataram mengenai yang bersangkutan ternyata benar untuk caleg DPRD Kota Mataram. Informasi perolehan suara dan suara yang akan menghantarkan menjadi caleg tidak relevan. Konteks informasi tersebut akan mendapatkan analisis secara khusus, terlebih jika banyak informasi yang sejenis. Berikut informasi persepsi yang dibangun atas faktor penghambat yang bersifat langsung atas kegagalan caleg perempuan menjadi legislator di parlemen (DPRD Kota Mataram).

Kh.,SP memberikan informasi atas pertanyaan kepercayaan perempuan pada sistem politik diberikan jawaban ya ...dengan alasan bahwa masyarakat menganggap derajat laki-laki lebih tinggi. ...informasi lebih lanjut yang diberikan adalah bahwa perempuan tidak membutuhkan keterampilan dan pendidikan politik. Hal yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun kedekatan emosional dengan wajib pilih. Pengetahuan atas sistem juga tidak muncul sebagai penghambat, karena sistem yang ada sekarang telah bersifat terbuka, tetapi sistem ini masih belum mengangkat derajat perempuan.

Perempuan di Kota Mataram masih enggan dalam berpolitik. Adapun aspek finansial dinyatakan tidak memberikan jaminan bahwa caleg akan lolos ke parlemen. Perempuan secara umum

masih menganggap laki-laki lebih unggul, begitu juga dengan mobilitasnya masih tergolong rendah. Perempuan yang akan memilih melakukan kegiatan politik praktek harus membedakan tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab berpolitik. Hal yang perlu dilakukan adalah pengaturan waktu saja dengan baik, sehingga keluarga juga tidak dikesampingkan. Perlu diperhatikan kapan menjadi ibu rumah tangga dan kapan menjadi wakil rakyat. Laki-laki juga demikian, tidak seluruh waktunya digunakan untuk satu peran, bahkan perannya sangat banyak. Misalnya sebagai penguasa, kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai wakil rakyat (legislator).

Dinyatakan juga bahwa keaktifan di kader tidak menjadi penentu menjadi legislator. Ditegaskan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan di kader dengan keterwakilan sebagai legislator.

Partai secara umum telah memberikan dukungan. Partai telah memberikan dukungan logistik dan emosional agar para calonnya dapat lolos ke parlemen. Persepsi politik kotor tidak lagi relevan, demikian informasi yang diberikan. Politik justru memunculkan individu untuk selalu berbesar diri dalam menerima kekalahan atau kemenangan dari setiap usaha yang dijalankan.

Informasi yang diberikan oleh informan di atas ada yang sifatnya politik praktek, bukan semata membawa penelitian ini lurus untuk menyatakan bahwa hanya faktor terkait sebagai faktor penghambat. Informasi tersebut adalah bagaimana para caleg membuat dirinya dekat secara emosional dengan warga daerah pemilihan. Informasi selanjutnya adalah persepsi yang diberikan atas faktor penghambat yang sifatnya mendasar.

Maskulinisme dipersepsikan sebagai faktor penghambat. Dinyatakan juga bahwa banyak orang yang masih menganggap bahwa laki-laki adalah imam bagi perempuan. Partai politik juga masih menjadikan laki-laki sebagai prioritas. Dinyatakan bahwa persepsi undang-undang yang menyatakan keterwakilan perempuan 30,00 persen belum relevan. Dana menjadi faktor pendukung, semakin besar partai semakin besar dana yang dibutuhkan. Sistem pemilu sudah dinyatakan baik, tetapi dengan permohonan agar gender menjadi prioritas. Kekerasan politik tidak terjadi....

Aspek penting lain yang ditanyakan adalah kegagalan perempuan sebagai legislator sebagai dampak adanya korupsi dalam politik. Jawaban yang diberikan adalah pertanyaan tersebut tidak dimengerti. Akan tetapi melalui penelusuran secara wawancara

langsung diberikan penjelasan bahwa ada kejadian pembelian suara dan sejenis, yang bersangkutan menjawab tidak ada.

Identifikasi faktor penghambat berikutnya adalah penghambat struktural.

Informasi dari Kh, SP, sebagai berikut:

Dikotomi diskursif publik privat muncul sebagai faktor penghambat kemenangan perempuan menjadi legislator. Patriarki publik dan privat juga dinyatakan sebagai faktor penyebab kegagalan, menurutnya karena masih ada pemisahan yang mendasar antara public dan private dari segi social, gender, dan interaksi. Begitu juga dengan patriarki dalam perilaku sosial dan juga dalam konteks agama dikatakan sebagai penghambat perempuan terjun ke dunia politik karena menurutnya laki-laki lebih dominan sedangkan perempuan sebagai sub ordinat. Agama juga seperti itu karena agama dijadikan sebagai ideology dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik.

Informasi yang diberikan oleh Kh., SP memberikan temuan bahwa seluruh faktor penghambat yang sifatnya struktural yang diidentifikasi secara teori juga terjadi pada kegagalan perempuan menjadi legislator di Kota Mataram, khususnya menuju DPRD Kota Mataram.

Partisipasi, dalam konteks keikutsertaan atau minat untuk menjadi legislator di Kota Mataram (menuju parlemen DPRD Kota Mataram) bagi kaum perempuan dapat dinyatakan cukup besar. Pernyataan ini setidaknya dari keinginan pemuda "Rusniyati" (27 tahun, SLTA, Partai Kedaulatan) untuk ikut berkecimpung dalam kegiatan politik praktis. Terlibat dalam partai politik selama satu tahun telah memberanikan diri untuk ikut andil dalam kompetisi menjadi legislator di Kota Mataram, bahkan kegagalan pada pemilu 2009 tidak menyebabkannya untuk mengundurkan diri dari kompetisi tersebut pada pemilu pada tahun 2015.

Semangat untuk mengabdikan diri dan berkarier dalam politik praktek dengan tujuan keterwakilan dirinya di DPRD Kota Mataram perlu mendapatkan

apresiasi. Pada Pemilu 2009 yang bersangkutan tidak bersedia memberikan informasi jumlah dana yang dialokasikan, termasuk juga nomor urut dan jumlah suara yang mampu diperoleh. Berikut informasi yang diberikan berhubungan dengan hambatan yang bersifat langsung (wawancara tanggal 23 Nopember 2011):

“Perempuan secara umum dinyatakan masih kurang percaya atas sistem politik yang diterapkan, sehingga mengurangi minatnya atas politik praktek. Untuk mengatasi aspek ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Kegagalan dirinya sebagai legislator, disebabkan kurangnya keterampilan dan kemampuan dalam berpolitik dengan pernyataan “kami masih pemula”. Sistem juga muncul sebagai faktor penghambat...untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi sistem pemilu dari penyelenggara, yaitu KPU.

Singkat pernyataan yang diberikan pada saat dipertanyakan kurangnya minat perempuan pada politik, yaitu kurangnya minat disebabkan rendahnya SDM dan SDF. SDF dimaknai sebagai sumber daya finansial. Secara otomatis yang bersangkutan menyatakan kesetujuannya atas aspek keterbatasan finansial sebagai penyebab terjadinya kegagalan perempuan menjadi legislator.

Jawaban yang diberikan tidak secara langsung ya atau tidak atas suatu jawaban, tetapi dengan memberikan pernyataan atas kondisi yang dialaminya....terkait dengan kepercayaan diri perempuan dinyatakan, untuk itu saya terjun partai politik sejak dini agar berlatih dalam memunculkan kepercayaan diri kedepannya.

Mobilitas jelas berhubungan dengan finansial, sementara perempuan terbatas finansialnya.

Sebagai perempuan yang belum menikah dinyatakan bahwa tidak dapat memberikan jawaban atas adanya peran rumah tangga dari perempuan, karena belum dialaminya.

Singkat kata yang diberikan atas kegagalan dirinya adalah partai baru dan orang baru atau pemula dalam partai politik”.

Pernyataan di atas memberikan titik berat pernyataan pada keterbatasan kemampuan, kondisi SDM, finansial, partai baru dan pemula pada dirinya menjadi faktor penghambat atau pembentuk kegagalannya sebagai legislator. Adapun informasi yang diberikan atas faktor penghambat yang sifatnya mendasar, sebagai berikut:

“Budaya maskulin tidak hanya dihubungkan atas laki-laki dan perempuan dalam makna gender oleh yang bersangkutan. Dominasi

oleh kaum laki-laki semata-mata disebabkan oleh SDM laki-laki yang lebih unggul....jadi ditegaskan berbicara hal ini tingkatan dulu SDM perempuan.

Orientasi laki-laki pada partai politik tidak dijawab langsung, tetapi menyatakan bahwa yang diperlukan adalah agenda perundangan yang dapat meningkatkan SDM perempuan....bukan masalah 30,00 persennya.

Dihubungkan dengan pertanyaan maskulin dan feminisme, jawabannya selalu dihubungkan dengan rendahnya SDM perempuan atau laki-laki lebih unggul.

Khusus untuk demokrasi di partai, dikaitkan dengan eksternal antar partai, di mana dominasi dilakukan oleh partai besar dan kelompok elit.

Dihubungkan dengan kekerasan dalam panwaslu diberikan komentar, karena rendahnya peran Panwaslu serta lembaga yang menindaklanjuti.

Permasalahan ini dinyatakan bukan hanya di partai, tapi rendahnya transparansi dimulai dari penyelenggara, bagaimana tidak pada para peserta....lembaga yang menjadi anutan saja tidak jelas”.

Faktor penghambat lain yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah faktor penghambat struktural. Jawaban hanya diberikan pada aspek peran agama, ditegaskan bahwa tidak ada hambatan yang bersumber dari agama, tetapi fokus pada jawaban tidak ada kaitan antara agama dengan partai, karena agama apapun dapat memilih partai apapun yang dianggap dapat menyalurkan aspirasinya.

Informan berikutnya dari Hj St (36 tahun, Diploma, PBR) wawancara dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2012. Individu terkait akan berupaya untuk eksis dalam kegiatan politik praktis, terbukti dengan keinginannya yang kuat untuk kembali sebagai calon legislatif DPRD Kota Mataram pada tahun 2015.

Ibu Hj St akan kembali berkompetisi melalui partai yang sama (PBR), tetapi pada pemilu legislatif tahun 2009 tidak diketahui informasi suara yang harus dipenuhi atau sebagai target, begitu juga dengan realisasi suara yang diperolehnya. Informasi ini memberikan fakta pengelolaan diri, relatif kurang. Dinyatakan demikian, tidak ada gambaran capaian empiris atas apa yang telah diusahakan

untuk dijadikan bahan evaluasi dalam rangka lolosnya yang bersangkutan dalam pemilu legislatif DPRD Kota Mataram. Evaluasi yang dimaksud atas banyak aspek, termasuk aspek keuangan (pada pemilu 2009 dialokasikan dana sebesar Rp 2.000.000).

Berikut informasi atas faktor penghambat yang dirasakan oleh Hj. St. dalam pemilu legislatif tahun 2009 yang menyebabkannya gagal lolos ke gedung parlemen (DPRD Kota Mataram).

Informasi yang diberikan oleh responden relatif singkat, hanya memberikan jawaban ya dan tidak, penting atau tidak penting. Faktor kepercayaan perempuan terhadap sistem politik tergolong sebagai faktor penghambat, dinyatakan bahwa secara umum perempuan tidak menyukai politik. Dinyatakan bahwa keterampilan dan pendidikan politik tergolong penting, di mana aspek ini tidak dimiliki oleh perempuan.

Kurangnya pengetahuan akan sistem berdampak pada kurangnya pengetahuan atas faktor apa yang menghambat dirinya dalam kemenangan menjadi legislatif. Kondisi tersebut diperburuk dengan banyaknya alokasi waktu mengurus keluarga.

Kondisi finansial yang dimiliki oleh perempuan relatif kurang, sehingga menjadi penghambat lolosnya yang bersangkutan menjadi DPRD Kota Mataram. Dinyatakan lebih lanjut dibutuhkan dana lebih...

Percaya diri penting, sementara fakta yang dirasakan yang bersangkutan mempunyai kepercayaan diri yang kurang.

Mobilitas penting....sementara perempuan atau dirinya kurang mobilitas. Secara individu...yang bersangkutan menyatakan keluarga mutlak penting, jadi muncul sebagai penghambat atas pilihan karier.

Keaktifan di partai mutlak, begitu juga dengan partai besar untuk dapat lolos menjadi legislatif. Politik yang kotor dihubungkan dengan budaya, politik kotor sebagai penghambat...

Adapun hambatan secara mendasar dinyatakan bahwa perempuan identik dengan kelemahan dan politik identik dengan laki-laki...dinyatakan juga bahwa demokrasi di partai belum terjadi, karena akan lebih fokus pada individu yang berduit.

Persepsi yang bersangkutan atas politik adalah uang/korupsi, nepotisme, elitisme menjadi gambaran partai politik...korupsi di partai sangat jelas.

Pada hambatan struktural...publik lebih percaya pada laki-laki, terjadi benturan antara publik dan privat...serta dinyatakan agama melarang perempuan menjadi pemimpin.

Temuan di atas memberikan keragaman informasi, walaupun pada dasarnya masih pada inti yang sama, bahwa berbagai faktor yang diungkapkan secara teori sebagai faktor penghambat secara langsung, secara mendasar dan secara struktural diakui menjadi penghambat dalam kariernya sebagai politisi di Kota Mataram (menjadikan dirinya sebagai anggota DPRD Kota Mataram).

Dalam penelitian ini diupayakan akan memberikan analisis dari setiap pernyataan yang diberikan oleh responden, termasuk pada aspek yang tidak dipertanyakan sebagai penghambat (pada sub bab khusus). Hal ini mengacu pada biasanya informasi yang diperoleh atas suara yang dibutuhkan untuk lolos sebagai anggota legislatif di tingkat kota (DPRD Kota Mataram).

F.E.F.R (30 tahun, SMA, PBR, wawancara tanggal 29 Nopember 2011) memberikan informasi bahwa suara yang harus dipenuhi untuk lolos menjadi anggota DPRD Kota Mataram sebanyak ± 3.500 suara, sementara suara yang diperoleh hanya 37 suara. Posisi nomer urutnya dari partai pada posisi kelima (5), dengan pengalaman di partai saat pemilu tahun 2009 baru satu tahun. Individu bersangkutan mempunyai keyakinan bahwa money politic akan menentukannya lolos sebagai anggota dewan. Pada sisi lain yang bersangkutan tidak akan tampil lagi pada pemilu tahun 2015.

Uraian di atas berupa informasi umum mengenai posisi diri informan dalam pemilu tahun 2009 dan keberlanjutan kariernya dalam politik praktis. Berikut informasi yang diberikan atas faktor penghambat gagalnya yang bersangkutan lolos sebagai anggota DPRD Kota Mataram Tahun 2009:

Rendahnya kepercayaan perempuan atas sistem politik menjadi penghambat, dengan intensitas yang sedang. Peran keterampilan dan pendidikan politik sangat tinggi bagi perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu, fakta yang ada perempuan calon legislatif di Kota Mataram mempunyai keterampilan yang rendah...

Persepsi yang sangat tinggi diberikan atas aspek keuangan, rendahnya pengetahuan atas sistem dan rendahnya minat juga menjadi penghambat keterwakilan perempuan di legislatif.

Perempuan yang terjun di partai politik mempunyai hambatan yang tergolong sangat tinggi pada aspek mobilitas, sementara intensitas untuk kepercayaan diri tergolong sedang. Aspek keluarga justru menjadi pendukung, karena pada dasarnya keluarga telah mengetahui implikasi dari setiap pilihan anggota keluarga.

Keaktifan di partai tidak menjadi masalah, karena di lapangan yang dilihat oleh masyarakat adalah figur yang terkait, bukan partainya.

Dukungan partai diperlukan dalam memberikan fasilitas dan sejenisnya, bukan sebaliknya kontribusi dari anggota.

Masyarakat secara umum telah mempunyai pengetahuan mengenai politik, karena politik tidak identik dengan kecurangan atau sejenisnya (politik kotor).

Informasi yang diberikan untuk faktor penghambat keterwakilan perempuan menjadi legislator di parlemen (DPRD Kota Mataram) yang sifatnya mendasar dan struktural sebagai berikut:

Seluruh aspek yang dijadikan sebagai pengukur hambatan yang sifatnya mendasar dan struktural, kecuali aspek agama sifatnya menjadi penghambat atau terjadi sebagai penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram. Orientasi partai politik untuk laki-laki, budaya maskulin dan kurangnya demokrasi menjadi penghambat yang intensitasnya tinggi. Komersialisasi politik, sistem pemilu dan nepotisme serta elitisme dalam partai politik masih terjadi dengan intensitas yang tinggi. Korupsi dan nepotisme menjadi ciri dalam partai politik.

Pencerdasan dan upaya untuk selalu bekerja dengan obyektif serta jauh dari penyimpangan seperti korupsi dan nepotisme ternyata telah mengakar dalam kehidupan di Indonesia, termasuk pada partai politik yang diharapkan untuk memerangi penyakit tersebut. Konteks ini hanya menegaskan pernyataan yang diberikan informan di atas.

Informan berikut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), N.N. (32 tahun, SLTA). Dalam menjalankan pencalonan dirinya sebagai legislator diakui tidak mengeluarkan dana, sementara pada pemilu yang akan datang berupaya untuk terlibat kembali. Berada pada nomer urut enam dengan perolehan suara 70 (diberikan informasi oleh yang bersangkutan, bahwa untuk dapat lolos menjadi legislator DPRD Kota Mataram harus mengantongi suara sebanyak 1.500 suara).

Wawancara dengan N.N., dilakukan pada tanggal 2 Desember 2011, berikut informasi yang diberikan atas faktor penghambat keterwakilannya di DPRD Kota Mataram periode 2009-2014.

Hasil wawancara secara terbuka diberikan informasi bahwa masyarakat dalam menyikapi pemilu legislatif sekarang ini tidak butuh janji, tetapi bukti sesaat (alokasi atau pemberian oleh caleg). Pembinaan para caleg perempuan sangat diperlukan serta dukungan dana dalam melakukan sosialisasi dan sejenisnya (bukti sesaat). Kondisi ini terjadi, karena para caleg yang lolos menjadi DPRD tidak pernah kembali lagi pada pemilihnya... masyarakat kecewa.

Kepercayaan atas sistem politik tidak dianggap sebagai faktor penghambat, justru perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan politik praktis.

Perempuan umum tidak berminat dengan partai politik, karena harus bersaing dengan individu dari partai sendiri dan partai lain yang telah mempunyai pengalaman tinggi dan mempunyai dukungan dana yang besar.

Kepercayaan dan pemikiran yang diberikan dalam politik praktis adalah kepemilikan dana atau sumber daya finansial yang sangat memadai. Masyarakat banyak yang miskin, sehingga pemikiran hanya bagaimana dapat memperoleh imbalan sesaat, siapa yang memberikan dia yang dipilih.

Mobilitas menjadi syarat kunci kesuksesan menjadi legislator, butuh alat dan dukungan finansial. Pada masalah kepercayaan diri, maka perlu diberikan pengalaman dan wawasan berpolitik.

Keluarga menjadi pendukung, bukan penghambat tergantung bagaimana kesepakatan dengan anggota keluarga. Apabila diizinkan, secara otomatis menjadi pendukung, tetapi jika tidak diizinkan akan menjadi penghambat.

Keaktifan di partai politik hanya berimplikasi pada penambahan wawasan. Partai politik sendiri perlu memberikan dukungan bagi anggotanya, fasilitas dan sejenisnya. Fakta yang ada selama ini tidak demikian...

Figur menjadi sangat penting, dana juga, sehingga kotor atau tidaknya politik bagaimana menggunakan figur dan dana yang dimiliki dengan cara yang legal.

Budaya maskulin dinyatakan tidak ada kaitannya dengan keterwakilan perempuan di partai politik, tetapi semata-mata figur caleg, wawasan dan mobilisasinya tinggi.

Orientasi partai politik terhadap laki-laki tidak menjadi penghambat, tetapi seluruhnya murni bagaimana masing-masing caleg mempersiapkan diri, baik dari kemampuan diri, pengalaman, dana dan sebagainya. Mobilisasi, sosialisasi butuh dana, tidak mungkin tanpa adanya dana.

Demokrasi di partai politik tidak menjadi masalah....begitu juga dengan komersialisasi tidak menjadi penghambat, tetapi bagaimana caleg memainkan politik yang jitu dan dapat mengambil hati pemilih.

Sistem pemilu tidak memberikan pengaruh, tinggal bagaimana para caleg melakukan penyesuaian diri....bagaimana mungkin kita tentang.

Era reformasi belum berhasil menuntaskan nepotisme dan korupsi...bagaimana kita sebagai caleg akan berjuang untuk memerdekakan diri...saya menganggap hal ini menjadi penghambat untuk benar-benar bisa dengan rasional kita menjalankan langkah untuk lolos ke parlemen...

Kekerasan dalam politik untuk perempuan tidak terjadi....tetapi money politic yang dahsyat...

Partai politik sendiri belum bersih dari korupsi dan nepotisme...jadi masih muncul sebagai faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam parlemen...kembali saya katakan bahwa dana menjadi penting, bagaimana dana dikelola dengan baik tentu secara rasional akan menjadi penting...

...

Aspek yang berhubungan dengan hambatan struktural dinyatakan bahwa patriarki pada lingkungan publik, private dan sosial masih terjadi...perempuan harus menembus batas tersebut dengan memainkan peran yang baik, beretika layaknya perempuan, bukan tidak memperhatikan aspek posisi dirinya sebagai perempuan dalam berbagai kedudukan, fungsi dan lainnya.... Menunjukkan hasil kerja menjadi sangat penting...

...informasi dalam hubungannya dengan fundamentalisme keagamaan masih terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam makna yang kurang tepat dianalisis oleh masyarakat....

Setiap responden memberikan informasi yang beragam dan memberikan informasi khusus untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut serta

untuk melakukan reduksi atas faktor-faktor yang diperhatikan sebagai penghambat perempuan dalam keterwakilannya di parlemen.

Informan berikut berasal dari Partai Pemuda Indonesia (PPI), berumur 32 tahun berpendidikan Sarjana Hukum Islam. Saat terjun sebagai caleg pada pemilu tahun 2009 baru mempunyai pengalaman satu tahun dalam partai, berada pada urutan ketujuh. Pada pemilu yang akan datang akan kembali terlibat menjadi caleg, diharapkan dengan pengalaman dan analisis selama lima tahun terakhir ini akan dapat memperoleh gambaran mengelola diri untuk dapat lolos ke parlemen. Suara yang diperoleh baru sebanyak tujuh (7) suara dari batas minimal sebanyak 675 suara. Informasi di atas sebagai permulaan untuk mengawali wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2011. Berikut hasil wawancara murni dengan menggunakan kata-kata informan:

Sistem politik yang ada masih memberikan kemungkinan keterbukaan kesempatan pada pihak laki-laki...dari sekian tahun kerja ini kesempatan perempuan baru ditentukan dengan adanya kuota 30,00 persen. Penting saya tekankanbagaimana jika dengan sistem politik yang dulu di mana nomer urut menentukan dan ada ketentuan 30,00 persen, jadi kalau perempuan di setiap partai diposisikan pada nomer 1-3, terutama pada partai besar, maka dipastikan jadi...bagaimana ...?

Mau jadi caleg atau sudah jadi, keterampilan dan bekal pendidikan politik sangat diperlukan.

Terkait dengan sistem, dapat saja menjadi penghambat, sedangkan minat perempuan atas politik praktis telah tergolong tinggi, jadi tidak menjadi penghambat.

Sumber daya finansial mutlak dibutuhkan...dukungan dana untuk mencapai hasil maksimal.

Masalah kepercayaan diri, begitu terjun pada politik praktis dipastikan telah muncul kepercayaan yang tinggi...hal yang menjadi masalah adalah usaha keras dan keberuntungan

....

Mobilitas diperlukan, tetapi yang lebih penting adalah pemilikan dana. Tanpa dana mobilitas tidak akan terwujud...dana menjadi penting untuk mendukung berbagai langkah yang akan ditempuh oleh para caleg.

Pada aspek keluarga ...belum diketahui kondisinya, karena keluarga dalam makna saya sebagai isteri belum saya alami.

...saya tergolong aktif dalam partai...jadi masalah keaktifan tidak menjadi penghambat, tetapi bagaimana pemilikan dana individu dan sistem politik yang ada...

Dukungan partai politik tidak menjadi masalah...bukan menjadi penghambat...

Politik kotor atau sejenisnya bukan menjadi penghambat...yang penting kita sendiri, kalau mau membangun jangan dengarkan pendapat orang yang negatif, buktikan bahwa kita menjalankannya dengan baik...walaupun saya menyatakan dana menjadi sangat penting itu untuk kegiatan yang legal dan positif untuk diri.

...

Aspek maskulin itu zaman dulu...laki dan perempuan sama saja. Penting adalah kemauan dan usaha, maka segala keinginan akan dapat terwujud.

Adapun demokrasi di partai perlu ditingkatkan, karena selama ini masih menjadi penghambat...

Bisa jadi ada komersialisasi dari partai, sehingga partai hanya menonjolkan caleg yang mempunyai uang ...adapun sistem pemilu telah berjalan dengan baik, bahkan membantu keberadaan perempuan dalam caleg...coba anda lihat pada periode sebelumnya ...mana ada pembicaraan gender dalam pemilu...setidaknya sekarang perempuan mempunyai kesempatan tinggal bagaimana menggunakannya.

Nepotisme dan elitisme di partai politik bisa jadi ... tetapi tidak menjadi penghambat seratus persen...yang menentukan adalah bagaimana kita bisa membuktikan diri di masyarakat.

Kekerasan dalam partai politik dengan keberadaan perempuan, khususnya menimpa caleg perempuan pada dasarnya tidak ada...bagaimana setiap caleg yang kalah tidak menjadi masalah untuk menggerakkan pendukungnya itu yang penting...mana ngerti masyarakat ada yang curang atau tidak, jika tidak dibisiki atau digerakkan oleh para elit politik.

Korupsi di partai politik dijawab dengan menyatakan saya tidak memperoleh informasi mengenai kejadian tersebut...jadi dapat saya nyatakan tidak terjadi.

...

Faktor penghambat struktural...diinformasikan bahwa publik dan private berjalan sendiri...jangan dicampur aduk, begitu juga dengan para caleg mau berada pada ranah mana harus ditentukan jangan dicampur...

Pada dasarnya pendapat yang menyatakan patriarki dalam publik dan privat itu tidak ada, tetapi jika ada pilihan maka isu ini diangkat oleh pihak tertentu dalam rangka membodohi masyarakat.

Dalam kehidupan sosial juga tidak ada patriarki, bahkan dalam pengelolaan rumah tanggapun tidak ada beda tugas tertentu, tetapi bagaimana kita memaknainya...tentu ada tugas tertentu yang tidak

dapat saling mengganti karena kodrat...seluruhnya bukan penghalang dalam menciptakan keterwakilan caleg di parlemen... Agama mengajarkan kebaikan...tidak ada diskriminasi, bahkan dalam agama saya perempuan mempunyai posisi yang terhormat...hanya praktek saja yang demikian terus seolah-olah itu adalah ajaran agama...padahal tidak, agama memberikan cara hidup yang penting dijalankan dengan benar dan baik...Zaman Rasulullah meletakkan peran perempuan sebagai tempat pembelajaran...karena perempuan tersebut yang mendampingi Rasulullah dalam kehidupannya. Artinya apa...perempuan dapat berprofesi menjadi apapun sesuai dengan kemampuan dan kemauannya...bukan dipaksa dan bukan mencari-cari kesempatan.

Ada responden atau informan yang memberikan informasi tidak sebatas pertanyaan dalam angket, bahkan memberikan penekanan-penekanan atas faktor yang dapat memberikan dukungan dan sekaligus hambatan. Temuan tersebut menjadi sangat penting untuk menambah deskripsi analisis yang akan dilakukan peneliti.

I.N.A., ...tidak bersedia memberikan informasi identitas dirinya, begitu juga dengan jawaban atas pertanyaan pelengkap. Bagaimana keterlibatannya dalam partai sekarang, pencalonan diri tidak bersedia dijawab. Berikut informasi yang diberikan terkait dengan faktor penghambat yang sifatnya langsung atas gagalnya caleg perempuan ke parlemen (DPRD Kota Mataram). Wawancara dilakukan pada 3 Desember 2011. Dalam wawancara dengan responden ditemukan fakta bahwa dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena temannya yang aktif di partailah yang mendaftarkannya ikut Pemilu pada tahun 2009 lalu. Sehingga katanya, mau tidak mau akhirnya dia berusaha juga ikut berpartisipasi sekedar meramaikan panggung pemilihan. Tetapi yang bersangkutan tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Saya secara pribadi percaya pada sistem politik, bahkan perempuan dicita-citakan minimal sebanyak 30,00 persen dalam parlemen. Rendahnya keterampilan dan pendidikan politik pada perempuan

menjadi penghambat yang penting, karena memang tidak ada pendidikan politik dalam pembelajaran formal di Indonesia sejak dini...sistem yang ada sekarang jelas jauh lebih baik, lebih transparan dan akuntabel...jadi tanpa kita ketahui bahwa sistem tersebut telah berjalan dengan baik, jadi menurut saya bukan sebagai penghambat...

Minat perempuan dalam politik tidak dapat dinyatakan sebagai penghambat, karena anda bisa lihat berapa jumlah perempuan yang ikut berkompetisi...fakta belum lolos itu masalah ketidakmampuan dalam memposisikan dirinya sebagai individu yang diharapkan oleh calon pemilih.

Menurut saya figur yang menjadi utama..., tetapi finansial menjadi faktor pendukung. Figur tersebut muncul karena awalnya yang bersangkutan mempunyai dukungan finansial yang tinggi, jadi jika ingin memberikan bantuan atau memperhatikan persoalan masyarakat dapat dilakukan dengan segera dengan tim dan dananya sendiri. Figur ini yang harus dibentuk, karena masyarakat melihat ketulusan dalam membantu dan memecahkan permasalahan masyarakat...tanpa dukungan finansial saya rasa sulit...bukan dalam makna money politic ..ingat...masyarakat dapat membaca dan dapat menentukan yang terbaik. Anda kasih uang pun kalau anda hanya bekerja pada saat ada pemilu dipastikan anda hanya akan diambil uangnya...bukan dipilih.

Percaya dirijangan dong ndak percaya diri jika terjun dalam partai politik...seluruhnya perlu penciptaan kondisi tidak serta merta muncul kepercayaan diri individu...kepercayaan diri juga tidak bersifat berdiri sendiri...jika anda mempunyai kemampuan, kemauan, dana yang cukup dan lain dukungan, maka secara otomatis akan muncul kepercayaan diri anda.

Mobilitas diri dan mobilitas masa tidak menjadi faktor penghambat. ...dana yang penting, bagaimana anda akan melakukan mobilitas diri dan masyarakat jika anda tidak punya dana...coba anda pikirkan...menjadi legislatif siap memberi, jangan siap menerima.... Jika anda berpikir balik modal anda akan melakukan kecurangan ingat ada KPK ...anda bisa berakhir di penjara.

Keluarga justru menjadi pendukung, bukan hambatan ...tentu semua dibicarakan dan diskusikan dengan baik jauh sebelumnya...jika suami atau anggota keluarga tidak mengizinkan dan anda adalah perempuan yang baik, maka jangan dong mencalonkan diri anda...anda ndak benar kalau begitu...jangan masalah besar begini...apa yang dimasak saja perlu ditanya suami atau anak agar masakan anda dapat dinikmati dengan senang hati...begitu juga saat anda jaid DPR jika telah disetujui maka anda akan dapat bekerja dengan baik....apa kebahagiaan di dunia ini ...rumah tangga rukun...jangan karena ingin hal yang kecil "jadi DPR" rumah tangga anda bubar...jalankan sesuai dengan perintah agama.

Keaktifan di partai tidak menjadi tolak ukur...ciptakan kondisi bagaimana anda dikenal jauh sebelumnya oleh calon pemilih..jadi orang yang baik yang sebenar-benarnya bukan mencari untung atas apa yang anda lakukan..itu naif.

Partai politik ingin banyak wakilnya di DPRD...jadi bagaimana mungkin menjadi penghambat...

....

Nominasi laki-laki dalam publik dan privat wajarbukankah dia yang lebih cepat mobilitas dan lainnya, bagaimana kalau anda sedang hamil atau melahirkananda ngotot ...tidak bisa itu sudah kodrat, tetapi bukan berarti perempuan tidak mempunyai kesempatan..jelas ada.

Semua yang anda sebut sebagai hambatan dasar dan struktural bagi saya bukan sebagai hambatan...tinggal anda pikirkan dan jalankan dengan baik..jadi perempuan yang baik

...saat anda kampanye dan lainnya ya harus ada suami dong...jangan jalan sendiri...anda beribadah saja ke tanah suci harus ada muhrim...itu kodrat, tetapi dengan kodrat itu bukan berarti perempuan lemah dan dibiaskan perannya...tinggal anda memilih ...laki-laki menjadi caleg...tetapi ada perempuan yang memberikan dukungan untuk memperhatikan kebutuhan perempuan atau perempuan menjadi caleg tetapi tidak mampu memperjuangkan hak-hak perempuan...coba anda lihat sekarang apa yang dikerjakan DPRD perempuan di DPRD Kota Mataram...jangan memaksakan kehendak perempuan...tanpa dukungan kemampuan....

Informasi yang diberikan informan di atas perlu menjadi perhatian, laki-laki dan perempuan menjadi mitra, siapa yang di depan tidak ada masalah. DPRD laki-laki dapat menjadi individu yang memperhatikan atau memperjuangkan hak perempuan karena ini bukan kompetisi, begitu hak perempuan terpenuhi akan terjadi pengurangan hak laki-laki tidak demikian. Konteksnya lebih pada kerja perumusan kebijakan dan aspek lainnya yang dapat memberdayakan perempuan, bukan sebagai penonton dalam pembangunan dan aspek lainnya, tetapi menjadi subyek dan penikmat.

Ni K.H., (41 tahun, sarjana, PNIM, wawancara tanggal 8 Desember 2011)

... jika ingin balik modal dari dana yang dikeluarkan jadi pebisnis saja....ngapain jadi DPR...salah-salah anda bisa ditangkap dan hidup tidak tenang. Digunakan

nama samaran atas permintaan yang bersangkutan...dikatakan bahwa suara yang diperoleh masih sangat sedikit jauh dari target suara untuk bisa lolos...

Dikatakan saya sendiri sebenarnya baru-baru saja terlibat dalam partai, mencoba untuk mengetahui bagaimana sebenarnya partai bekerja dan bagaimana cara menjadi DPRD. Saya sendiri dapat menyatakan dibutuhkan dana yang besar, bukan dalam praktik *money politic*, tetapi anda butuh tim sukses, dana promosi/selebaran dan lainnya, anda bisa lihat kalau yang bermodal menggunakan papan reklame yang besar....lihat ...bagaimana beliau menggunakan papan reklame besar untuk mendukung suksesnya diri beliau menjadi dewan, di samping beliau sudah dikenal oleh publik. Berikut hasil wawancara atas faktor penghambat keterwakilan perempuan menjadi anggota DPRD Kota Mataram:

Saya sendiri yakin tidak lolos, karena saya masih pemula...dan mempunyai keyakinan tidak dikenal oleh masyarakat. Sepak terjangnya saya dalam membela kepentingan masyarakat belum ada...dana untuk melanggengkan diri saya juga tergolong sangat kecil, saya tidak berani untuk mengalokasikan dana yang besar...karena saya sendiri bukan orang kaya, bukan pengusaha...jika saya pengusaha, maka akan lain.

Kalau anda orang biasa-biasa, tidak kaya, maka kalau anda mengeluarkan dana tertentu untuk kampanye dan sejenisnya saya yakin anda akan berpikir bagaimana uang anda akan balik. Makanya...kaya dulu baru mencalonkan diri menjadi anggota dewan, jika kalah anda tidak stress atau tidak dikejar hutang....

Saya yakin kalau anda menang pun menjadi anggota dewan, jika berkehendak pulang pokok dengan cepat tidak bisa dan anda saya pastikan akan tercoreng

Pada dasarnya setiap kita terjun pada suatu permainan, kita memastikan sistem permainan tersebut baik...jadi kalau sistem politik tidak ada masalah...jangan cari-cari alasan...

Keterampilan dan pengetahuan berpolitik sangat diperlukan...pada saat anda mencalonkan diri, terlebih jika anda dapat ..bagaimana anda akan bekerja tanpa keterampilan dan pengetahuan politik...bukankah anda berada dalam ranah politik....

Sistem tersebut sangat banyak....sistem dalam partai politik, sistem dalam pemilu bahkan sistem dalam masyarakat. Perempuan tentu akan mempelajari sistem sebelum terjun langsung dalam partai politik...

Masalah sumber daya finansial...saya katakan dari awal...kita butuh yang banyak...bahkan diukur dengan kekayaan yang kita miliki tidak seberapa, jadi saat melakukan pengeluaran dan sebagiannya tidak menjadi masalah bagi ekonomi keluarga...ada yang dengar sampai jual asset...ya bahaya...bagi diri dan keluarga. Minat perempuan menurut saya sangat tinggi, banyak sekali caleg perempuan...tapi belum menemukan titik terang apa yang harus dilakukan untuk memenangkan hati pemilih.

Orang kurang percaya diri, karena kurang pengetahuan, kurang modal dan lainnya....jadi bukan masalah kurang percaya diri, tapi kurang faktor pendukung (faktor diri, pengetahuan dan dana).

Anda menjual kue saja butuh mobilitas...apalagi jual janji atau sejenisnya...mobilitas sangat dibutuhkan. Mobilitas bukan hanya gerak diri, tetapi kita perlu tim sukses dan lainnya, seluruhnya tidak tergantung pada mobilitas itu sendiri...tetapi dana yang terbatas.

Saya rasa kalau anda sudah aktif di masyarakat dalam arti anda dikenal telah memberikan kontribusi....maka dari mana saja partai anda tidak ada masalah...penting bagaimana anda menunjukkan diri anda, kan bukan memilih partai tapi orang.

Saran saya adalah bergerak sendiri...jadilah orang yang bersosialisasi tinggi...

Saran saya di atas untuk caleg laki dan perempuan, jadi ndak ada masalah gender...ini masalah mengelola diri...partai hanya menjadi media anda mencalonkan diri, setelah itu bekerja keras sendiri.

Dra.DN (45 tahun, S1, Hanura) telah mempunyai komitmen untuk berkarier dalam politik praktis. Hal ini diketahui dari hasil wawancara pada tanggal 27 Nopember 2011 dengan menyatakan bahwa pada saat pemilu 2009 baru terjun dalam politik praktis selama tiga tahun. Hasil suara yang diperoleh sebanyak 150 suara dari 600 suara yang dijadikan syarat untuk lolos menjadi legislator di DPRD Kota Mataram. Alokasi dana yang dikeluarkan sebesar 10 juta rupiah dan pada pemilu yang akan datang akan terus berkiprah melalui Partai Hanura. Informasi lengkap hasil wawancara mengenai faktor penghambat keterwakilan perempuan di parlemen sebagai berikut:

Sistem politik tidak lagi menjadi masalah, terlebih para perempuan telah mempunyai kader dalam berkiprah. Keterbatasan penting yang menjadi penghambat adalah pemilikan fasilitas dan anggaran, sebab perempuan yang telah berkiprah "jika saya ambil dari pengalaman", sudah pasti kita telah belajar berpolitik...setidaknya saat itu selama

tiga tahun...jika pada pemilu tahun 2015 saya berpikir telah cukup matang bagi diri saya...

Kompetisi dengan pihak laki-laki, bukan perempuan saja, tentu sangat berat, karena umumnya kaum laki-laki telah familiar dengan dunia politik. Pengetahuan tentang sistem tentu telah kita pelajari, termasuk sistem pemilu dan lainnya agar dapat kita jalankan strategi untuk bisa sukses...

Perempuan kurang berminat bukan sebatas dari dirinya, tetapi sadar atas persaingan dengan orang-orang yang telah senior...seperti saya pada dasarnya saya berpikir keras, tetapi kapan harus mulai jika tidak sekarang...karena pada pemilu yang akan datang dipastikan kita sudah termasuk senior ...ada waktu lima tahun lagi untuk belajar.

Jelas faktor finansial menjadi penghambat, terlebih bagi perempuan yang selama ini menggantungkan diri pada penghasilan suami....jadi saya menekankan agar dapat leluasa dalam mengelola dana (tentu dengan persetujuan keluarga) adalah miliki dulu pekerjaan, jangan DPR menjadi pekerjaan ..susah kalau demikian dan pasti tidak akan dapat.

Begitu saya terjun di partai politik pada dasarnya permasalahan percaya diri tidak lagi menjadi masalah...bukankah kita telah bersikap. Untuk wilayah Kota Mataram pada dasarnya tidak diperlukan mobilitas yang terlalu tinggi, karena setiap dapil hanya terdiri atas dua kecamatan...tapi yang menjadi masalah jika mobilitas yang dimaksud termasuk tim sukses dan lainnya, maka jelas menjadi hambatan termasuk bagi saya yang hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 10 juta.

Pilihan terjun ke dunia politik, berarti saya sadar bahwa beban kerja saya lebih tinggi baik untuk keluarga dan kepentingan partai...keluarga tidak menjadi masalah, bahkan justru mendapatkan dukungan.

Keaktifan di partai tidak menjadi masalah, karena pada dasarnya saya telah mengatur waktu, karena urusan partai bukan setiap saat.

Permasalahan dari partai terutama kekurangan fasilitas untuk mendukung kadernya...

Saya sendiri terjun ke politik karena telah mempunyai keyakinan bahwa hanya lewat politik akan memperjuangkan hak-hak orang yang terpinggirkan, jika mau di bawa pada hal mulia sudah pasti, jika mau di bawa kotor itu tergantung pada individu.

Komersialisasi politik masih terjadi...tapi semua itu oknum dan menjadi masalah bagi kami yang masih pemula..., seperti saya dapat 150 suara (seperempat dari suara untuk lolos; jelas kemana suara itu akan lari dapat saja terjadi permainan di sini), karena saya sendiri tidak tahu bagaimana seorang kader bisa lolos ...

Sistem pemilu, walaupun terus berubah pada dasarnya adalah adanya perbaikan yang mengadopsi kepentingan bersama...tidak ada yang diuntungkan secara sepihak.

Politik di Indonesia masih terjadi nepotisme dan elitisme, dapat dilihat pada setiap partai pada dasarnya orang-orang itu saja. Kekerasan dalam politik masih terjadi, walaupun bukan dalam makna kekerasan fisik. Bagi pihak tertentu akan menghalalkan semua cara untuk dapat mencapai cita-citanya.

Dana yang ada di partai tidak digunakan dengan optimal untuk kepentingan kader, tetapi untuk kepentingan elite tertentu, jadi jelas korupsi masih menjadi penghambat dalam suksesnya perempuan menjadi DPRD di Kota Mataram.

...

Faktor penghambat yang sifatnya struktural menjadi penghambat dalam keterwakilan perempuan di parlemen, kecuali faktor agama. Faktor agama justru memberikan dukungan, jika kita konteksnya untuk saling menyeru pada kebaikan dan saling mengingatkan atas perbuatan mungkar...sektor politik sangat tepat untuk menjalankan peran tersebut.

Ada poin penting dari hasil wawancara dengan responden di atas yang tidak diberikan oleh responden lainnya, yaitu perempuan yang mencalonkan diri menjadi DPRD diharapkan mempunyai sumber kas sendiri, berarti karier dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini penting untuk memenuhi sumber keuangan, jadi tidak menggunakan pendapatan suami.

Penggalan informasi faktor penghambat keterwakilan perempuan masih dilakukan, terutama untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Nurul Hidayati (26 tahun, S1, Partai Hanura) terjun dalam partai politik pada saat berumur 23 tahun. Suara yang diperoleh sebanyak 112 suara dari target 3.500 suara (bias informasi pemenuhan target suara ini akan dikaji khusus). Pada pemilu yang akan datang akan ikut berkompetisi melalui partai yang sama. Dengan pengalaman yang ada sekarang diharapkan akan memperoleh suara yang lebih banyak. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2011, berikut hasil wawancaranya:

Sistem politik yang ada di Kota Mataram secara khusus tidak ada perbedaan, tidak ada kondisi yang menyebabkan saya tidak nyaman. Aspek proses politik yang menjadi penting, bukan keterampilan dan

pendidikan politik, karena sifatnya teoritis. Melalui proses saya bisa belajar, karena jauh lebih efektif melakukan proses terlebih didukung dengan upaya kita untuk melakukan pengamatan atas apa yang dilakukan oleh para senior.Misalnya saya ..apa yang dilakukan oleh para senior di Partai Hanura, apalagi didukung dengan kemauan untuk bertanya...

Setiap sistem selalu disosialisasi, jadi hanya orang yang mencari alasan saja yang menyatakan sistem sebagai alasan...kita tinggal melakukan penyesuaian dengan sistem itu sendiri...jangan sistem yang kita minta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan kita ..itu tidak mungkin.

Perempuan memang banyak yang tidak berminat...karena berpikir politik itu keras dan tidak baik.

Saya mempunyai pikiran dana menjadi sangat penting, karena tanpa dana sulit untuk mengaktualisasi pikiran dan langkah nyata yang kita gunakan untuk bekerja, sosialisasi diri dan partai serta lainnya.

Kepercayaan diri tidak ada masalah, setiap yang terjun pasti telah mempunyai kepercayaan diri.

Mobilitas tidak optimal, karena keterbatasan dana.

Keluarga menjadi pendukung, bukan saja keluarga inti, tetapi juga keluarga besar memberikan dukungan yang sangat berarti. Akan menjadi potensi yang besar, jika anggota keluarga juga memberikan dukungan secara nyata dengan cara melakukan sosialisasi atas program dan kebijakan partai dan cita-cita saya secara pribadi...pada pemilu yang akan datang konsep ini akan saya coba terapkan.

...keaktifan di partai tidak ada masalah, banyak yang menang tapi tidak saya lihat aktif di partai,karena bisa jadi yang bersangkutan bekerja langsung di masyarakat.

Partai pasti memberikan dukungan pada kader...

Saya rasa kalau semua orang yang terlibat di politik kotor, saya yakin Indonesia atau daerah akan hancur...jadi saya tidak setuju kalau politik dikatakan kotor, itu tergantung pada personal masing-masing.

Saya membaca angket ibu ...khusus untuk faktor penghambat yang sifatnya mendasar saya mempunyai pemikiran tidak demikian, konsep maskulin, orientasi laki-laki pada partai tidak terjadi sama sekali....potensi menjadi penting, jika laki-laki yang menang karena potensinya jauh lebih unggul setidaknya itu atas dasar persepsi pihak yang memilih. Komersialisasi politik, korupsi di partai dan lainnya menurut saya tidak terjadi, tidak berani individu bebas untuk melakukan korupsi sekarang ini....karena mereka tahu akibatnya.

Apabila dihubungkan dengan penghambat struktural konsep patriarki terlalu jauh sudah lewat....apabila ada perempuan yang aktif, mempunyai manfaat langsung pada masyarakat...saya pikir akan menjadi pilihan masyarakat....jangan mengada-adakan masalah, karena agama yang saya anut dan saya berpikir agama lain

juga demikian memposisikan umat tidak atas dasar gender...yang penting bagaimana dijalankan dengan baik.

Informasi penting yang diperoleh dari informan di atas adalah bahwa aspek penting yang harus dimiliki oleh perempuan yang akan menjadi caleg adalah mengikuti proses, dalam makna belajar dari proses politik yang ada, sebagai pembelajaran dan evaluasi. Berproses dalam politik jauh akan lebih efektif dari sekedar belajar secara formal melalui pendidikan atau pelatihan, jadi jika tertarik untuk menjadi caleg maka terjun pada politik praktis dengan segera, sejak dini, bahkan sejak di bangku kuliah.

Fz (31 tahun, S1, PAN) mempunyai pengalaman politik praktis yang relatif singkat hanya satu tahun. Pengalaman yang relatif singkat tersebut telah berhasil menghantarkannya memperoleh suara sebanyak 380 suara dari target perolehan suara 3.500 suara (perlu dikaji). Alokasi dana yang dikeluarkan sebesar kurang lebih sepuluh juta rupiah dan akan kembali pada pemilu yang akan datang.

Kemauan untuk kembali berkompetisi menjadi sangat penting, memberikan informasi bahwa minatnya atas politik praktis tinggi. Minat tersebut bukan sebatas keinginan semata, tentu ada pemikiran bahwa yang bersangkutan akan memperoleh peluang untuk lolos ke parlemen. Wawancara di atas dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2011, berikut hasil wawancara selanjutnya atas faktor-faktor yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan menuju parlemen:

Begitu saya terjun pada politik praktis, berarti saya percaya atas sistem politik yang sedang berjalan. Jika saya tidak percaya, maka untuk apa saya membuang waktu dan dana untuk berkompetisi...
Seluruh yang anda katakan sebagai faktor penghambat menurut saya tidak menjadi penghambat bagi perempuan.... Bagaimana kita mengelola diri yang menjadi penting dan bekerja sekuat tenaga...justeru pemikiran yang ada dalam pertanyaan tersebut menjadi penghambat bagi perempuan dalam segala aspek. Tinggal buktikan diri ...selesai masalah.

Informasi di atas memberikan pemikiran yang mendalam bagi peneliti, karena yang bersangkutan menyatakan ada yang telah lolos, selanjutnya buktikan diri. Perempuan yang sukses tersebut adalah bukti telah meloloskan diri, mari berjuang justru konsep gender yang dibangun pemerintah menjadi penghalang bagi perempuan.

Z.E (40 tahun, S2, PAN) wawancara dilakukan pada tanggal 10 Desember 2011. Dinyatakan bahwa yang bersangkutan berdasar dari pendidikan manajemen dan keguruan, selama ini bergelut di bidang pendidikan, fokus pada pendidikan anak-anak pra sekolah. Informasi yang diberikan sebagai berikut.

Saya aktif di PAN pada saat berada di Surabaya selama proses pendidikan magister pendidikan. Hanya aktif begitu saja untuk menambah pengetahuan dalam bidang politik praktis...Pada pemilu 2009 perolehan suara saya masih jauh dari target...jadi kalau mau terlibat lagi pada tahun 2015 mungkin tidak, cukup saya berada di sektor pendidikan saja...di mana saja kita berbuat yang penting untuk kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat.

...
Menurut saya masalah gender dewasa ini tidak ada...saya telah baca angket saudara, tetapi saya menyatakan bahwa tergantung bagaimana hal tersebut disikapi...ada perempuan yang telah lolos, berarti tinggal bagaimana belajar sama yang bersangkutan...artinya penghambat yang sifatnya langsung, mendasar dan struktural menurut saya tidak ada, tergantung pada bagaimana caleg perempuan melakukan pengelolaan diri.

Pemerintah dalam mewujudkan keinginan keterwakilan perempuan di legislatif harus tidak bekerja sebatas perundangan, tetapi harus bekerja dalam taraf praktek. Misalnya sejak sekarang membuat reklame di TV...bahwa anda butuh memilih perempuan agar potensi perempuan terangkat atau melakukan kegiatan praktis berupa bagaimana meningkatkan sumber daya perempuan...itu yang terpenting.

Hasil wawancara dengan responden di atas memberikan penegasan bahwa ada perempuan yang telah lolos menjadi legislatif (DPRD Kota Mataram). Artinya bagi orang tersebut tidak ada masalah atas faktor yang diduga sebagai faktor

penghambat langsung, mendasar dan struktural. Ada yang telah berhasil, berarti tinggal dilakukan pembelajaran pada individu yang telah sukses.

C. Pengelolaan yang Dilakukan Perempuan yang Lolos di Parlemen (DPRD Kota Mataram)

Informasi atas pengelolaan diri yang diperlukan untuk dapat lolos ke parlemen, maka perlu diperoleh informasi dari personal yang telah sukses sebagai legislatif di Kota Mataram (DPRD Kota Mataram). Wawancara dilakukan dengan N.E (38 tahun, S1, PDIP), dilakukan pada 4 Nopember 2011 berikut hasil wawancaranya :

Mencalonkan diri menjadi DPRD Kota Mataram tergantung pada partai dan masyarakat...Partai yang mempunyai wewenang dan masyarakat yang menentukan, karena bisa jadi kita juga diminta untuk menuju DPRD Provinsi NTB atau yang lebih tinggi itu tergantung pada kebijakan partai...

Saya sendiri telah terjun dalam politik praktis selama 15 tahun, cikal bakal saya di PDIP, jadi tidak mungkin rasanya saya akan pindah pada partai lain...

Dana menjadi sangat penting, tidak lepas dari dana, tapi dukungan keluarga menjadi sangat penting lagi (jawaban atas pertanyaan dana yang dialokasikan, yang bersangkutan tidak bersedia menyebutkan nilai rupiah).

Money politic... istilah ini telah ada, jadi pada dasarnya itu ada yang terjadi... tapi saya sendiri mempunyai keyakinan bisa menang tanpa *money politic*... penggunaan dana penting dana yang maksud bukan untuk kegiatan ilegal, tapi untuk mendukung program yang kita pikirkan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu mungkin saja dilakukan oleh sebagian individu yang ingin duduk sebagai anggota DPRD. Sekali lagi itu sifatnya personal dan tidak berlaku bagi diri saya.

Balik modaltidak ada dalam benak saya, uang perlu tapi bukan tujuan... Jumlah suara yang saya peroleh sebanyak 800 suara.

Setelah saya menjadi DPRD Kota Mataram terkait aspek keuangan tidak akan ada orang yang pernah puas,... penting bagaimana caranya kita harus puas dan harus mensyukuri.

Dihubungkan dengan kinerja...saya tidak pernah puas karena banyak persoalan yang harus diselesaikan...yang penting adalah bagaimana kita sebagai perempuan diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerja. Saya berada dalam komisi II bahkan saya dipercaya sebagai ketua fraksi, banyak hal yang dapat dikerjakan

dalam komisi II ini bagaimana berjuang meningkatkan anggaran pendidikan, pelayanan publik, menyediakan fasilitas air bersih di daerah pinggiran dan lainnya.

Berhubungan dengan gender...kitalah perempuan yang harus berjuang kalau ingin punya kedudukan yang sama dengan laki-laki...yang terpenting adalah jangan melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Saya lihat juga selama saya menjadi anggota DPRD banyak anggota DPRD laki-laki yang tidak mau berbicara...saya katakan laki-laki ini tidak mau bicara atau memang tidak mampu menyampaikan pendapatnya.

Dalam hal menjaga hubungan dengan konstituen...saya kira penting dalam membina hubungan dengan masyarakat yang memilih kita (konstituen) dengan cara terus menerus membina komunikasi dan turun langsung untuk mengenali permasalahannya.

.....

Pengelolaan diri yang menghantarkan beliau sukses menjadi DPRD Kota Mataram sebagai berikut:

Pada pemilu 2009 yang saya lakukan adalah bukan start pada setiap mulai pemilu, tetapi sejak saya berkarier di politik secara terus menerus mengalokasikan pikiran dan tenaga dalam mengenali masalah yang ada di dapil saya, terutama yang saya jadikan sebagai basis saya.....Kerja yang dilakukan jangan mengharap anda akan dipilih, bekerja dengan ikhlas dipilih atau tidak itu tidak masalah, tetapi memberikan kontribusi secara pribadi atau melalui partai pada masyarakat....jangan pamih.

Tawaran pada pemilih:

Dihubungkan dengan materi tidak ada, begitu juga dengan bantuan tempat ibadah dan sejenisnya, justru fokus pada apa yang saya lakukan kalau terpilih.....dalam kampanye sudah otomatis kita aktif.

Hal penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana masyarakat tahu anda, jadi kampanye sangat diperlukan termasuk lewat brosur pada jejaring pemilu. Tim sukses saya adalah keluarga besar.

Partai sangat mendukung sangat mendukung, begitu juga dengan keluarga sangat luar biasa bantuannya.

Saya sukses menjadi DPRD karena aspek berikut garis tangan dan berbuat terbaik bagi masyarakat, dukungan keluarga dan yang paling utama adalah do'a orang tua.

Hal yang saya sarankan adalah jadilah anggota partai karena hanya menjadi anggota partai akan mudah untuk menjadi anggota legislatif, karena kalau dari melalui kerja sendiri (DPD-DPR Pusat) merupakan kerja yang sangat berat...jadi lewat partai dulu berjuang. Jangan pernah menganggap politik itu kotor, politik merupakan media untuk memberikan kontribusi penciptaan kesejahteraan rakyat, buat perempuan jangan mudah menyerah, kalau kita berusaha Allah akan memberikan jalan.

Hal penting yang muncul dalam diri saya setelah menjadi anggota dewan adalah lebih peka dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan

selalu merasa dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Hasil wawancara di atas digunakan sebagai dasar dalam memberikan masukan bagi para perempuan yang terjun dalam politik praktis serta upaya membentuk keterwakilan di DPRD Kota Mataram.

Wawancara dengan informan di atas dilakukan kembali terkait dengan implementasi kebijakan mengacu pada model Mazmanian dan Sabatier, berikut hasil wawancaranya:

Konteks yang terberat untuk menjadi sukses keterwakilan di DPRD Kota Mataram adalah :

Segi sosial di TPS harus mempunyai saksi pribadi, itu perlu dikawal untuk kegiatan tersebut dapat digunakan keluarga atau bentuk tim kecil sesuai banyaknya TPS di dapil kita. Sering terjadi kehilangan suara di TPS.... Kalau bisa anda muncul di TV.

Saya sendiri untuk sukses mengupayakan agar kompetensi dapat dilihat oleh masyarakat...upayakan untuk dapat melakukan debat atau dialog terbuka di TV.

Berhubungan dengan hal tersebut ada KPU, ada panwaslu, terkait dengan kemunculan di TV bagaimana anda membuat diri anda pantas untuk menjadi kandidat atau wakil dari partai.

Pemerintah sendiri telah melakukan alokasi dana yang cukup besar, belum lagi dana dari kabupaten atau kota...tinggal bagaimana semua itu dimanfaatkan dengan optimal.

Berusaha secepat mungkin mengatasi masalah yang ada, kebutuhan publik menjadi utama dan menjadi prioritas termasuk dalam APBD tahun 2012.

Pemerintah harus menggali informasi dari masyarakat...suara masyarakat menjadi utama yang diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak.

Wawancara dilakukan juga dengan DPRD perempuan dari PKPB, yaitu I.G.N.A.R., (53 tahun, S1). Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Desember 2011. Berikut hasil wawancaranya:

Akan ikut lagi pada Pemilu tahun 2014/2015 melalui partai yang sama. Pada tahun 2009 yang bersangkutan baru terlibat dalam partai selama 5 tahun. Pada dasarnya yang bersangkutan hanya mencoba-coba di partai politik dan menjadi caleg, dan ternyata lolos. Dana

tidak ada yang dialokasikan... secara otomatis jawabannya menyatakan tanpa money politic caleg bisa lolos.

Suara yang diperoleh sebanyak 650 suara.... Dana yang diperoleh di dewan harus kembali lagi ke masyarakat, jadi masalah keuangan tidak mengalir ke kantong saya...karena saya sendiri punya usaha peternakan ayam potong dan saya merasa sudah lebih dari cukup dengan usaha yang saya lakukan. Saya merintis usaha peternakan ayam potong itu sudah lama sehingga sekarang tinggal saya memetik hasilnya.

Fokus perhatian pada upaya untuk membantu anak miskin dan kapan-kapan dibutuhkan harus siap itu suatu kenikmatan. Adapun masalah gender sulit dihilangkan dari persepsi masyarakat.

Isu utama yang diangkat selama menjadi DPRD adalah pendidikan anak-anak miskin, advokasi untuk anak-anak bermasalah serta kekerasan terhadap anak.

Yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak melakukan pergerakan selama periode pemilu 2009, bahkan yang membuat stiker orang lain (H. Tohri).

Secara otomatis tidak ada janji pada masyarakat, tidak memberikan bantuan dan lainnya.....tidak melakukan kampanye. Tidak membuat pamflet, brosur dan lainnya

Menurut pertimbangannya bahwa yang bersangkutan dapat lolos menjadi dewan karena berasal dari latar belakang guru.....ini guru saya, intinya berbuat dan bersikap baik selama hidup pada setiap orang maka orang akan membalas dengan kebaikan juga.

Pada sisi lain saran yang diberikan agar perempuan dapat lolos di DPRD Kota Mataram adalah perempuan harus mempersiapkan diri, pendekatan ke masyarakat, teman dan keluargaberbuat yang baik tanpa melihat latar belakang orang yang akan dibantu.

.....
Beliau mengakui tidak ada masalah berat yang dilakukan, sekarang yang perlu dilakukan adalah menjaga suara agar jangan hilangusahakan pada saat penghitungan suara ada tim sukses. Satu TPS satu orang.....

Kecurangan yang menjadi perhatian Ibu IGNAR.....tetapi pemerintah seolah tidak mau tahu kecurangan terjadi.

Wawancara berhenti karena dinyatakan bahwa pemerintah selama ini tahu ada kecurangan, tetapi tidak tahu, jadi percuma diberikan saran dan rekomendasimereka lebih tahu.

Anggota DPRD Kota perempuan yang berasal dari partai Demokrat tidak berkenan diwawancarai, karena kesibukan atau ketidaktertarikannya atas tema yang diangkat oleh peneliti. Pemikiran positif yang dijalankan oleh peneliti adalah

waktunya sangat berharga untuk memecahkan masalah masyarakat yang jauh lebih penting.

Tiga perempuan yang terwakili menjadi anggota DPRD Kota Mataram seluruhnya menjadi anggota Komisi II, dengan bidang tugas pendidikan, kesehatan, keuangan, perbankan, pariwisata, tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, perdagangan dan kesejahteraan masyarakat. Dapat dinyatakan bahwa bidang tugas komisi II sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Ditegaskan secara langsung, karena berhubungan dengan kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain dinyatakan sebagai bentuk tidak langsung, karena bidang tugas tersebut merupakan pembentuk pendapatan regional Kota Mataram, yaitu sektor keuangan, perbankan, pariwisata, pertanian, termasuk juga sector-sektor lain.

Sektor pertanian memberikan kontribusi atas PDRB Kota Mataram sebesar 3,87 persen, jadi masih tetap memberikan kontribusi yang diperhitungkan (perikanan dan kelautan masuk dalam sektor pertanian). Perdagangan dan pariwisata memberikan kontribusi sebesar 20,95 persen, sedangkan sektor keuangan dan perbankan sebesar 26,15 persen (BPS Kota Mataram, 10 Januari 2012). Fakta ini menjadi perhatian, di mana dalam menjalankan peran pengawasan pihak DPRD perempuan mutlak menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugas, bukan sebagai pelengkap semata.

Kesempatan menjadi anggota DPRD Kota Mataram bukan sebagai akibat pemberian atau wujud kebijakan *diversity*, tetapi perjuangannya dalam mendapatkan suara. Mutlak bagi anggota DPRD, termasuk DPRD perempuan

mempunyai penguasaan atas bidang, karena evaluasi dijalankan sejak setiap SKPD melakukan penyusunan program kerja beserta pagu-nya sebagai wujud dari rencana APBD (RAPBD). Persetujuan hanya diberikan, jika seluruhnya bermuara pada pemberian nilai positif bagi masyarakat, yaitu secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Berhubungan dengan kerja di atas, anggota DPRD yang berasal dari pemenang pemilu (partai Demokrat) sangat diperlukan informasi kerjanya di DPRD Kota Mataram. Aspek pertanyaan tidak difokuskan kembali pada bagaimana pemenangnya, tetapi bagaimana memberikan pembuktian bahwa DPRD perempuan mempunyai posisi yang cukup disegani di dalam pelaksanaan tugas dengan eksekutif ataupun dengan anggota DPRD lainnya. Dinyatakan demikian, karena intelektualitas pemikiran dalam menyampaikan ide, pemikiran, inovasi dalam menyikapi suatu permasalahan kerja, termasuk setiap program kerja SKPD, aktualisasi dan kerja evaluasi yang dijalankan menjadi sangat diperhatikan oleh eksekutif.

Uraian di atas tidak ditemukan selama penelitian dilakukan. Pada saat penelitian dilakukan (observasi) tidak ditemukan bagaimana anggota perempuan, terutama dari partai pemenang pemilu menunjukkan diri, sehingga kemenangan suara murni sebagai kemenangan ide, bukan sebatas kemenangan karena jumlah anggota yang banyak. Ditegaskan demikian, karena masyarakat dapat menilai kredibilitas dan posisi anggota dewan terkait. Hal ini penting untuk memberikan ruang dan pembuktian bahwa perempuan pantas menjadi anggota dewan. Hal yang ditakutkan adalah kompetensi individu yang tidak bersesuaian, justeru akan

menjadi hambatan bagi DPRD Kota Mataram dalam bekerja dan hambatan untuk memberikan posisi pada perempuan di pemilu yang akan datang.

Uraian di atas pada dasarnya memberikan pemaknaan atas hasil wawancara pada lain waktu dengan N.E (wawancara tanggal 25 Nopember 2011).

Berikut hasil wawancaranya :

Menjadi anggota dewan ...jangan dengan modal nekat atau uang, harus dengan modal intelektual. Apabila dengan modal uang dan hendaknya balik modal...maka dalam waktu cepat atau lambat akan bermuara pada satu tempat “di samping kantor gubernur”.

Fakta sudah menunjukkan, saat anda berkuasa dapat saja anda mengalihkan permasalahan, tetapi lambat laun pasti anda akan kehilangan power.. disitu anda kena...

Terlebih pada zaman sekarang, kerja KPK sangat berani dalam memberantas korupsi dan sejenisnya...apalah kita...saya tekankan jangan...anda perempuan atau laki-laki, terlebih perempuan ..., jika perempuan melakukan korupsi maka pandangan orang akan jauh lebih hina,,,karena ini persepsi bahwa perempuan adalah perempuan yang lebih lurus dibandingkan dengan laki-laki yang kerjanya lebih gesit dan sejenisnya...ketemu di mana ...ndak ada masalah, ...perempuan bagaimana ...

Masyarakat yang memilih anda akan melihat apa yang dilakukan oleh wakilnya...tidak terdengar apa yang dikerjakan...tidak ada ide dan lainnya...maka untuk apa masyarakat memilih,...ya kalau masyarakat atau pemilih kita bodoh semua...

Buktikan kemampuan kerja melalui pengetahuan yang mendalam atas suatu materi, bela dan perjuangkan ide...cari informasi di masyarakat, apa solusi melalui bidang tugas di komisi..itu baru anggota dewan dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari keberadaan kita.

Saya tidak mengatakan diri saya lebih bisa ...tidak, tetapi saya telah berjuang dalam kurun waktu yang panjang...setidaknya tahu seluk beluk politik ini...munculkan diri saat mencalonkan diri, terlebih pada saat anda telah memperoleh posisi tersebut...

Jadi saya katakan ...hai perempuan, jika anda ingin jadi DPRD sekolah dulu, tingkatkan kemampuan diri dalam segala aspek....karena DPRD harus mempunyai pengetahuan yang luas...

Informasi seperti di atas sangat dibutuhkan, dalam rangka memberikan telaah atas kerja yang dilakukan bagi anggota DPRD Kota Mataram yang telah

mendapatkan posisi. Kerja yang dilakukan bukan semata untuk kepentingan diri dan partai, tetapi juga memberikan penguatan atas kesempatan perempuan untuk terwakili pada periode yang akan datang. Para anggota DPRD perempuan harus menunjukkan kapabilitas diri dan keseriusannya dalam bekerja guna kepentingan masyarakat semata.

Individu di atas (N.E) tergolong senang berbagi, sehingga setiap kali ada waktu untuk melakukan diskusi atas suatu permasalahan selalu siap memberikan informasi. Pertanyaan penting yang timbul setelah melakukan penggalian atas informasi mengenai faktor penghambat dan langkah yang diupayakan serta keberadaan setelah menjadi anggota dewan, maka perlu dipertanyakan sikap dari anggota lain dengan keberadaan perempuan di DPRD Kota Mataram. Pertanyaan penting yang sifatnya adalah penggalian yang muncul dari wacana peneliti untuk mendapatkan informasi yang luas adalah apakah ada sikap dari anggota DPRD Kota Mataram yang laki-laki dalam memberi kesempatan pada perempuan untuk lebih tampil di forum, termasuk saat rapat.

Ha..ha...ha.. (beliau tertawa)...kalau anda sedang membuat sandiwara atau OVJ sama apa namanya yang lain.... baru itu boleh. Bagaimana anda akan memperjuangkan misi partai, amanat dari pemilih atau kondisi urgen yang mampu diserap dari masyarakat jika kita memberikan kesempatan pada salah satu individu untuk tampil atau idenya yang diserap....tidak bisa itu, justeru kalau demikian anda sedang memperkosa demokrasi...apa pikiran, apa ide kita, selama lebih unggul wajib diperjuangkan....bagaimana anda akan menyuruh orang ngomong...saya ini yang perempuan pada perempuan lain...berapa kali saya interupsi agar jangan bicara panjang lebar tanpa makna, baik pada anggota DPRD perempuan dan laki-laki. Penghinaan atas karier saya jika ada pemikiran bahwa anggota perempuan di DPRD Kota Mataram diberikan kesempatan untuk tampil...saya pernah bilang sama anda ...tunjukkan kemampuan dari awal, terlebih sekarang...bukan makna konseptual saja, tetapi bagaimana kita telah mampu menyerap aspirasi masyarakat...

Kembali dilakukan wawancara dengan I.G.N.A.R., beberapa hari setelah wawancara pertama tanggal 13 Desember 2011. Wawancara dilakukan sesuai dengan konsep pertanyaan yang sama dengan anggota dewan di atas, sebagai berikut :

Bagi sayakonsep 30,00 persen terwakili....terlebih sekarang saya ditanya tentang pemberian kesempatan pada perempuan untuk lebih tampil....jelas itu tidak ada dan tidak bermakna apa-apa.

Pada dasarnya jangan kita bicara untuk menentukan hasil dengan cara memberikan kesempatan pada orang tertentu termasuk perempuan untuk tampil...jangan...mutlak karena mutu.

Orang yang nonton bola akan marah...jika penyerang lawan diberikan kesempatan membuat gol...terlebih dalam pengelolaan negara. Masyarakat akan senang jika haknya dibela mati-matian oleh DPRD.

....konsep diversity boleh hanya pada peningkatan kualitas, misalnya kesempatan memperoleh pendidikan, pelatihan dan lainnya boleh itu...tetapi jika masalahnya pada program, kebijakan dan lainnya harus yang menyentuh akar permasalahan...itu kerja dewan dalam melakukan evaluasi...maka siapa yang mempunyai konsep berpikir yang cemerlang seyogyanya tampil dan memperjuangkannya....

Jadi saya tidak jawab pertanyaan ibu...karena kalau itu terjadi ...di mana muka saya taruh....bukankah saya juga mempunyai pendidikan dan pengalaman yang cukup...tidak dan saya tersinggung jika ada anggota dewan laki-laki yang bilang diberikan kesempatan pada perempuan.

Konteks di atas memberikan penegasan bahwa dua orang anggota dewan perempuan (DPRD Kota Mataram) sangat tidak menghendaki pemikiran yang menyatakan bahwa perempuan perlu diberikan kesempatan pada saat berada di parlemen. Konteks ini, jika di bawa kembali pada permasalahan awal, maka kapabilitas individu yang menjadi utama, bukan keterwakilan perempuan sebanyak 30,00 persen atas dasar nama undang-undang sekalipun. Kesengajaan dalam menempatkan perempuan di DPRD Kota Mataram dengan jenis kelamin perempuan, hanya untuk kepentingan undang-undang tersebut, tanpa mengutamakan kapabilitas, potensi dan faktor individu lainnya yang akan

mengarahkan kerjanya yang berkualitas sebagai pengawas dan mitra kerja pemerintah, maka akan berakhir pada pencederaan kepentingan masyarakat. Partai politik yang mempunyai peran dalam konteks ini harus selektif dalam memilih anggota, bukan hanya ada keinginan kemudian diberikan, tetapi perlu dilakukan analisis kompetensi dari calon perempuan tersebut.

D. Pembahasan

Konsep hasil riset dari UNDP yang digunakan dalam menelusuri faktor penghambat keterwakilan perempuan menjadi anggota legislatif, secara spesifik menjadi anggota DPRD Kota Mataram. Informasi mengenai aspek tersebut diupayakan diperoleh dari para perempuan caleg yang tidak berhasil lolos ke parlemen.

Terdapat cukup banyak responden yang digali pengalaman yang dirasakan saat ikut berkompetisi sebagai caleg. Temuan yang diperoleh tidak seluruh aspek penghambat keterwakilan perempuan yang sifatnya langsung, mendasar dan struktural sebagai faktor penghambat gagalnya yang bersangkutan menjadi anggota DPRD Kota Mataram.

Temuan yang mengejutkan juga adalah ada responden yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tidak setuju atas identifikasi faktor penghambat keterwakilan perempuan di legislatif sesuai dengan konsep UNDP. Ditegaskan bahwa ada perempuan yang sukses sebagai anggota dewan, jadi yang bersangkutan mampu mengatasi masalah dan mengambil hati para pemilih di daerah pemilihannya. Ditegaskan bahwa seluruhnya tergantung pada individu yang bersangkutan, bagaimana mampu menunjukkan kompetensi yang dimiliki

melebihi pihak lain dan dapat mengusung kebutuhan masyarakat yang menjadi pilihannya.

Temuan di atas tidak dapat dikesampingkan, sepenuhnya untuk memberikan kondisi berpikir bagi para perempuan untuk dapat percaya diri tanpa memperhatikan aspek lain, selain aspek positif baik yang muncul dari dirinya sebagai kompetensi dan faktor eksternal yang muncul sebagai penggerak. Kepercayaan diri dan kepercayaan atas aspek luar akan memberikan dorongan untuk para perempuan terjun dalam politik praktis.

Uraian di atas hanya sekilas untuk memberikan informasi adanya responden yang memberikan penilaian bahwa seluruh kegagalannya sebagai akibat kompetensi dirinya yang tidak unggul. Berikut akan dilakukan kajian atas aspek-aspek penghambat berdasarkan penilaian yang diberikan responden secara umum.

Sistem politik; secara umum responden (caleg perempuan tahun 2009) memberikan penilaian bahwa keputusan untuk terjun dalam politik praktis karena telah percaya atas sistem politik di Indonesia. Apabila sistem politik yang menjadi penghambat dan dikenali oleh para perempuan, maka secara umum tidak akan ada yang mau terlibat dalam pemilihan legislatif di Kota Mataram. Sistem politik pada dasarnya terkait dengan seluruh aspek yang membentuk politik itu sendiri, transparansi menjadi sangat penting dan upaya dari sistem itu sendiri untuk selalu menghindari kecurangan dan sejenisnya.

Penting untuk dilakukan penggalan kajian atas sistem politik mengacu pada temuan bahwa para caleg perempuan tidak mengetahui secara jelas berapa perolehan suara untuk dapat lolos dan bagaimana sistem sumbang suara antar caleg. Ditegaskan demikian, karena banyak responden yang memberikan

informasi perolehan suara untuk dapat lolos menjadi DPRD Kota Mataram, jika dapat memperoleh suara 3.000 atau 3.500 suara. Pada sisi lain ada yang telah memperoleh suara pada kisaran 380 suara, sementara jika mengacu pada pernyataan caleg yang lolos hanya mendapatkan suara pada kisaran 600-800 suara. Perolehan suara ini tepat jika dihubungkan dengan perolehan suara partai yang lolos pada DPRD Kota Mataram.

Mengacu pada temuan di atas, jika dihubungkan dengan faktor penghambat maka dapat bersumber dari dalam partai itu sendiri. Komersialisasi suara, nepotisme dan elitisme masih terjadi. Transparansi partai menjadi perlu untuk diragukan, konteks ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan responden yang gagal, cukup banyak memberikan penilaian bahwa komersialisasi suara masih terjadi di internal partai, nepotisme dan elitisme. Dihubungkan dengan acuan yang digunakan dalam penelitian ini, maka riset yang dilakukan UNDP memberikan temuan yang sama. Hal ini juga diperkuat dalam model Grindle, bahwa pihak yang mempunyai sumber daya yang kuat akan dapat melakukan pembelian suara, posisi yang lebih baik dalam partai. Konteks ini dapat dilihat pada politik skala nasional dan daerah, di mana pengusaha dapat dengan mudah menduduki jabatan strategis dalam partai, tanpa melakukan pembinaan karier dari bawah. Hal ini akan berdampak pada kesiapan dan kualitas wakil rakyat yang akan duduk di parlemen.

Berhubungan dengan **keterampilan dan pendidikan politik** banyak caleg yang memberikan penilaian, bahwa kegagalan perempuan menjadi legislatif, karena rendahnya keterampilan dan pendidikan politik. Akan tetapi ada juga informasi yang cukup cerdas, bahwa proses politik menjadi utama, di mana

perempuan harus sejak dini aktif dalam politik praktis, sejalan dengan saran yang lolos di DPRD Kota Mataram.

Minat perempuan dalam politik sudah cukup tinggi, tetapi yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya finansial. Ada saran cerdas dari caleg yang tidak lolos, yaitu para perempuan yang akan menjadi caleg semestinya mempunyai sumber keuangan sendiri, bukan sumber keuangan rumah tangga.

Kepercayaan diri tidak menjadi masalah, begitu juga dengan keluarga dan keaktifan di partai tidak menjadi faktor penghambat. Keluarga bahkan menjadi pendorong suksesnya caleg, baik dalam makna keluarga inti atau keluarga besar, karena dapat digerakkan sebagai tim sukses.

Persepsi politik kotor tidak lagi menjadi permasalahan atau penghambat bagi para perempuan, tergantung pada individu. Pemilikan dana sangat penting, tetapi digunakan untuk jalan yang legal.

Konsep maskulin ada yang mengakuinya sebagai penghambat, tetapi tidak sedikit yang menganggapnya bukan sebagai penghambat. Seluruhnya disebabkan sumber daya manusia laki-laki lebih unggul, jadi yang terpenting adalah bagaimana pihak perempuan meningkatkan potensi dirinya. Partai sebagai organisasi awal demokrasi diharapkan muncul sebagai penegak jalannya demokrasi, konsep demokrasi adalah obyektivitas, bukan dengan subyektivitas memberikan peluang pada anggota tertentu untuk unggul dari anggota lainnya.

Hal terakhir di atas diakui bahwa ada responden (caleg) yang menyatakan masih aspek tersebut sebagai penghambat, wujud akhirnya adalah **komersialisasi**. Dapat dinyatakan ada caleg yang mengidentifikasikannya sebagai penghambat, tetapi ada juga yang tidak mengidentifikasikannya.

Konsep patriarki ada caleg yang mengidentifikasinya sebagai penghambat, tetapi tidak sedikit juga yang menyatakannya bukan sebagai penghambat. Adapun aspek agama dapat dinyatakan sebagian besar menyatakannya bukan sebagai penghambat, tergantung pada bagaimana individu menjalankannya.

Menghubungkan uraian identifikasi faktor penghambat di atas dengan temuan pada responden (caleg) yang lolos. Hal berat yang terjadi adalah bagaimana memberikan kepastian suara tidak hilang di TPS.

Dua informan caleg yang lolos memberikan informasi yang sama. Maknanya adalah ada kondisi yang salah, bisa terjadi pada caleg laki dan perempuan, tidak pada individu atas gender. Penting untuk diperhatikan adalah sejak dini untuk terlibat dalam partai dan secara sungguh-sungguh meningkatkan kompetensi diri, berbuat baik dan aktif di masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada caleg sukses yang berprofesi sebagai guru, bahkan orang lain yang membuatkan stiker dan sejenisnya, karena yang bersangkutan telah berkarier sebagai guru yang senior dan sukses memposisikan dirinya pada karier tersebut.

Banyak hal yang dipertanyakan berhubungan dengan implementasi kebijakan yang hendaknya dikerjakan atau dijalankan oleh pemerintah. Pada dasarnya ada KPU dan Panwaslu, sistem ini telah ada, bagaimana lembaga dan personal yang ada di dalamnya bekerja dengan sungguh-sungguh.

Penting untuk dicatat, lembaga tersebut pada dasarnya tahu permasalahan pemilu, yaitu kecurangan, tetapi seolah tidak menjadi perhatian. Dua informan ini seolah kehilangan harapan pada kebijakan dan implementasi yang diharapkan agar para perempuan mempunyai keterwakilan yang tinggi di parlemen.

Adanya hal tersebut dua informan tersebut meminta agar mempunyai tim pada saat perhitungan suara di TPS. Adapun bagaimana untuk memperoleh suara dari masyarakat seluruhnya mutlak dari kerja individu, tidak ada kaitan dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah.

Penting untuk ditonjolkan adalah bagaimana memberikan pembuktian bahwa perempuan mempunyai kompetensi, jadi diupayakan agar dapat tampil dalam debat dan sejenis di TV. Saran ini bukan sebatas melaksanakan, tetapi bagaimana mempersiapkan diri terlebih dahulu, proses politik harus telah dilalui, bukan sebatas pengetahuan teoritis.

Keluarga bukan menjadi penghambat, tetapi bagaimana diberdayakan. Penting bagi para perempuan untuk mempunyai peran aktif dimasyarakat, bukan dalam makna mendapatkan pamrih, tetapi biarkan masyarakat yang memberikan penilaian. Karier guru tersebut memberikan contoh, karena banyak murid, sementara sejak awal murid telah menjadikan yang bersangkutan contoh dalam hidupnya, maka tidak lagi memandang agama. Diinformasikan yang bersangkutan tidak mengeluarkan dana, tidak berkampanye, bahkan dari partai politik yang kecil, tetapi ternyata sukses, berkat jasanya sebagai guru.

Hal penting dari hasil riset ini adalah bagaimana memaknai dua informasi dari caleg yang sukses. Telah berkiprah lama dalam partai, memberikan keyakinan pada pemilih bahwa yang bersangkutan mempunyai kompetensi, tetapi satu sisi berbuat baik pada masyarakat.

Gabungan dua informasi di atas, jika mampu dicerna dan diaplikasikan oleh caleg perempuan pada pemilu 2014/2015, maka ada potensi untuk sukses, terutama pada caleg yang telah memiliki suara lebih dari 100 orang. Untuk itu,

perlu menjaga suara yang telah diperoleh, karena hal ini dilakukan oleh dua caleg sukses.

Pemilikan dana sudah pasti, walaupun ada juga yang sukses tanpa dana. Kerja mulai sejak sekarang menjadi sangat penting, pada karier apapun yang sedang dijalankan, berbuat baik dan diupayakan untuk dikenal banyak orang. Dapat dilakukan dengan sejak dini peduli pada permasalahan masyarakat serta mencari solusi untuk perbaikan.

Mengacu pada hasil riset dalam penelitian ini, kebijakan yang diterapkan pada pemerintah adalah bagaimana para aparaturnya menjalankan fungsinya dengan amanah. Di Indonesia setiap lembaga telah ada, termasuk dalam pemilu ada KPU, panwaslu bahkan ada bantuan kerja dari kepolisian dan lembaga independen lainnya. Faktanya dua informan yang diacu pendapatnya didukung dari hasil riset dengan anggota yang tidak lolos memberikan indikasi bahwa lembaga tersebut tidak sepenuhnya menjalankan fungsi masing-masing.

Dengan demikian, sederhana kebijakan dan implementasi yang diharapkan, bagaimana membuat personal yang ada menjadi personal yang amanah. Amanah ini mempunyai makna yang luas, menjalankan fungsi dan tugas pokok. Apabila ini yang dijalankan, maka secara otomatis semua hal akan menjadi lancar, termasuk upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Penting berbagai temuan di atas untuk digali lebih lanjut dalam konteks perumusan kebijakan publik, walaupun responden yang telah terwakilkan di parlemen menyatakan bahwa kebijakan publik yang ada, dengan melihat banyaknya organisasi yang mengelola pemilikuda dan perundangan yang melingkupi memberikan penegasan agar seluruhnya tinggal menunggu

pelaksanaan yang amanah. Berhubungan dengan hal ini perlu dilakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan Sabatier dan Mazmanian, bahwa seluruh faktor yang diidentifikasi menghambat keterwakilan pada parlemen pada dasarnya mempunyai sifat dapat dikendalikan, tinggal persamaan persepsi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem politik telah berjalan dengan baik, setidaknya tergambar dari banyaknya perempuan yang berpartisipasi pada sektor politik ini memberikan tanda positif adanya potensi untuk realisasi keterwakilan wanita. Tentu, konsep pemberian perhatian dan keberanian dari para perempuan untuk menuntut haknya sangat diperlukan, baik pada tingkat partai ataupun pada keputusan KPU. Hal ini ditegaskan, karena adanya bias jumlah suara yang menyebabkan terealisasinya keterwakilan di parlemen.

Ada informasi yang jelas, bahwa keterampilan perempuan dalam berpolitik menjadi penghambat. Dalam model Edward, dapat dijadikan sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan pada periode mendatang, bahwa partai diharuskan memberikan pengetahuan berpolitik yang seimbang pada anggotanya, sehingga tidak hanya sebatas ikut berpartisipasi. Hal ini penting dalam menjalankan peran aktual, jika dapat menjadi anggota parlemen, sehingga tujuan perjuangan hak perempuan melalui parlemen dapat terealisasi. Aspek birokrasi jelas menjadi penting agar memberikan kemudahan bagi perempuan dalam berpartisipasi pada partai politik. KPUD dalam kerjanya tidak hanya pada saat operasional pemilu/kada, tetapi bagaimana terlibat dalam memberikan pendidikan politik sesuai perundangan yang berlaku pada politisi perempuan.

Perempuan dalam konteks pengelolaan sumber daya diri perlu melibatkan keluarga untuk menjadi potensinya, terutama sebagai pihak yang membantu

mobilitas, tim kampanye dan lainnya. Konsep maskulin lambat laun dengan keseimbangan pengetahuan dan keterampilan sumber daya perempuan dengan laki-laki akan menghilangkan bias keunggulan laki-laki. Semakin tinggi pendidikan kaum perempuan akan memberikan dampak pada kemungkinan terealisasinya cita-cita yang dibangun perempuan, termasuk pembuktian diri. Tentu aspek ini memerlukan waktu yang panjang, tetapi tetap sebagai variabel yang dapat dikelola untuk muncul sebagai pendukung terwakilinya perempuan di parlemen.

Organisasi publik (KPU, pengawas pemilu) perlu merumuskan kebijakan yang tegas, dengan hukuman individu dan partai, jika terbukti melakukan komersialisasi suara. Hal ini ditegaskan, walaupun ada indikasi dua organisasi tersebut sebagai tempat terjadinya komersialisasi, tetapi sebagai suatu tim diharapkan ada kerja personal yang jujur sebagai pihak pelapor pada kepolisian atau sejenisnya. Informasi ada di internal organisasi tersebut, sehingga akan sulit bagi kepolisian atau pihak lain dalam melakukan pengusutan jika tidak ada pelaporan. Penegasan ini juga perlu diberikan pada politisi perempuan yang mempunyai bukti bahwa haknya diambil oleh pihak lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagaimana uraian berikut :

1. Faktor yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan di parlemen dilihat dari ketiga factor yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu hambatan langsung, hambatan yang bersifat mendasar, dan hambatan yang bersifat structural adalah :
 - a. Dari hambatan yang bersifat langsung sebagian besar informan mengatakan bahwa yang menjadi penghambat utama dalam pencalonan mereka sebagai anggota legislatif adalah sumber daya finansial. Hal tersebut disebabkan tidak semua perempuan yang menjadi caleg mempunyai sumber pendapatan sendiri yang dijadikan sebagai modal dalam pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif. Sehingga ketika mencalonkan diri mereka menemukan kesulitan untuk melakukan mobilisasi dengan masyarakat. Disamping itu hambatan lain yaitu kurangnya mobilitas dalam proses kampanye karena masih terkait dengan masalah pendanaan. Selanjutnya keterampilan dan pendidikan politik perlu dimaknakan secara operasional dengan menyatakan bahwa proses politik yang kurang bagi perempuan, oleh karena itu perempuan perlu dengan segera terlibat dalam partai politik.
 - b. Dari hambatan yang bersifat mendasar ditemukan bahwa faktor yang paling besar menghambat keterwakilan perempuan adalah

komersialisasi politik, nepotisme dan elitisme serta korupsi dalam politik masih terjadi. Dalam temuan penelitian ini dilakukan cross check hasil riset, ternyata hal itu terjadi tidak hanya di partai tetapi juga terjadi pada sistem, yang penting adalah bagaimana para calon legislatif itu mengontrol suaranya di TPS.

- c. Dari hambatan yang bersifat struktural ditemukan bahwa yang menjadi hambatan perempuan dalam keterwakilannya di parlemen adalah maskulin dan budaya sosial yang patriarki di masyarakat ternyata mutlak disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Jadi penghambatnya bukan gender itu sendiri, tetapi memang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan di Kota Mataram ini lebih rendah. Konteks ini dapat menjadi fakta dan persepsi di masyarakat, untuk itu perlu menunjukkan dan pembuktian diri pada masyarakat bahwa perempuan juga punya potensi dan kompetensi tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki.
2. Kebijakan dan implementasi publik yang dijalankan oleh anggota DPRD yang lolos pada pemilu pada tahun 2009 adalah melakukan pengontrolan suara pemilih di TPS karena sering terjadi manipulasi suara. Strategi yang dijalankan adalah menjaga komunikasi dengan konstituen, melakukan pertemuan-pertemuan rutin, dan tentunya mengadakan dialog dengan mereka tentang masalah-masalah yang mereka hadapi di masyarakat. Sehingga dengan menjaga komunikasi dengan konstituen diharapkan mereka tetap akan memberikan suara mereka untuk Pemilu pada

berikutnya. Di samping hal tersebut di atas ternyata masih ada bias jumlah perolehan suara yang dapat menjadikan mereka lolos sebagai anggota legislatif.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi perempuan untuk dapat menjadi anggota DPRD, agar sejak dini memberikan pembuktian kualitas dan kompetensi diri yang unggul tidak kalah dengan kaum laki-laki. Pembelajaran secara proses dalam berpolitik sangat diperlukan, jadi sejak dini masuk dalam partai politik. Perempuan perlu bekerja dengan sungguh-sungguh serta memberikan makna diri pada masyarakat. Keluarga bukan penghambat, tetapi bagaimana menjadi potensi untuk digerakkan sebagai tim sukses dan kerja lainnya. Perempuan perlu mempunyai kegiatan ekonomi sendiri, sehingga aspek finansial tidak tergantung pada pihak lain. Buktikan perhatian pada masyarakat, hasilnya adalah kebaikan untuk diri, tetapi jangan pamrih.
2. Kebijakan dan implementasi organisasi publik (KPU, Panwaslu dan lainnya) hanya satu, bagaimana menciptakan aparatur yang didalamnya menjadi individu yang amanah. Karena dengan bersikap amanah maka segala bentuk tugas dan kewajiban yang diemban akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Melihat bagaimana kehidupan politik, social, dan budaya di Negara kita yang tidak mengedepankan amanah menyebabkan kehidupan public menjadi carut marut karena banyaknya korupsi yang terjadi disegala lini, baik di pemerintahan, parlemen bahkan di peradilan. Banyaknya terjadi korupsi ini karena kita tidak menjalankan amanah

dengan baik tetapi lebih mencari keuntungan dan keamanan bagi diri kita sendiri.

3. Bagi para akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Karena penelitian yang kami lakukan ini masih bersifat eksplanatori, maka banyak hal yang perlu dikaji dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu agar penelitian ini lebih berimbang perlu dikaji dengan menggunakan desain riset kuantitatif, salah satunya dengan model analisis regresi atau Structural Equation Model (SEM).

UNIVERSITAS TERBUKA